LAPORAN PENELITIAN

PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Peneliti :

Neni Kumayas, SIP,. MSi & Steven Sumolang, S.Sos,. MSi
(Sentral Pemerhati dan Studi Strategis / SPESIS)



KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Penelitian Perilaku Pemilih Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow yang bekerjasama dengan sebuah lembaga riset yakni Sentral Pemerhati dan Studi Strategis (SPESIS), telah memetakan secara kualitatif perilaku pemilih sehingga menghasilkan suatu data etnografi yang melihat bagaimana bentuk-bentuk Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow, Apa persoalan yang muncul dalam Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow, lalu Faktor-faktor penyebab munculnya bentuk-bentuk perilaku pemilih dan bagaimana ia menyebabkannya. Penelitian ini menggali bagaimana perilaku pemilih masyarakat Bolaang Mongondow pada pemilihan umum sebelumnya, yang sangat berkaitan dengan fenomena politik uang, tradisi patron-klien etnik Mongondow, pola kepemimpinan tradisionalnya, pola sosial kemasyaraatannya, partisipasi masyarakat dan yang mempengaruhinya.

Setidaknya terlihat kuatnya faktor ikatan-ikatan primordial dalam hal tradisi, etnisitas, agama, dan ideologi pada masyarakat, menjadi sebuah perilaku politik identitas, politik etnisitas yang bisa menjadi modal sosial masyarakat guna mendapatkan pemimpin bangsa yang berintegritas dan berkapasitas, namun di pihak lain dipolitisasi karena adanya kecendrungan pragmatisme yang menggejala, karena kepentingan kekuasaan semata oleh individu atau kelompok tertentu.

Fenomena politik uang dan perilaku pragmatisme yang juga menguat, perlu dicermati melihat perilaku pemilih masyarakat. Bahwasanya penguatan melalui pendidikan politik rakyat perlu selalu dilakukan, dalam rangka menghasilkan pemimpin bangsa. Lebih dari itu perubahan-perubahan dalam hal regulasi pada tatanan berdemokrasi harus dilakukan berdasarkan perilaku nyata pemilih dan bagaimana mengatasi fenomena pragmatisme pada masyarakat.

Sekiranya, hasil penelitian ini akan digunakan sebagaimana mestinya, menjadi bahan masukan bagi semua pengambil kebijakan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Perumusan Masalah..... 5
C. Tujuan Penelitian..... 5
D. Manfaat Penelitian..... 5

BAB II METODOLOGI PENELITIAN..... 6
A. Metode Penelitian..... 6
B. Fokus Penelitian..... 6
C. Sasaran Penelitian/ Pemilihan Informan..... 6
D. Instrumen Penelitian..... 7
E. Pengumpulan Data..... 7
F. Analisa Data..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10
A. Perilaku Pemilih..... 10
B. Pendekatan Dalam Perilaku Memilih..... 13

BAB III GAMBARAN UMUM BOLAANG MONGONDOW..... 20
A. Lokasi dan Keadaan Alam 20
B. Pola Pemukiman..... 22
C. Penduduk..... 23
D. Mata Pencaharian..... 23
E. Kehidupan Sosial Budaya..... 24

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 28
A. Sejarah Perkembangan Partai Politik Di Sulawesi Utara..... 28
B. Pemilu 2014 di Bolaang Mongondow..... 37
C. Faktor Perilaku Pemilih..... 44
D. Faktor Etnisitas/ Politik Etnik Bolaang Mongondow..... 60
E. Peran/ Faktor Strategi Pemenangan, Kampanya, dan Pendukung..... 90
F. Fenomena Money Politics..... 95

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... 110
A. Kesimpulan..... 110
B. Saran/ Rekomendasi..... 117

DAFTAR PUSTAKA..... 119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku pemilih erat kaitannya dengan bagaimana individu berprilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertariakan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik yang akan dipilihnya. Dalam berprilaku secara umum dapat dibafi menjadi dua macam prilaku, yaitu perilaku yang baik atau yang normal dan prilaku yang tidak baik atau menyimpang. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, perilaku normal adalah perilaku politik yang mengikuti tata cara dan aturan main dalam berpolitik, sementara perilaku politik menyimpang adalah pola perilaku politik yang tidak mengikuti aturan main. Bahkan dalam hal ini mungkin mereka melakukan berbagai prilaku yang membuat pihak atau orang lain terganggu dan terintimidasi. Sebagai contoh adalah perilaku kekerasan politik yang sering terjadi di tengah kampanye pemilu, seperti bentriok antara pendukung parpol, intimidasi pendukung parpol lain.

Menurut Kartini Kartono (1981:3), perilaku normal adalah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat umum atau sesuai dengan pola kelompok masyarakat setempat, sehingga tercapai relasi personal da interpoersonal yang memuaskan. Sedangkan perilaku menyimpang (abnorma) adalah perilaku yang tidak sesuai atau tidak dapat diterima oleh masyarakat umum dan tidak sesuai dengan norma masyarakat.

Menurut pendapat Ramlan Surbakti (1992:12), perilaku plitik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemeritnah dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakt, dalam rangka proses pembuatan

pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti (1992:15) dibagi dua, yaitu:

1. Perilaku politik ;lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membaut, melaksanakan dan menegakan keputusan politik.
2. Perilaku politik warga negara maupun individu kelompok yang berhak mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena pa yang dilakukan pemeritnah menyangkut kehidupan warga negara tersebut.

Salah satu perilaku politik yang dilakukan masyarakat adalah dalam benruk pemilihan umum. Dalam pemilihan umum masyarakat berpartisipasi untuk memilih para wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka, perilaku politik uang, pola patron-klien, mengenai politik uang, bahwa sistem pemilihan umum secara langsung tahun 2014 dan tahun sebelumnya, pilkada membuka maraknya praktik *money politics* di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan mengatasnamakan bantuan sosial, bantuan keagamaan, dan lain sebagainya.

Pada proses demokrasi level akar rumput *(grass root)*, praktik money politics tumbuh subur. Karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif harus dijauhi. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati jelas terjadi money politics, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes. Budaya money politics merupakan hal lumrah dalam masyarakat Indonesia.

Mongondow merupakan salah satu etnik besar yang mendiami Provinsi Sulawesi, berada di antara suku bangsa Minahasa, Gorontalo, dan Sangihe Talaud. Besaran wilayah geografisnya yang besar telah memungkinkan Bolaang Mongondow masuk dalam daftar pembentukan provinsi baru di Indonesia Mongondow sebagai etnik yang memainkan peran utama di kawasan Bolaang Mongondow yang dahulunya

adalah sebuah persekutuan swarapraja yang pembentukannya dari 4 kerajaan yakni Kerajaan Mongondow, Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna, dan Kerajaan Kaidipang, pemerintahan berpusat di kerajaan Mongondow. Akhir dari pemerintahan swarapraja ini, pada saat terjadi perubahan dalam politik pemerintahan di Indonesia dan gejolak politik ditahun 1949-1950 sewaktu lahirnya Republik Indonesia Serikat hasil Konferensi Meja Bundar di Denhag pada bulan Desember 1949.

Pada bulan Mei 1957 terjadi perebutan kekuasaan raja-raja di Bolaang Mongondow oleh pemuda-pemuda dan partai-partai politik. Dimata para pemuda dan partai-partai politik ketika itu, raja-raja di Bolaang Mongondow cenderung memilih bentuk negara federal. Sistem pemerintahan swarapraja gabungan empat kerajaan sangat bertentangan dalam kepentingana umum negara kesatuan dan penciptaan iklim demokrasi kemudian. Akibatnya, terjadi pertentangan tajam antara yang pro dan kontra serta berakhir dengan perebutan kekuasaan. Peristiwa tersebut mengakibatkan kekuasaan pemerintahan swarapraja di Bolaang Mongondow secara *de facto* telah berakhir pada bulan Mei 1957. Namun secara *de jure,* pemerintahan kerajaan itu berakhir pada bulan Desember 1957, (Mokoginta, 1996)

Hal yang menarik menelusuri etnik Mongondow dalam hubungannya dengan pola kepemimpinan yang ada pada mereka yang terus berubah. Pola budaya kepemimpinan sebuah masyarakat akan besar pengaruhnya kepada sepak terjang politik pemerintahan. Awalnya wilayah-wilayah kecil kelompok masyarakat Mongondow yang disebut Totabuan memiliki pimpinan yang dipilih dari individu yang kuat, mampu memimpin disebutnya Bogani. Pada saat pembentukan kerajaan awal Mongondow, mereka memilih seorang pemimpin besar yang memimpin semua warga Mongondow dan muncullah seorang pun yakni pemimpin besar, yang pertama adalah Mokodoludut mendiami bukit Bumbungon di dataran Dumoga. Peran bogani

sendiri berganti menjadi sekedar pembantu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perubahan selanjutnya ketika Tadohe seorang punu membuat musyawarah di Tudu in Bakid yang mengatur tatanan sosial pemerintahan kerajaan Monhondow, maka istilah raja serta penghoormatan tertinggi kepada raja, akhirnya membuat pembagian kelas atau strata dalam masyarakat yaitu Raja, Kohongian (bangsawan), simpal, nowow, tahig dan yobuat. Perubahan ini mengklasifikasikan antar kelompok masyarakat dan bertahan hingga berakhirnya masa kerajaan Bolaang Mongondow tahun 1950, atas desakan masyarakatnya sendiri dan sistem pemerintah negara Indonesia yang berubah.

Ini menyiratkan sebenarya rasa persamaan derajat antar kelompok masyarakat begitu kuat sebagaimana model demokrasi yang mereka pahami sekarang ini. Longgarnya ikatan struktur sosial masyarakat, memudahkan sistem kerajaan cepat berubah kepada pola kepemimpinan sekarang ini. Patronalisme dan klientalistik, selalu diperankan oleh mereka yang memiliki status “bangsawan”. Sejauh pengamatan awal peneliti, bahwa tarik menarik pola feodalisme dan egalitarian selalu terjadi dalam masyarakat Mongondow saat ini begitu juga dalam perubahan-perubahan pola kepemimpinan kerajaan Mongondow di masa silam. Pola kepemimpinan tradisional yang berlaku pada masyarakat Mongondow baik di tingkatan elit dan masyarakat umumnya dan bagaimana pola kepemimpinan tersebut menjadi faktor mempengaruhi politik etnik orang Mongondow terutama dalam perilaku masyarakat dalam pemilihan umum.

Penelitian ini akan menggali bagaimana perilaku pemilih masyarakat Bolaang Mongondow pada pemilihan umum sebelumnya, yang sangat berkaitan dengan fenomena politik uang, tradisi patron-klien etnik Mongondow, pola kepemimpinan tradisionalnya, pola sosial kemasyaraatannya, partisipasi masyarakat dan yang mempengaruhinya, dan lain sebagainya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow ?
2. Apa persoalan yang muncul dalam Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow ?
3. Faktor-faktor penyebab munculnya bentuk-bentuk perilaku pemilih dan bagaimana ia menyebabkannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan pilkada pada masa-masa berikutnya terutama dalam penanganan masalah-masalah pemilihan umum
2. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam politik pemilihan umum di Indonesia.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitiatif. Penelitian kualitatif menurut Masri Singarimbun (1982), bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian ini tim peneliti tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial khususnya pendekatan ilmu politik.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya adalah Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow.

C. Sasaran Penelitian/ Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong 2006:132).

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada nsure masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemillihan didasarkan atas pertimbangan bahwa

informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota, Pelaksana Pemilu, Partai Politik, Caleg, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat umum

D. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong 2006:241). Menurut Moleong cirri-ciri umum manusia mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesemapatan mencari respons yang tidak lazim.

E. Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data primer berasal dari informan. Informan yang dipilih adalah unsur Pemerintah Kota, Pelaksana Pemilu, Partai Politik, Caleg, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat umum yang terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Data skunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi yang terkait, hasil

penelitian sejenis maupun publikasi buku-buku yang menunjang pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dilakukan melalui Pengamatan, Wawancara (Interview), dan Dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap Editing dan Interpretasi data, Sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan Reduksi Data, Penyajian Data, dan menarik kesimpulan.

Dokumentasi dan Literatur diperoleh melalui berbagai ketentuan hukum, dokumen partai, dokumen pelaksana pemilu. Sedangkan literatur diperoleh dari penelusuran beberapa buku yang relevan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Moleong (2006:198) adalah sebagai berikut:

1. Wawancara semi struktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

2. Observasi.

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti dating di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

F. Analisa Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualittaif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan mengganbarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik.

- Pengumpulandata
- Penyajian Data
- Reduksi Data
- Kesimpulan-kesimpulan:
- Penarikan/verifikasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan kedalam dua kubu yaitu;Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan dalam Fadillah. Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap suatu partai politik merupakan suatu produk dari karakteristik sosial individu yang bersangkutan (Gaffar, 1992)

Kelemahan mazhab ini antara lain;

1. Sulitnya mengukur indikator secara tetap tentang kelas dan tingkat pendidikan karena kemungkinan konsep kelas dan pendidikan berbeda antara Negara satu dengan lainnya;
2. Norma sosial tidak menjamin seseorang menentukan pilihannya tidak akan menyimpang.

Mazhab Michigan menekankan pada faktor psikologis pemilih artinya penentuan pemilihan masyarakat banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang

berkembang dalam dirinya yang merupakan akibat dari proses sosialisasi politik. Sikap dan perilaku pemilih ditentukan oleh idealisme, tingkat kecerdasan, faktor biologis, keinginan dan kehendak hati.

1. Karakteristik Pemilih

a) Terdapat beberapa daerah/wilayah yang merupakan kumpulan komunitas masyarakat yang terbentuk atas dasar sistim kekerabatan dan paguyuban berdasarkan keturunandan yang menjadi pemuka masyarakat tersebut berasal dari keluarga atau kerabat asli keturunan dari orang yang dipandang terkemuka dari segi sosial ekonomi atau terkemuka karena ketokohannya, sehingga warga masyarakat seringkali menyandarkan diri dan sikapnya terhadap pemuka/tokoh masyarakat tersebut. Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga bergantung pada pemuka masyarakat tersebut. Paternalisme sikap dan perilaku warga masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya tidak pernah berubah, meskipun terdapat berbagai perubahan dalam kondisi sosial ekonomi, namun hal tersebut tidak menjadi faktor yang mempengaruhi adanya perubahan sosial budaya masyarakat setempat. Kecenderungan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi, sosial politik maupun sosial budaya, terbatas pada adanya sistem ide atau gagasan dari pemuka masyarakat untuk memodifikasi sistem sosial dan sistem budaya yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat. Faktor ini menjadi kendala bagi kandidat atau calon legislatif untuk menerobos masuk ke dalam komunitas masyarakat

tersebut dalam rangka sosialisasi atau sekedar silaturahmi. Jika calon legislatif berhasil masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut, hanya sebatas etika pergaulan masyarakat yaitu menerima setiap tamu yang bersilaturahmi, tetapi tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh kandidat/calon legislatif yang bersangkutan.

b) Ikatan primordialisme keagamaan dan etnis menjadi salah satu alasan penting dari masyarakat dalam menyikapi terhadap elektabilitas calon legislatife. Jika seorang kandidat memiliki latar belakang ikatan primordialisme yang sama dengan ikatan primordialisme masyarakat, maka hal tersebut menjadi alternatif pilihan masyarakat. Ikatan emosional tersebut menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ikatan emosional masyarakat tidak hanya didasarkan atas sistim kekerabatan semata, akan tetapi agama menjadi pengikat ikatan emosional, asal daerah atau tempat tinggal, ras/suku, budaya, dan status sosial ekonomi, sosial budaya juga menjadi unsur penting dalam ikatan emosinal komunitas masyarakat tertentu. Hal tersebut terlihat pada basis komunitas masyarakat di daerah pemilihan, daerah/wilayah atau kantong- kantong basis massa yang ditandai dengan adanya simbol-simbol partai yang memberikan gambaran dan sekaligus sebagai pertanda bahwa di wilayah tersebut merupakan kantong basis massa partai tertentu.

c) Komunitas masyarakat yang heterogen cenderung lebih bersifat rasional, pragmatis, tidak mudah untuk dipengaruhi, terkadang memiliki sikap ambivalen, berorientasi ke materi. Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang

bersangkutan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu. Kondisi sosial masyarakat pada strata demikian diperlukan adanya kandidat atau calon yang memiliki kapabilitas yang tinggi baik dari aspek sosiologis (memiliki kemampuan untuk mudah beradaptasi dengan kelompok masyarakat dan mampu mempengaruhi sikap dan orientasi komunitas masyarakat tersebut), atau popularitas dan reputasi tinggi pada kelompok masyarakat tersebut. Jika hal tersebut mampu dilakukan oleh seorang kandidat, maka sangat terbuka perolehan suara pemilih didapat dari komunitas masyarakat tersebut.

B. Pendekatan Dalam Perilaku Memilih

Dennis Kavanagh (1983) melalui buku-nya yang berjudul Political Science and Political Behavior, menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.

1. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. (Dieter Roth, 1983).

Pendekatan sosiologis secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan model penjelasan makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis, dikembangkan oleh ilmuan politik dan dari Universitas Columbia, Pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan Mazhab Columbia. Sementara model penjelasan makrososial menelaah perilaku pemilu di seluruh tingkatan atau

lapisan masyarakat secara keseluruhan, hal mana pada akhirnya melahirkan suatu penjelasan mengenai terbentuknya sistem partai di eropa barat. Menurut Lazarfeld dalam Efriza (2012). Dalam pendekatan ini, Bahwa seorang memilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usia dapat mempengaruhi keputusan seorang pemilih.Setiap lingkarang social memiliki normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma itu menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tentram tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang berkaitan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, pendidikan, jenis kelamin, agama, kelas, kedudukan, ideologi dan sejenisnya dianggap mempunyai peranan dalam menentukan perilaku pemilih.

Pomper melakukan penelitian hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Menurutnya, predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis,dsb.

Jadi, menurut pandangan-pandangan dalam pendekatan sosiologis ini, faktor eksternal sangat dominan dalam membentuk kondisi sosiologis yang membentuk perilaku politik dari luar melaui nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses sosiolisasi yang dialami individu seumur hidupnya. Ada beberapa kritik dalam

pendekatan sosiologis ini yaitu kenyataannya bahwa perilaku memilih tidak hanya satu tindakan kolektif tetapi meripakan tindakan individual. Dapat saja seseorang dijejali dengan berbagai norma social yang berlaku, tetapi tidak ada jaminan bahwa ketika akan memberikan suara. Individu tersebut tidak akan menyimpang dari norma dan nilai yang dimilikinya. Selalu ada kemungkinan kelompoknya ketika dia akan melakukan tindakan politik.

2. Pendekatan psikologis

Pendekatan psikologis di kembangkan oleh mahzab Michigan,(Efriza, 2012) The Survey Center di Ann Arbor yang memusatkan perhatiannya pada individu. Pendekatan psikologis pertama kali dikembangkan oleh Campbell, Gurin dan Miller. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh ketiga ilmuan ini pada pemilih, baik sebelum maupun sesudah pemilu dilakukan. Gambaran bahwa keterkaitan perilaku pemilu dengan konteks kemasyarakatan di mana individu tinggal, mereka melihatnya dalam dua hal, yaitu pengaruh jangka pendek dan dan persepsi pribadi seseorang terhadap calon/kandidat tergantung dari sejauh mana tema-tema (visi dan misi) para calon. Apabila visi dan misi itu dalam penilaian dan persepsi pemilih dapat diterimana, maka besar kemungkinan calon tersebut dipilih.

Penilain dan persepsi jangka panjang, melihat status keanggotaan seseorang dalam partai (identifikasi partai) dinilai turut mempengaruhi pilihan-pilihan dari pemilih. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga inti misalnya orang tua kepada anaknya, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, maupun lingkungan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, kesukuan dan lain sebagainya.

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema.Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi danorientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.

Pendekatan psikologis sosial sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model perilaku politik, sebagaimana dijelaskan diatas. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai.Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Pendekatan psikologis lebih menitik beratkan konsep sosialisasi dan sikap sebagai variable utama dalam menjelaskan perilaku memilih, daripada pengelompokan sosial. Menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat karena produk dari “sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih”.

Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi sebagai kajian utama, yakni ikatan emosional pada satu parpol, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat.

Sementara itu, evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, kompetensi, dan integrasi kandidat.

3. Pendekatan pilihan rasional

Pendekatan pilihan rasional (rational choice) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan berkebang setelah memperoleh konsesnsus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Salah satu tokoh penting yang mengagas pendekatan ini adalah V.O.Key. Menurut key, yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya.

Key melihat kecenderungan masing-masingpemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaianini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa yang lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa (bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasilpenilaiannya negatif, maka pemerintahan tidak akan dipilih kembali.

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan

kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. (Surbakti 2010).

Ketiga pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang, perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh ketiga pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. Huntington dan Nelson (2014) menjelaskan mengenai spektrum partisipasi politik tersebut. Menurut mereka, ada dua jenis partisipasi politik yang bergerak pada satu garis spektrum yaitu :

1) Partisipasi Otonom (Otonomous)

Partisipasi otonom adalah jenis partisipasi yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Pada jenis ini, keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang suatu hal pada pemerinah, mendirikan partai politik, menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan haknya pada pemilihan umum, dan sebagainya.

2) Partisipasi Mobilisasi.

Partisipasi yang dimobilisasi lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanakan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain sangat signifikan terhadap partisipasi individu atau kelompok.

Dalam bahasa Loekman Soetrisno disebutkan, “kemauaan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.” Karena partisipasi politik memiliki sifat spektrum, justifikasi, bahwa ada dua kubu yang saling bertentangan adalah tidak benar pengertian yang tepat dalam konteks tersebut bahwa masyarakat lebih efektif apabila diperintah dengan cara dimobilisasi, tetapi pada saat lain, masyarakat akan lebih sinergis apabila diberi otonomi secara luas ini artinya, partisipasi otonom bisa berbalik secara derastis menuju partisipasi yang dimobilisasi.

Masyarakat yang memandang kelompok atau publik lebih penting daripada definisi situasi yang diberikan oleh individu cenderung mempersukar individu untuk membuat keputusan yang berbeda ataupun bertentangan dengan pendapat kelompok atau Negara tersebut. Oleh karena itu, perilaku memilih di beberapa Negara berkembang harus pula ditelaah dari segi pengaruh kepemimpinan terhadap pilihan pemilih.

Kepemimpinan yang dimaksud berupa kepemimpinan tradisional (kepala adat dan kepala suku), religious (pemimpin agama), patron-klien (tuan tanah-buruh penggarap), dan birokratik-otoriter (para pejabat pemerintah, polisi, dan militer). Pengaruh para pemimpin ini tidak selalu berupa persuasi, tetapi acap kali berupa manipulasi, intimidasi, dan ancamam paksaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM BOLAANG MONGONDOW

A. Lokasi dan Keadaan Alam

Daerah Bolaang Mongondow adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis wilayah Daerah Bolaang Mongondow terletak antara 0^{o} $30^{'}$ – $1^{o}0^{'}$ Lintang Utara dan 123^{o}-124^{o} Bujur Timur. Daerah ini mempunyai batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan,
- Sebelah selatan bebatasan dengan Teluk Tomini dan Laut Maluku,
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo.

Dari batas di atas dapat dilihat bahwa daerah Bolaang Mongondow terletak di tengah-tengah dan diapit oleh Provinsi Gorontalo di sebelah barat dan Kabupaten Minahasa Selatan di sebelah Timur, dengan luas keseluruhan 8.358.04 $km^{2.}$

Sekarang ini Kabupaten Bolaang Mongondow telah dimekarkan menjadi 4 Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Kotamobagu .

Lokasinya sangat mudah ditemukan karena transportasi darat lancar dan muda didapat, baik kendaraan dari arah Provinsi Gorontalo menuju Bolaang Mongondow bahkan kendaraan dari ibukota Provinsi Sulawesi Utara ke daerah Bolaang Mongodow. Jarak antara ibukota pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara (Manado) dengan ibukota setiap kabupaten dan kota tersebut di atas bervariasi. Di pesisir Utara daerah ini terdapat daerah jalur trans Sulawesi yang menghubungkan kota-kota dan

daerah-daerah di Sulawesi. Demikian pula jalan di jalur selatan dapat menghubungkan Kabupaten Minahasa maupun Provinsi Gorontalo. Jalur kendaraan yang ramai adalah jalur pantai utara karena dilalui oleh kendaraan-kendaraan Manado – Boroko – Gorontalo – Palu – Makasar juga sebaliknya.

Bolaang Mongondow memiliki Gunung-gunung, sungai baik yang mengalir ke pantai utara (laut sulawesi) maupun yang mengalir ke pantai Selatan (teluk tomini) bahkan ada beberapa dataran yang dianggap luas, seperti dataran Dumoga dan Lolayan, namun wilayah ini pun relatif berbukit-bukit. Diantara kedua dataran ini mengalir sungai-sungai yang sangat potesial mengaliri lahan persawahan di wilayah itu. Wilayah-wilayah kecamatan lainnya kebanyakan berbukit-bukit dan bergunung. Baik wilayah pesisir pantai utara maupun pesisir panatai selatan sebagiannya terjal karena terdapat bukit dan pegunungan sehingga lembah dan pantainya sangat curam.

Keadaan tanah di daerah Bolaang Mongondow subur, lahan atau areal perkebunan dan persawahan yang sangat luas sehingga daerah ini dikenal dengan lumbung beras untuk Sulawesi Utara.

Daerah Bolaang Mongondow beriklim topis yang relatif basah sebagaimana di daerah lainnya di sulawesi Uatra. Curah hujan beragam atau. terjadinya fluktuasi curah hujan yang tidak tetap sehingga kondisi curah hujan berubah-ubah setiap tahun, karerna faktor perubahan iklim dunia.

Potensi alam di daerah ini didukung oleh faktor kondisi lahan dan penggunaannya. Penggunaan lahan yang diolah oleh masyarakat terdiri atas hutan negara, lahan atau areal perkebunan dan persawahan.

Keadaan tanah yang subur merupakan lahan atau areal perkebunan dan persawahan yang sangat luas, sehingga daerah ini dikenal sebagai lumbung pangan/beras Provinsi Sulawesi Utara. Sub sektor tanaman bahan makanan

merupakan salah satu sub sektor pada pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai.

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan produksi kelapa, jagung dan tanaman-tanaman lainnya, demikian juga produksi hutan yaitu kayu bulat mengalami peningkatan, kecuali rotan mengalami penurunan disebabkan karena areal hutan semakin berkurang. Hal yang sama berlaku peningkatan produksi pada pada bidang peternakan dan perikanan untuk memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat.

Dengan lokasi atau lahan yang luas, subur dan trasportasi lancar untuk menghubungkan desa yang satu kedesa yang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ini membuat masyarakat mudah untuk mendapatkan pekerjaan baik sebagai petani, pedagang, pegawai dan lain – lain pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

B. Pola Pemukiman

Daerah Bolaang Mongondow memiliki topografi pegunungan dan dataran rendah yang luas, penduduk lebih banyak tinggal di daerah dataran rendah, dataran tinggi mereka jadikan sebagai daerah pertanian. Mereka cenderung tinggal di dataran rendah karena, daerah ini memiliki persediaan air yang banyak, hal ini juga yang mendorong penduduk banyak berprofesi sebagai petani sawah.

Pola perkampungan di desa dan kecamatan tertata dengan rapi, rumah-rumah yang dibangun berjejer, didepan rumah terdapat pagar dan jalan rumah-rumah tesebut terletak saling berhadapan pada jalan. Pada zaman dahulu rumah para penduduk umumnya berukuran kecil dan pendek, tapi dengan adanya perkembangan teknologi yang dilengkapi dengan diproduksinya bahan-bahan moderen maka

penduduk Bolaang Mongondow yang ada di desa dan di kecamatan mulai merubah bentuk bangunannya dari bentuk yang kecil menjadi bentuk yang besar dan tinggi yang dilengkapi dengan ornamen-ornamen yang indah. Dengan adanya aliran listrik di setiap desa dan kecamatan maka pola perkampungan pada malam hari telihat indah.

C. Penduduk

Berdasarkan data stastistik dapat dietahui jumlah penduduk yang ada di Daerah Bolaang Mongondow dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang pesat. Dinamika penduduk di daerah ini dipengaruhi oleh faktor demografi dan non demogafi. Faktor-faktor demogafi meliputi, laju pertumbuhan maupun kepadatan penduduk. Jumlah penduduk daerah ini depengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian dan imigrasi.

Jumlah penduduk Daerah Bolaang Mongondow tahun 2013 berjumlah 524.730 jiwa, yang terdiri atas pria 271.289 jiwa dan wanita berjumlah 253.441 jiwa, menurut data yang ada dapat diketahui bahwa perbandingan antara jumlah penduduk pria dan wanita. Berdasarkan data ini menunjukan bahwa jumlah penduduk daerah Bolaang Mongondow didominasi oleh pria, selisih antara penduduk pria dan wanita cukup banyak, yaitu 17.848 jiwa. Penduduk yang tinggal di daerah Bolaang Mongondow ada bermacam-macam suku dan masyarakat saling menghormati satu dengan yang lain.

D. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Bolaang Mongondow, pertama didominasi oleh petani, hal ini sisebabkan karena tersedianya areal pertanian sawah dan ladang yang sangat luas, kedua adalah pedagang dimana para pedagang menyuplai kebutuhan

bahan makanan untuk masyarakat melalui pasar dan toko-toko yang ada disetiap kecamatan juga toko-toko dan super market yang ada di Kotamobagu. Ketiga adalah pegawai, untuk pegawai negeri mengisi pekerjaan dalam urusan pemerintahan dan pegawai swasta bekerja diperusahan-perusahan seperti perusahan ekplorasi dan eksploitasi tambang emas.

Adanya sumber daya alam yang banyak di Bolaang Mongondow menyebabkan rendahnya tingkat pengangguran. Masyarakat termotivasi untuk bekerja setiap hari. Mobiliatas kerja berlangsung setiap hari terkecuali pada hari ibadah, jumat bagi pemeluk agama Islam dan mingggu bagi pemeluk agama Kristen mereka kurang untuk bekerja. Dalam mobilitas pekerjaan tersebut para petani pagi hari ke kebun mengolah lahan sawah dan ladang dengan tanaman yang bermacacam-macam seperti, cengkih, kelapa, kopi, sayur-sayuran dan tanaman lainnya. Para pedagang pagi hari ke pasar dan sore hari pulang ke rumah demikianpun para pegawai negeri, pagi hari mereka ke kantor dan sore hari pulang ke rumah, kecuali untuk beberapa orang yang bekerja sebagai pegawai swasta di perusahan-perusahan tambang mereka bekerja beberapa minggu lalu pulang.

Kontribusi keuangan yang diperoleh oleh penduduk dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas merupakan faktor pemacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.

E. Kehidupan Sosial Budaya

Kehidupan sosial masyarakat Bolaang Mongondow, sejarahnya dimulai dari empat tokoh yang dianggap nenek moyang, masing-masing Gumalangit dan istrinya Tandduata, Tumotaibokol dengan istrinya Tumoitobokot yang asalnya tidak diketahui dari mana. Keempat tokoh yang dianggap nenek moyang ini kemudian melahirkan

keturunan yang sekarang dikenal sebagai orang Bolaang Mongondow. Orang Bolaang Mongondow zaman dahulu tinggal secara tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang dikepalai oleh seorang yang bergelar Bogani.

Tempat tinggal penduduk umumnya di daerah pedesan dan daerah pedalaman mereka berprofesi sebagai petani ladang, petani sawah. Selain pekerjaan sebagai petani mereka juga mempunya pekerjaan sampingan seperti berburu, beternak, memelihara ikan, dan membuat kerajinan tangan seperti, membuat sapu ijuk, keranjang, niru yang terbuat dari rotan, bojo-bojo atau kabela dan pandai besi.

Sistim kehidupan keluarga terdiri dari keluarga batih sebagai unit terkecil dalam masyarakat, terdapat pula kelompok kekerabatan yang disebut *Tongolaki*. Kelompok ini mencakup keluarga batih dalam satu ikatan yang berdasarkan garis keturunan ayah atau dalam istilah antropologi disebut keluarga patrinial kecil. Kelompok kecil lainnya adalah *Tongoaabuian* atau keluarga luas.

Dalam kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow terdapat sistim pelapisan masyarakat yang terdiri dari golonhgan *Kohogian* (Bangsawan) yang menempati lapisan atas dan golongan *Simpol* (rakyat biasa sebagai golongan yang menempati lapisan bawah) Perkawinan antar lapisan biasa terjadi lewat perkawinan ini, seorang dapat beralih dari lapisan yang satu kelapisasn yang lain, baik laki-laki maupun perempuan dari lapisan bawah kalau kawin dengan perempuan atau laki-laki dari lapisan atas maka yang terjadi adalah peralihan dari lapisan bawah ke lapisan atas. Hal ini berarti bahwa lewat perkawinan seorang dapat mengangkat derajat.

Ciri khas kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow terlihat pada bahasa yang mereka gunakan yaitu bahasa Bolaang Mongondow, terkecuali di daerah Bolangitan, mereka menggunakan bahasa Bolangitan. Bahasa daerah yang mereka gunakan hanya secara interen saja sedangkan bahasa komunikasi dengan suku lain

digunakan bahsa Indonesia sebagai bahasas pergaulan resmi. Selain budaya tersebut di atas, budaya yang sangat kuat dalam kehidupan mereka adalah budaya gotong royong. Budaya ini mereka lakukan dalam acara kematian, pesta nikah dan lain-lain.

Sejarah Bolaang Mongondow, pada akhir abad ke- 19, Bolaang Mongondow ada 5 kerajaan berpemerintahan sendiri yang disebut *Selbestuurrendelandschappen*, kelima kerajaan tersebut adalah :

1. Kerajaan Bolaang Mongondow di bawah raja Riedel Mannuel Manappo (1897-1927) memindahkan ibukota ke Kotabangon di daerah pedalaman Bolaang Mongondow.
2. Kerajaan Bolaang Uki di bawah Raja Wilem van Gobel (1872-1901. Ibukota mula-mula adalah Walugu kemudian Sauk, penganti raja Wilem van Gobel yakni Hasan Iskandar van Gobel (1901-1941 pada tahun 1906 memindahkan ibukota kerajaan ke Molibagu di pesisir selatan Bolaang Mongondow.
3. Kerajaan Bintauna dibawah Raja Muhanad Taraju Datunsolang (1895-1948). Ibukota kerajaan selaluberpindah-pindah mulai dari Fantayo kemudian Minaga dan terakhir di daerah Pimpi yang kesemuanya terletak di daerah pesisir utara Bolaang Mongondow.
4. Kerajaan Bolaang Itang dibawah Raaja Bondji Ponto (1890-1907) Ibukota kerajaan adalah Bolaang Itag yang terletak di pesisir Utara. Penggantinya Raja Ram Suit Ponto yang memerintah tahun (1907-1950).
5. Kerajaan Kaidipang dibawah Raja Antugia Korompot (1897-1910), ibukotanya adalah Buroko yang terletak dipesisir Utara dekat perbatasan dengan dengan kerajaan Atinggola di daerah Gorontalo.

Sehubungan dengan Onderrafdeeling Bolaang Mongondow baru dibentuk oleh Pemerintahan Koloanial Belanda pada tahun 1901 sebelumnya para penguasa di atas

langsung berhubungan dengan Residen Belanda yang berkedudukan di Manado. Susunan tata pemerintahan, khususnya alat-alat kelengkapan dari setiap kerajaan tidak seragam. Dikerajaaan Boilaang Mongondow. Dalam pmenjalankan tugasnya seorang raja dibantu oleh beberapa pejabat yaitu Sahada Tompunuon, Jogugu, Penghulu dan Major Kadato.

Semua kerajaan tersebut di atas diikat dengan apa yang dikenal sebagai "Korte Verklring" atau piagam perjanjian pendek. Semua Korte Verklaring isinya didahului dengan janji bahwa raja mengakui pertuanan Kerajaan Belanda dan Pemerintahan Belanda atas rakyat dan wilayah kerajaannya. Raja dan rakyat tidak diperkenankan mengadakan setiap bentuk hubungan dengan bangsa lain berdiam di wilayah di wilayah kerajaan tanpa izin atau sepengetahuan dari pemerintah kolonial Belanda, juga raja berjanji memelihara hubungan baik dengan kerajaan tetangga. Baik raja maupunpejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah kolonial. Raja tidak berhak mengadili rakyat yang bukan rakyatnya. Raja wajib memelihara keamanan kerajaan serta dilarang mempersenjatai rakyat tanpa izin dari pemerintah. Raja harus menjaga agar rakyat tidak seenakanya keluar masuk wilayah kerajaan. Juga raja, terutama wajib menyetor emas atau sesuai aturan yang yang ditentukan oleh pemerintah kolonial.

Tapi dapat dikatakan bahwa tidak semua isi Korte verklaring mengandung hal-hal yang negatif sebagaimana yang dijeklaskan di atas. Misaalnya raja diwajibkan menginvestasikan pertanian demi kelancaran lalulintas perekonomian. Perdagangan budak, perampokan laut serta meminjamkan uang dengan bunga tinggi dilarang. Selain itu raja diwajibkan memerintah rakyatnya dengan adil dan bijaksana.

Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial mulai mempersiapkan rencana pembentukan Onderafdeeling Bolaang Mongondow. Onderafdeeling baru ini masih

merupakan satu lingkungan wilayah jabatan atau ambsressort bagi seorang pamong praja bangsa Belanda atau Europees Bestuur sambtenaar. Hal ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintah menurut azas deconstratie berdasasrkan regering reglemen 1855 (Staatsblad 1855 no.2). Kepala Onderfdeeling administratief ini nantinya diberi gelar jabatan Controleur Binrnlands bestuur bagi yang jabatannya jurusan Indolo Universitas Leiden dan gelar jabatannya Gezaghebber bagi yang hanya lulusan Berstuuracademie.

Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, wilayah Bolaang Mongondow termasuk dalam keresidenan Manado. Tetapi dalam hal pemerintahan, wilayah berbeda dengan wilayah lainnya yang ada di keresidenan Manado. Hal yang membedakannya adalah Di wilayah Bolaang Mongondow tidak terdapat pejabat Pemerintahan Hindia Belanda yang bergelar Contoleur atau asisten residen sebagai kepala pemerintahan, seperti yang ada di daerah lainnya. Hal ini berlangsung hingga akhir abad ke-19.

Pada waktu itu wilayah Bolaang Mongondow terdapat lima kerajaan yang mempunyai otonomi masing-masing (Zelfbestuur Landschapen). Semua kerajaan yang berada dalam wilayah Bolaang Mongondow diikat dalam ssatu ikatan kerja sama Kokrte Verklaring atau Piagam perjanjian pendek, yaitu apabila saat terjadi pergantian penguasa, maka kjontrak perjanjian tersebut dapat diperbaharui kembali.

Pejabat Controleur yang pertama menjabat di Bolaang Mongondow pada akhir abad ke-19 adalah Anthon Cornelis Vceenhuyzen. Pejabat Belanda ini tidak mendapat tanggapan positif dari raja saat itu yang dijabat oleh Riedel Manoppo.

Mayoritas penduduk di daerah Bolaang Mongondow beragama Islam kemudian diikuti agama Kristen dan agama-agama lain, kehidupan mereka saling menghargai satu dengan yang lain.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Partai Politik Di Sulawesi Utara

Sebagaimana halnya warna politik umumnya di provinsi-provinsi Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara juga menjadi basis kekuatan Golkar dalam setiap ajang pemilu. Namun, dalam Pemilu 2009 dominasi beringin mulai terusik. Fakta menunjukkan, penguasaan Golkar sedemikian mengakar di wilayah yang kini berpenduduk sekitar 2 juta jiwa ini. Semenjak pemilu pertama pada era Orde Baru hingga pemilu terakhir, peta politik Sulut seakan tak berubah. Sebelum wilayah barat provinsi ini dimekarkan menjadi Provinsi Gorontalo ataupun setelah pemekaran tersebut, wilayah ini tetap menjadi kantong suara Golkar. Memang Sulut layak disebut sebagai basis Golkar. Saat Pemilu 1971 digelar Golkar telah mengukuhkan dirinya sebagai pemenang mayoritas dengan meraup sekitar dua pertiga bagian suara (69 persen). Berbagai ajang kontestasi politik selanjutnya pun kerap bertutur semakin mengakarnya beringin di wilayah ini. Bahkan, pada pemilu terakhir pada era Orde Baru, Pemilu 1997, suara yang terdulang tergolong fantastis: 96 persen, Sedemikian kokohnya benteng nasionalis Golkar yang terbangun pada kurun waktu tersebut seakan juga menutup lembaran politik masa lampau yang menggambarkan begitu dinamisnya persaingan antar kekuatan ideologi politik di Bumi Kawanua. (Mongilala, 2010).

Selanjutnya Mongilala (2010) menuliskan, sejak proklamasi kemerdeakan pada tangga 17 agsutus 1945 sampai 1950, daerah proponsi 32eroleha utara saat itu masih merupakan wilayah NIT, namun demikian, sebagian besar pemimpin pemimpin rakyat saat itu telah bertekad bulat untuk menegakkan negara kesatuan republik

33erolehan dan menentang negara federal NIT pada waktu itu. Kebulatan tekad ini didukung dengan adanya gerakan-geraan pada waktu itu yang kesemuanya menentang adanya Negara bagian NIT, yaitu sebagai berikut :

1. Terbentukkanya BPPNI pada tahun 1945 di manado
2. Terbentuknya BNI di manado, 33eroleha, Gorontalo dan Sangir tgl 23 Januari 1946 di Gorontalo serta meletusnya peristiwa Merah Putih di manado yang terkenal dengan perjuangan 14 februari 1946
3. Lahirnya G.I.M di manado /33eroleha pada tahun 1947
4. Lahirnya G.P.I pada tahun 1949
5. Terjadinya peristiwa perebutan senjata di manado antara golongan federalis pada tanggal 3 mei 1950.

Pada tanggal 10 mei 1950 mendaratlah tentara nasional 33erolehan (TNI) yang pertama di 33erole yaitu batalion “WORANG” mempunyai effect psycologis politis di daerah 33eroleha utara dan juga selalu dapat menstabilisir situasi dan kondisi politik pada waktu itu, sebagai akibat dari maklumat pemerintahan No X, maka mulai timbul pula partai-partai 33eroleh di daerah 33eroleha utara yaitu seperti PSII, MASJUMI, PNI, PARKINDO, dan lain-lain.

PKI mulai masuk pada tahun 1948 di daerah MINAHASA yang di bawah oleh Karel Supit CS, karena daerah ini daerah surplus, mempunyai areal yang luas dan manpower yang masih sedikit serta pula penduduknya tergolong mempunyai agama, maka PKI sangat sulit untuk 33erolehan33an secara langsung kepada penduduk di sini. Sehingga target dari Karel Supit CS ialah dengan 33erolehan33an dari lingkungan keluarga dan famili secara lokal (TOMPASO, KAWANGKOAN dan Sekitarnya) dan selanjutnya menyusup melalui pendidikan/sosial/budaya dengan dibentuknya Yayasan Bhakti (SD,SMP,dan lain-lain)

Dalam periode 1950-1955 seteah terbentuknya 34erole kesatuan RI terjadilah perbahan dalam ketatanegaraan dan sistem pemerintahan di negara kita yang 34erole menggantikan UUD 1945 dengan UUDS 1950. Pada waktu pemilu 1955, anggota – anggota konstituante/DPR Pusat untuk SULUTTENG adalah

1. 3 orang dari partai PSII
2. 2 Orang dari partai MASJUMI
3. 2 Orang dari partai PNI
4. 2 orang dari partai PARKINDO
5. 1 orang dari Partai PKI

Pada tahun 1957 -1959 terjadi pergolakan di daerah 34eroleha utara dan dengan PEPERPU/KASAD No. 33/1958 partai-partai Politik MASJUMI, PSII, PARKINDO dan IP-KI dibekukan. Pada waktu itu ialah pada tahun 195, PKI mendapatkan peluang untuk perkembanganya dengan menyusup melalui beberapa kesatuan partisan anti PERMESTA seperti FDR,GAP,BRAP. Sementara itu suhu kehidupan politik berdasarkan pola demokrasi liberal telah sedemikian meningkatnya pengendalian terhadap jalanya demokrasi yang sehat mulai terlihat, terasa kompilikasinya dan politik tidak stabil.

Perebutan antara partai-partai politik terjadi demikian hebatnya masing-masing untuk memperebutkan pengaruh dan kedudukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga dengan demikian tidak ada 34erolehan34 politik dan juga tidak stabilisasi pemerintahan.

Dalam situasi seperti ini, dikeluarkan DEKRIT Presiden tanggal 5 juli 1959 yang berkedudukan kembali kepada UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Pada waktu keluarnya DEKRIT presiden tersebut, partai-partai politik yang ada di 34eroleha utara, PNI, PSII, PARKINDO, IP-KI, KATHOLIK, MURBA, NU, PKI.

Kekuatan sosial politik sosial hasil pemilu 1955 pada waktu itu adalah sebagai berikut :

1. PNI
2. PSII
3. PKI
4. MASYUMI
5. PSI
6. KATHOLIK
7. PARKINDO
8. PRN
9. PARTAI BURUH
10. GPP
11. BPP-RI
12. PKR
13. BAPERKI
14. MURBA
15. PRI
16. PERS – PEG. POL
17. PIR-H
18. PIR-W
19. Gerakan Banteng
20. P.W LAPIAN
21. NU
22. KPI
23. GERAKAN ANGKATAN MUDA

24. RENGKU, S

25. MOGOT

Tetapi ternyata bahwa maksud dari DEKRIT 36eroleha tanggal 5 juli 1959 tidak terlaksana dan malahan terjadi penjajahan dan pemusatana kekuasaan serta penyimpangan-penyimpangan yang 36erolehan36 dari 36erolehan dan UUD 1945.

Keadaan ini berlangsung terus menerus sampai tahun 1965 dan yang memuncak pada pengkhianatan G30 S/PKI yang sebelunya telah memperoleh peluang untuk menyusun kekuatan dalam situasi yang berlaku 36ero waktu itu. Dalam periode 1959-1965 segala-gaanya dipolitisir menuntur ideologi politik dari masing-masing partai politik untuk kepentingan golongan sendiri . masyarakat dan aparat pemerintah telah 36eroleha-kotakkan menurut ideologi 36erole politik sehingga dalam hal 36eroleh memegang komando. Kepetingan masyarakat 36er dan pembangunan telah diabaikan.

Pada tahun 1960, dengan penetapan presiden No. 5 /1960 terbentuklah propinsi administrasi Sulwesi utara dan Gubernur pertama adalah Mr. Arnold Baramuli. Propinsi 36erolehan36an ini tidak lama kemudian dibentuk menjadi propinsi otonom SULUTTENG yaitu dengan Undang-undang No. 47 Prp, tahun 1960. Anggota DPRD SULUTENG berjumlah 40 orang, sementara itu dalam tahun 1962, terbentuk lagi partai politik di 36erole.

Partai-partai politik yang menonjol saat itu

1. PSII
2. PNI
3. PARKINDO

Pada tahun 1964 dengan undang-undang no 13 tahun 1964, propinsi SULUTTENG dibagi menjadi 2 Propinsi Otonom yaitu Propinsi Sulawesi tengah dan

Sulawesi utara. Anggota DPR-GR Propinsi Sulawesi utara berjumlah 50 orang, didasarkan pada angka-angka hasil PEMILU 1955 dan lain-lain kebijaksanaan yang terpaksa di tempuh untuk menjamin ketenangan politik

Pada tahun itu juga terbentuk Front Nasional (FRONAS) di daerah 37eroleha utara berdasarkan keputusan President No. 71/1964. Situasi politik 37erol menjadi panas karena PKI mulai mengajukan 37eroleha dan tuntutan-tuntutan untuk Nasakominsasi DPRD, FRPNAS, BPH dan semua lembaga-lembaga pemerintah sampai 37eroleh desa. Demikian pula 37erole 37erolehan tuntutan retooling terhadap gubernur kepada daerah propinsi 37eroleha utara dan terhadap bupati kepada darah 37eroleh 37erole dan 37eroleha pada waktu itu.

Kekuaran sosial politik saat itu dimenangkan oleh :

1. PSII
2. PARKINDO
3. PNI

Pada tahun 1965 situasi politik telah sedemikian meningkat 37ero dan keadaan ini memuncak dengan pengkhiantan G30 S/PKI.

Perkembangan selanjutnya yaitu lahirnya pemerintahan orde baru pada tahun 1966 setelah menghacurkan G30 2/PKI dan meruntuhkan rezim orde lama dan inipun terasa di daerah ini. Pemerintahan orde baru dibawa pimpinan Jenderal Soeharto, mengadakan pemurnian kembali cita-cita kemerdekaan dan meluruskan kembali sejarah 37erolehan. Selain dari pada itu pemerintah orde baru mengadakan koreksi total terhadap segala penyimpangan dan penyelewangan yang terjadi selama pemerintahana orde lama baik dibidang ideologi, 37eroleh dan ketatanegaraan maupun 37eroleha sikap mental dan cara bekerja.

Dengan lahirnya pemerintahan orde baru, maka PKI dan Ormas-ormasnya dinyatakan sebagai partai yang terlarang di 38erolehan dan penumpasan terhadap sisa-sisa unsur G30 S/PKI terus menerus dilakukan. Di daerah Sulawesi Utara terbentuk aksi-aksi massa seperti KAMI, KAPPI, KABI, dan KAGI yang 38erolehan aksi-aksi dalam arankan penghacuran PKI dan antek-antok orde lama. Terhadap kader-kdaer dan anggota simpatisan PKI diadakan penankapan dan penahanan.

Partai polltik MURBA dan PARMUSI diaktifkan kembali dan pengaruh partai 38eroleh PNI merosot karena pimpinan –pimpinan tidak tegas terhadap orde lama serta 38erolehan38an mantan prsedent SOEKARNO, akibatnya juga di rasakan di darah 38eroleha utara. Ajang perebutan suara Pemilu 1955 menjadi saksi. Saat itu, Sulut terbagi menjadi dua wilayah yang menjadi basis kekuatan politik berbeda berdasarkan karakter keagamaan yang melekat pada penduduk setempat. Di satu sisi, wilayah barat Sulut, khususnya Bolaang Mongondow, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, partai-partai bercorak keislaman, seperti Masyumi, mampu berkuasa menjadi pemenang perebutan suara. Sebaliknya, sebelah timur Sulut, baik Minahasa, Manado, dan kawasan Kepulauan Sangihe dan Talaud yang berpenduduk mayoritas Kristen, menjadi lahan tersubur bagi Partai Kristen Indonesia (PARKINDO). Di antara tarik-menarik kekuatan politik antardua partai bercorak keagamaan yang berbeda, kekuatan politik nasionalis PNI menjadi penyeimbang di kedua kawasan. Kondisi semacam ini cukup menguntungkan bagi PNI. Di tengah kuatnya persaingan antarkekuatan politik berbasis keagamaan, partai ini mampu menjadi pemenang kedua 38erolehan suara keseluruhan Sulut setelah Parkindo.

Saat Golkar berkuasa, persaingan dua kekuataan bercorak keagamaan berakhir. Kendati partai-partai Islam yang berfusi ke PPP masih menduduki posisi kedua setelah Golkar di Bolaang Mongondow dan partai-partai Kristen yang berfusi

dengan partai-partai nasionalis ke dalam PDI menduduki posisi kedua di wilayah Minahasa serta Sangihe dan Talaud, terpaut selisih suara yang sangat besar dengan Golkar . Betapapun kuatnya benteng yang terbangun, celah kerapuhan mulai tampak. Memang, fakta masih menunjukkan dominasi penguasaan beringin di Sulut. Namun, fakta yang sama juga menunjukkan mulai menyusutnya 39erolehan suara Golkar dari waktu ke waktu. Memasuki era reformasi, misalnya, tatkala pemilu multipartai 1999 digelar, menjadi titik awal pudarnya pengaruh. Perolehan suara Golkar turun drastis di Sulut hingga tinggal 44 persen. Beruntung bagi Golkar, pada saat 39erolehan suara nasional Golkar amat terpuruk, Sulut masih tergolong loyal dan menempatkan partai ini tetap sebagai pemenang di wilayahnya.

Parahnya, pemilu selanjutnya pada saat Golkar kembali menguasai panggung politik nasional, justru grafik penurunan persentase 39erolehan suara partai ini di Sulut berlanjut. Pemilu 2004, 39erolehan suara Golkar tinggal sekitar 32 persen. Memang, penurunan dalam proporsi tidak berarti kekalahan total partai ini. Dari sembilan kabupaten dan kota, Golkar masih mampu menguasai tujuh wilayah. Penurunan ini pun sangat mungkin dipengaruhi pemisahan Kabupaten Gorontalo, basis Golkar dari Sulut, menjadi Provinsi Gorontalo. Namun, fenomena kemunculan partai-partai baru pada Pemilu 2004 turut menjadi penyebab tergerusnya pengaruh Golkar. Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Demokrat, misalnya, dua partai baru yang langsung menyodok di urutan ketiga dan keempat 39erolehan suara di Sulut, masing-masing sekitar 15 persen dan 14 persen. Di Kota Manado, Demokrat bahkan mampu menjadi pemenang.

Menyusutnya pengaruh Golkar dengan sendirinya mulai mengubah konfigurasi penguasaan suara. Menariknya, kondisi demikian seakan mengingatkan kembali lembaran politik masa lampau. Pudarnya pengaruh Golkar lebih kentara di

wilayah timur Sulut, seperti sebagian Minahasa, Manado, Tomohon, dan Bitung, yang notabene merupakan wilayah mayoritas Kristen. Di wilayah ini pula partai bercorak kekristenan, seperti PDS, meraih suara cukup signifikan. Namun, kondisi yang sama tidak terjadi di wilayah Bolaang Mongondow, di mana Golkar masih terlampau kuat. Sekalipun mayoritas Islam, partai-partai bercorak keislaman belum mampu menandingi pengaruh Golkar di kawasan ini.

Menuju Pemilu 2009 Susutnya 40erolehan suara tidak juga otomatis mencerminkan bakal terpuruknya Golkar dalam ajang Pemilu 2009 ini. Dengan menggabungkan antara hasil kontestasi Pemilu 2004 dan kontestasi lokal pilkada menunjukkan, dari 13 kabupaten dan kota, tercatat lima kabupaten yang masih tergolong solid dalam penguasaan partai ini.

Tak hanya dari PDI-P, Partai Demokrat, ataupun PDS, tapi juga dari partai baru, seperti Hati Nurani Rakyat, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Barisan Nasional (Barnas). Kuncinya dengan menampilkan sosok yang lebih dikenal secara positif oleh masyarakat. ”Partai-partai lain dengan figur-figur yang tidak asing di masyarakat akan mengganggu partai yang sudah mapan,” papar Rumokoy. Penerapan sistem suara terbanyak dalam menentukan caleg terpilih diakui membuat hasil Pemilu Legislatif 2009 di Sulut menjadi sulit diprediksi. Masing-masing partai berlomba-lomba mencalonkan figur-figur yang diperkirakan mampu menarik suara masyarakat. Apalagi, kultur paternalistik masyarakat masih kuat mengakar di sebagian wilayah Sulut, semakin menguatkan besarnya peran sosok.

Ajang kontestasi lokal pilkada sedikitnya menyingkap fenomena demikian. Bukan sesuatu yang mengherankan apabila pasangan kepala daerah incumbent yang notabene merupakan kader Golkar menang dalam pilkada di wilayah-wilayah tersebut. Di daerah dengan tradisi dan sifat paternalistiknya masih kuat, seperti di Bolaang

Mongondow serta Sangihe dan Talaud, figur leader formal, seperti bupati maupun wali kota dan penguasaan jajaran birokrasi, masih faktor penentu untuk mendulang suara.

Namun, berbeda di mana karakter masyarakatnya cenderung egaliter. Dinamika politik di daerah semacam ini relatif dinamis. Di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kota Bitung, misalnya, pemenang pilkadanya justru diusung oleh partai-partai yang tergolong kecil dan mempunyai latar belakang sebagai pengusaha, bukan birokrasi. Konfigurasi politik semacam inilah yang mewarnai perjalanan politik Sulut saat ini. Tidak tertutup kemungkinan, geliat politik yang semakin dinamis akan mengubah peta politik selama ini.

B. Pemilu 2014 di Bolaang Mongondow

Peneliti mengambil kasus pemilihan legislatif 2014, khususnya pileg untuk DPRD Provinsi Sulut di Kabupaten Bolaang Mongondow. Jumlah pemilih dalam daftar Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya, Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Keseluruhan adalah 169.584. ini dibagi ke dalam masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Sang Tombolang 7.829
2. Kecamatan Dumoga Barat 12.849
3. Kecamatan Dumoga Timur 15.161
4. Kecamatan Dumoga Utara 10.600
5. Kecamatan Lolak 20.046
6. Kecamatan Bolaang 13.613

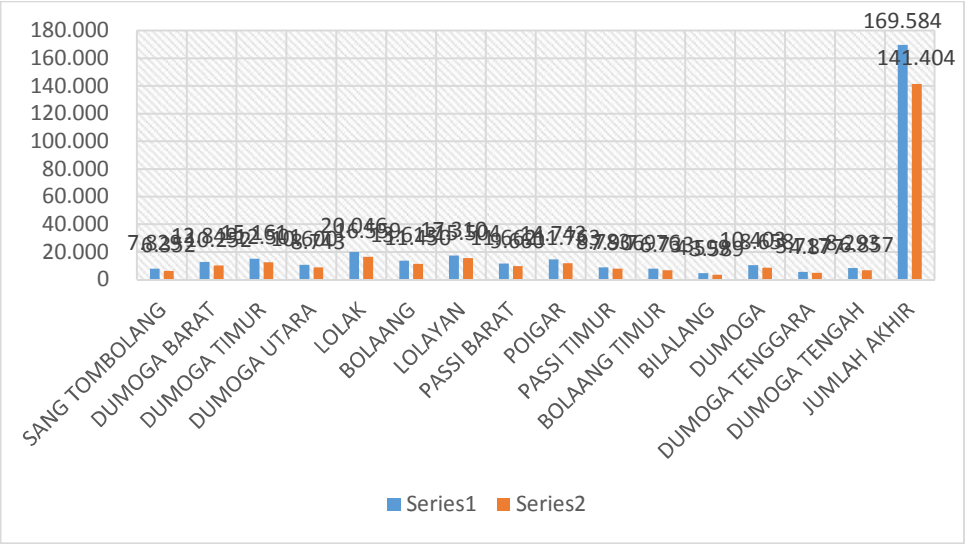
7. Kecamatan Lolayan 17.310
8. Kecamatan Passi Barat 11.662
9. Kecamatan Poigar 14.743
10. Kecamatan Passi Timur 8.783
11. Kecamatan Bolaang Timur 7.976
12. Kecamatan Bilalang 4.599
13. Kecamatan Dumoga 10.403
14. Kecamatan Dumoga Tenggara 5.717
15. Kecamatan Dumoga Tengah 8.293

Kemudian pengguna hak pilih yang terdapat di dalamnya ; Pengguna hak pilih dalam DPT, Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya, Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) berjumlah 141.404. Perincian masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Sang Tombolang 6.352
2. Kecamatan Dumoga Barat 10.252
3. Kecamatan Dumoga Timur 12.501
4. Kecamatan Dumoga Utara 8.743
5. Kecamatan Lolak 16.559
6. Kecamatan Bolaang 11.450
7. Kecamatan Lolayan 15.504
8. Kecamatan Passi Barat 9.660
9. Kecamatan Poigar 11.763
10. Kecamatan Passi Timur 7.906

11. Kecamatan Bolaang Timur 6.733
12. Kecamatan Bilalang 3.589
13. Kecamatan Dumoga 8.658
14. Kecamatan Dumoga Tenggara 4.877
15. Kecamatan Dumoga Tengah 6.857
16. Jumlah keseluruhan 141.404
17. Selirih keseluruhan keduanya adalah 2180

Tabel 1. Selisih Daftar Pemilih dengan Penggunaan Surat Suara



Perolehan angka-angka tersebut memperlihatkan angka pengguna hak pilih yang tidak berjarak jauh dengan jumlah pemilih, artinya tingkat partisipasi warga Bolaang Mongondow terhadap pemilihan umum dalam hal menggunakan hak suaranya adalah sangat tinggi.

Setiap kecamatan menunjukan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif 2014.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Warga



Selisih jumlah pemilih dan pengguna hak pilih dapat dilihat :

- Kecamatan Sang Tombolang 1.477
- Kecamatan Dumoga Barat 2.597
- Kecamatan Dumoga Timur 2.660
- Kecamatan Dumoga Utara 1.857
- Kecamatan Lolak 3.487
- Kecamatan Bolaang 2.163
- Kecamatan Lolayan 1.806
- Kecamatan Passi Barat 2.002
- Kecamatan Poigar 2.980
- Kecamatan Passi Timur 877
- Kecamatan Bolaang Timur 1.243
- Kecamatan Bilalang 1.010
- Kecamatan Dumoga 1.745

- Kecamatan Dumoga Tenggara 840
- Kecamatan Dumoga Tengah 1.436
- Jumlah keseluruhan 28.180

Terlihat angka terendah terdapat pada kecamatan Dumoga Tenggara, sedangkan yang tertinggi adalah kecamatan Poigar, artinya tingkat partisipasi tertinggi ada pada kecamatan Dumoga Tenggara sementara partisipasi terendah ada pada kecamatan Poigar.

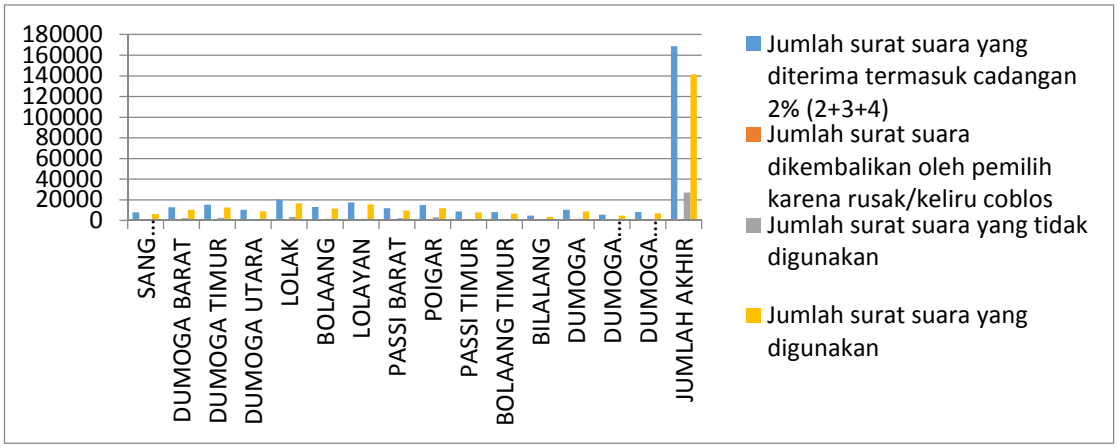
Tingginya partisipasi masyarakat Bolaang Mongondow dalam pemilihan umum legislatif, terjadi juga pada pemilihan umum untuk pemilihan DPD RI, DPRD Kabupaten, kemudian pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Atas dasar ini terlihat para calon legislatif yang beramai-ramai untuk menggalang suara di wilayah Bolaang Mongondow.

Seorang Calon legislatif Arman (34 th), mengemukakan bahwa masyarakat Bolaang Mongondow bisa dengan mudah digalang, bisa juga sangat susah untuk menggalangnya, akan tetapi sekali bisa mendapati hati mereka dengan pendekatan yang tepat, maka orang Mongondow akan sangat loyal dan banyak pendukung. Latar belakang karakter atau perilaku pemilih orang Mongondow ini akan dibicarakan selanjutnya. Partisipasi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow sangat berkaitan dengan berbagai faktor baik etnisitas, karakter pemilih, psikologis. Terutama faktor budaya masyarakatnya yang menurut beberapa ahli sangat mempengaruhi perilaku pemilih.

Berikut adalah jumlah sarat suara yang diterima termasuk cadangan 2 % berjumlah 168.730 suara, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos berjumlah 402, jumlah surat suara yang tidak digunakan berjumlah

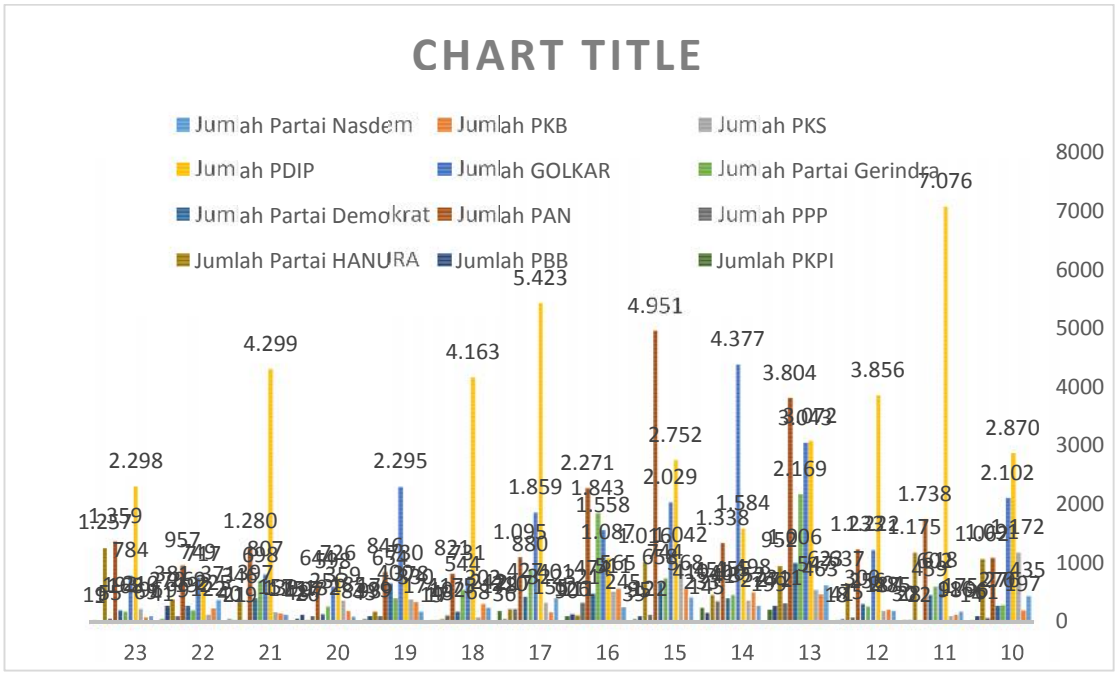
26.924, sehingga keseluruhan kertas suara adalah 141.404. Ini dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan

Tabel 3. Jumlah Surat Suara



Adapun hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 di Kabupaten Bolaang Mongondow



Sumber: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (2014)

C. Faktor Perilaku Pemilih

Pemilih adalah subyek partisipasi bukan obyek mobilisasi, sehingga ia mempunyai kemandirian dalam membangun kesadaran, merumuskan pilihannya, dan mengekspresikan pilihannya. Dalam bahasa yang lain para pemilih merupakan rational voters yang mempunyai tanggung jawab, kesadaran, kalkulasi, rasionalitas, dan kemampuan kontrol yang kritis terhadap kandidat pilihannya, yang meninggalkan ciri- ciri traditional voters yang fanatik, primordial, dan irasional, serta berbeda dari swingers voters yang selalu ragu-ragu dan berpindah-pindah pilihan politiknya. (Riyanto, 2004).

Sebagian besar pemilih mau terima Uang, pemilih Sulut rupanya tidak alergi dengan politik uang. Mereka menganggap wajar dan mau menerima pembagian uang dari calon yang maju dalam Pemilu. Pemilih Pragmatis Masih Menjadi Penentu, kelompok ketiga yang menjadi penentu kemenangan dalam Pilgub adalah kelompok pragmatis, yang persentasenya bisa sangat besar. Mereka tidak akan melihat visi, misi, program, atau track record calon yang akan diusung.

Faktor-faktor penentu pilihan dari pemilih yang dapat dirangkung peneliti adalah sebagai berikut :

1 Popularitas / figur kandidat

2 Pengalaman kandidat

3 Kemampuan / kompetensi kandidat

4 Pasangan (kalau pencalonan wakil gubernur/bupati/Bupati)

5 Track record / jejak rekam kandidat

6 Latar belakang profesi

7 Dukungan dari tokoh agama

8 Dukungan dari tokoh masyarakat

9 Asal partai yang mencalonkan

10 Asal daerah calon (kabupaten, kecamatan, desa)

Pertimbangan terbesar dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum berdasarkan pengamatan berturut-turut adalah popularitas / figur kandidat, pengalaman kandidat, kemampuan / kompetensi kandidat, pasangan, track record, latar belakang profesi, dukungan dari tokoh agama, dukungan dari tokoh masyarakat, asal partai yang mencalonkan, dan asal daerah calon.

Selama ini paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih dalam Pemilu, yaitu: Pertama, identitas partai, dimana semakin solid dan mapan suatu partai politik maka akan memperoleh dukungan yang mantap dari para pendukungnya begitu pula sebaliknya. Kedua, kemampuan partai dalam menjual isu kampanye. Partai status quo biasanya menjual isu-isu kemapanan dan keberhasilan yang telah mereka raih. Partai-partai politik baru biasanya menjual isu-isu "menarik" dan partai politik tersebut biasanya dianggap "bersih" terutama dari nuansa money politics. Ketiga, penampilan kandidat, dimana performa kandidat sangat menentukan keberhasilan kandidat. (Kushartono, Toto, 2006).

Ketentuan yang berlaku memberikan kewenangan yang sangat besar kepada parpol untuk memberi warna kepada kepala daerah terpilih, apakah kepala daerah itu berkualitas ataukah tidak. Dengan syarat, sebagaimana ditentukan UU tersebut, parpol melakukan perekrutan kandidat melalui mekanisme internal yang demokratis dan transparan. Namun demikian, dalam realitasnya perekrutan kandidat itu umumnya berlangsung dalam mekanisme demokrasi yang semu dan tidak transparan. Hal ini

disebabkan mekanisme itu terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan pragmatik elite parpol, sehingga kualifikasi kandidat yang berkaitan dengan kompetensi, kredibilitas, dan akuntabilitas calon tenggelam oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek elite parpol. (Amirudin dan Bisri, A. Zaini, 2006). Dalam rekrutmen tersebut banyak terjadi negoisasi menyangkut kontribusi calon terhadap partai. Akibatnya calon yang dimunculkan adalah yang berhasil memenangkan negoisasi itu, dengan tolok ukur utamanya berupa materi. Kandidat - kandidat yang diajukan parpol juga tidak luput dari pragmatisme yang terjadi. Pada akhirnya kebanyakan warga dan pemilih pada umumnya mempersepsikan partai politik dengan pandangan negatif, sehingga sikap pemilih dalam memilih kandidat tidak lagi melihat partai sebagai penentu utama, akan tetapi lebih melihat figur kandidat dan pendekatannya. Embel-embel partai terkadang dihindari pemilih untuk menentukan pilihan.

Iklan politik merupakan salah strategi kampanye yang efektif apabila dibandingan dengan turun langsung ke wilayah pemilihannya. Iklan dapat menjangkau seluruh wilayah yang menjadi sasaran meraup suara. Kemudian melalui Iklan, kandidat dapat menunjukan identitasnya, program-program, visi-misi, meski identitas dan program-porgram sudah dirancang oleh tim sukses atau konsultan politiknya, dan sudah dibuat sedemikian rupa memperlihatkan sang kandidat sangat luar biasa, meski sudah memiliki kejanggalan atau perilaku buruk dalam rekam jejaknya. Iklan juga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kampanye di lapangan terbuka dan kampanye tertutup yang melakukan mobilisasi massa, bukan lagi menjadi pilihan utama bagi kandidat. Kampanya-kampanya tersebut dianggap mengeluarkan biaya tinggi, kalaupun ada kampanye tersebut, kandidat hanya turut serta dalam kampanye yang dilakukan partai. Kandidat saat ini lebih banyak melakukan kunjungan-kunjungan di perkampungan, pasar-pasar,

rumah sakit, panti asuhan, tempat-tempat yang mengundang perhatian publik, mereka melakukan dialog-dialog dengan masyarakat seperti pada petani, nelayan, pemulung, dsb.

1. Faktor Demografi

Di beberapa tempat, agama tidak menjadi penentu preferensi pemilih, Dalam arti pemilih yang beragama Islam tidak lantas lebih condong untuk memilih kandidat yang beragama Islam, dan demikian juga sebaliknya. Meski pada beberapa wilayah faktor agama tidak menentukan preferensi pemilih. Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondow, latar belakang agama kandidat tampak sangat mempengaruhi preferensi pemilih.

Pengalaman pemilihan legislatif 2014 di beberapa desa di dataran Dumoga, sebagian pemilih tidak mendasarkan pilihannya berdasarkan agama yang dianutnya. Beberapa kandidat dari PDIP memenangi desa-desa yang mayoritasnya etnik Mongondow dan beragama Islam. Hal tersebut dapat berarti bahwa faktor agama memiliki kecenderungan yang berbeda dalam mempengaruhi preferensi pemilih. Seorang informan Agus (42 th), warga desa Ibolian kecamatan Dumoga Timur, menuturkan bahwa ia memilih seorang kandidat PDIP meski kandidat tersebut beragama Kristen dan etnik Minahasa, yang berbeda dengan agama dan sukunya. Kandidat tersebut dirasa sangat tepat, karena latar belakang figur kandidat yang berpendidikan tinggi, dianggap mampu memperjuangkan aspirasi rakyat Dumoga dan kandidat telah melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat.

Lain halnya informan Rahmat (43 th) di Lolak menceritakan bahwa agama menjadi sangat menentukan pilihannya, apalagi kandidat yang berasal dari etnik Mongondow, namun kandidat tersebut harus banyak menunjukan batang hidungnya

di acara-acara tradisi masyarakat. Ia memilih PAN pada pemilu legislatif 2014 karena kandidat telah datang beberapa kali dalam hajatan kampung dan keagamaan mereka dan menjadi sangat dekat.

Faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku memilih di kebanyakan wilayah Bolaang Mongondow adalah identifikasi partai berdasarkan ikatan ideologi dan agama. Faktor ikatan ideologi dan agama ini, khusus di Bolaang Mongondow cukup kuat mengingat secara demografi Bolaang Mongondow memiliki masyarakat yang multikultur terutama dari Etnik Mongondow, Minahasa, Sangihe, Jawa, Bali, dsb. Berbeda dengan semasa Bolaang Mongondow masih memiliki wilayah yang besar termasuk Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, dan Kota Kotamobagu. Pada saat itu mayoritas demografi beragama Islam dan Etnik Mongondow.

Seperti hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (2004-2006), Kabupaten Bolaang Mongondow mayoritas pemilihnya beragama islam, meski dalam jumlah cukup besar terdapat pemilih beragama kristen (Protestan). Pilkada diikuti oleh 4 pasangan calon, masing-masing Syamsudin Mokoginta-Suryono Wijoyo; Marlina Moha Siahaan-Sehan Mokoagow; Roesnaningsih Mamonto-danil J. Moniaga dan pasangan djelantik Mokodompit-Wahid Makalalag. Pilkada dimenangkan oleh pasangan Marlina Moha Siahaan-Sehan Mokoagow dengan suara 46.65%. Keempat calon bupati semuanya berlatar belakang agama islam. Tidak ada satupun yang beragama kristen, kemungkinan karena wilayah ini mayoritas beragama kristen mengakibatkan tidak ada calon kristen yang ”berani” tampil. Pemilih di kabupaten Bolaang Mongondow sendiri menganggap penting kepala daerah yang beragama Kristen. Jika dibandingkan pendapat pemilih islam dan kristen ada perbedaan dalam menilai penting tidaknya kepala daerah yang beragama islam. di kalangan pemilih

islam, latar belakang kepala daerah yang beragama islam dinilai penting, sementara di kalangan pemilih kristen, latar belakang kepala daerah yang beragama Islam dinilai kurang penting karena semua kandidat bupati beragama islam, kita tidak bisa melihat apakah pemilih yang beragama islam cenderung memilih calon yang beragama islam, sebaliknya pemilih beragama kristen cenderung memilih calon yang beragama kristen.

Meskipun demikian, ada fakta awal kecenderungan pemilih untuk memilih calon dengan agama sama. kasus Pilkada kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan pentingnya posisi "wakil bupati" terutama dalam menarik pemilih Kristen. Kandidat bupati yang menggandeng calon wakil bupati beragama kristen mendapat dukungan lebih banyak di wilayah kristen. Misalnya kandidat Syamsuddin Mokoginta. kandidat ini hanya mendapat 4.4% suara saja di kalangan pemilih islam. Tetapi di kalangan pemilih kristen, ia mendapat suara 24.5%. Banyaknya pemilih kristen yang mendukung Syamsuddin Mokoginta kemungkinan tidak bisa dilepaskan dari pasangan wakil bupati yang digandeng, yakni Suryono Wijoyo yang kebetulan adalah beragama kristen.

Fakta ini makin terihat jika dibandingkan hasil survei lingkaran Survei indonesia (LSI) bulan September 2005 dan Februari 2006. di bulan September, ketika pasangan calon belum terbentuk, Syamsudin Mokoginta hanya mendapat 1.4% suara saja di kalangan pemilih kristen. Tetapi ketika ia menggandeng Suryono Wijoyo, dukungan di kalangan pemilih kristen naik menjadi 24.5%. Di luar fakta ini, baik di kalangan Islam maupun kristen, Marlina Moha Siahaan mendapat dukungan kuat yang akhirnya menghantarkannya sebagai bupati Bolaang Mongondow.

Saat pemilu 2014, situasi demografi berubah dengan kabupaten Bolaang Mongondow hanya terbatas pada wilayah bekas swarapraja/ kerajaan Mongondow.

Terlepasnya Kotamobagu, Bolmut, Boltim, Bolsel, kemudian imigran dari Minahasa, Sangihe, Jawa, Bali, dsb yang telah lama masuk di wilayah Mongondow. Hal ini membuat Kabupaten Bolaang Mongondow sangat beragam agama dan etniknya. Akhirnya pemilih yang kembali ditentukan dengan preferensi agama dan etnik makin menguat. Sementara itu pilihan ideologis juga cenderung tinggi. Kemenangan PDIP berbasis fisiologis dan koalisi partai berbasis agama lainnya saat Pilkada telah mengantarkan Salihi Mokodongan dan Yani Tuuk sebagai bupati dan wakil bupati Bolaang Mongondow. Pemilihan legislatif 2014 telah menampilkan dominasi PDIP dan PAN, keduanya dianggap mewakili kaum ideologi nasionalis dan agama. Jadi faktor ideologis dan agama menguat dalam situasi multikultural dibandingkan pada situasi dominasi satu agama atau etnisitas.

Pilihan pemilih kepada partai politik yang berbasis agama atau ideologi turut dipengaruhi tingkat pendidikan dan pendapatan pemilih. Pemilih yang berpendapatan dan berpendidikan rendah cenderung untuk memilih partai politik berdasarkan kedekatan agama atau ideologi partai politik tersebut, mereka ini yang disebut pemilih tradisional. Namun hal ini tidak menentukan kepada pemilih berpendapatan dan berpendidikan tinggi yang menjadi aktivis atau anggota partai tersebut. Pemilih dengan tingkat pendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi cenderung untuk mendukung partai politik yang dianggap memiliki program-program atau visi-misi yang paling baik, dan partai tersebut memiliki tokoh-tokoh atau kandidat politik yang tidak bermasalah dan berkemampuan leih.

Berdasarkan tipologi perwilayahan, Bolaang Mongondow dapat diklasifikasikan berdasarkan etnisitas, wilayah pesisir dominan Mongondow dan Sangihe, Wilayah Tengah untuk Mongondow, Minahasa, Jawa, Bali. Partai-partai berbasiskan agama mendapatkan suara yang cukup besar. Wilayah Tengah seperti

dataran Dumoga, di pesisir suara didominasi oleh partai-partai nasionalis. Terjadi pergeseran di mana pemilih tidak lagi setia terhadap partai, namun lebih condong untuk memperhatikan figur kandidat. Kemudian perilaku pemilu yang pragmatis telah menggejala atau menguat di semua wilayah, perilaku ini lebih dimainkan oleh politik uang dan strategi partai/ kandidat.

Secara umum pemilu 2014 dikuasai oleh partai nasionalis, peranan partai berbasis agama (Islam) cenderung menurun dan pemilih bergeser menjadi rasional. Hanya PKS sebagai partai berbasis Islam lebih baru dan modern yang mampu meningkatkan posisinya. Sedangkan PAN sebagai partai yang tampil fantastis di wilayah Bolaang Mongondow yang tadinya Bolaang Mongondow didominasi Golkar dan warganya banyak berlatar NU. Terlihat dominasi figur politik mampu menyegerakan pemilih dan merubah peta politik. Pada pemilu 2004 dominasi figur Marlina Moha Siahaan, membuat Bolmong dimenangkan Golkar, sedangkan saat pemilu 2014 dimenangkan PAN yang memiliki figur seperti Yasti Mokodongan, dan mesin partai PDIP yang mampu mendominasi pemilih Bolaang Mongndow.

2. Kandidat/ Figur

Seorang kandidat adalah identitas sebuah institusi politik yang ditawarkan ke pemilih. Para pemilh akan menilai dan menimbang kandidat mana yang kiranya akan berpihak dan mewakili suara mereka. (Firmanzah, 2007). Politikus selalu memasarkan dan dipasarkan. Mereka ingin masuk berita utama, mencium bayi, menghadiri pesta, dan menyewa biro iklan untuk membentuk citra. Dewasa ini, pemasar politik memberikan saran pada para kandidat tentang apa yang harus dikenakan, dimana harus berbicara, apa yang boleh (dan tidak boleh) diucapkan, siapa yang harus dikunjungi, dan sebagainya. Tindakan kandidat di muka umum selalu direncanakan terlebih

dahulu, mirip posisi rak dan kemasan produk yang dirancang sebaik mungkin. Kekhawatiran yang sesungguhnya adalah bahwa pemilihan akan dimenangi oleh partai yang memiliki anggaran pemasaran yang lebih besar, dan bukan kandidat yang lebih baik. (Kotler, 2006).

Seperti yang di katakan oleh salah satu informan ketika ditanyakan soal pilihannya terhaap bupati Bolmong terpilih, Wawancara dengan E. Janis yang merupakan salah satu pemuda di Inobonto … "*Alasan saya memilih pasangan Salihi-Yani bukan karena partai, melainkan karena figur calon tersebut. Saya melihat kedekatan pasangan kandidat dengan masyarakat terutama pak Salihi yang telah lama membantu masyarakat nelayan. Pasangan Salihi dan Yani sangat cocok karena pak Yani sendiri dari etnik dan agama yang berbeda dimana masyarakat Bolaang Mongondow sendiri sudah beragam, ada Minahasa, Sangihe, Jawa, Bali. Saya yakin pasangan ini bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan Bolmong*".

Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menjatuhkan pilihannya, sebagian besar masyarakat tersebut menilai bahwa dengan sifat dan karakter yang di miliki oleh kandidat yang menjadi pilihan mereka menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politiknya. Mereka yakin dan percaya karena kedekatan dengan masyarakat dan kepedulian terhadap masyarakat yang dimiliki oleh para kandidat tersebut bisa mensejahterakan masyarakat.

Figur politik dalam hal ini dibedakan menjadi partai politik dan calon legislative atau calon kepala daerah. Figur politik pada masa ini cukup menentukan apakah seseorang akan memilih atau tidak. Sebagian besar memilih figur politik dengan alasan peduli pada rakyat, alasan lain adalah visi-misi dan programnya. Untuk partai politik, informan juga mengharapkan mampu menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk calon legislatif, responden mengharapkan calon yang mereka pilih

mampu bersikap anti korupsi, hal ini berkaitan dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan politisi dari unsur partai politik baik di legislatif maupun eksekutif, dimana politisi yang melakukan korupsi dan tidak peduli rakyat sangtidak disukai.

Gambaran tersebut merupakan wujud kekecewaan masyarakat terhadap perilaku korup para pemimpin yang mereka pilih. Kebanyakan orang menyatakan bahwa para elit politik saat ini hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, dengan kekecewaan tersebut, menurunnya angka partisipasi dalam pemilu menjadi beralasan. Di sisi lain, meskipun sebagian orang menganggap politik uang sebagai permulaan dari perilaku korup para elit, kebanyakan pemilih juga masih menikmati adanya politik uang dalam pemilu, bahkan menganggap pemilu sebagai kesempatan mendapatkan keuntungam materi, terutama dalam masa kampanye.

Pendapat informan mengenai mengharapkan pemimpin yang bijaksana apakah mendukung orang yang terlihat. Mereka dianggap pandai menyelesaikan permasalahan dan akan selalu berlaku adil. Kemudian figur yang pintar dianggap akan cepat memahami masalah dan mencari solusinya,akan tetapi orang pintar belum tentu baik justru sebagian untuk kepentingan sendiri.

Pemiih juga belum tentu memilih calon yang berdekatan tempat tinggalnya. Alasannya belum tentu orang tersebut baik dan mampu menyalurkan aspirasi. Sedangkan di sisi lain mereka yang setuju memilih orang dari tempat kemampuannya. Meskipun pemilih mengenal dan berdekatan tempat tinggalnya, mereka hanya akan memilih jika caleg tersebut memang memiliki kapasitas dan dapat dipercaya, namun jika tidak, mereka akan memilih orang lain. Pemilih tipe ini adalah mereka yang sudah berfikir kritis dan rasional. Meskipun lainnya akan dipengaruhi oleh kesamaan budaya, tradisi, pendidikan kandidat.

Pada Penelitian Perilaku Pemilih Masyarakat di Bolaang Mongondow, dalam Pemilihan Kepala Daerah penulis membagi Perilaku Pemilih Masyarakat Menjadi empat kategori perilaku pemilih atau empat dimensi yaitu Rasional, Kritis, Tradisional dan Skeptis beserta indikator-indikatornya. Dari dimensi Rasional, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebelum memilih mereka melihat visi dan misi kandidat. Salah satu contohnya dapat dilihat pada masyarakat di daerah Dumoga sebagaimana yang diwawancarai peneliti, termasuk dalam masyarakat yang mendekati rasional karena mereka mencari informasi tentang visi-misi partai atau pasangan calon sebelum memberikan hak suara. Pemikiran rasional mereka sampai lebih melihat figur, apakah punya kapasitas keuangan yang baik.

Misalanya dapat Jefry (35 th) warga Imandi Dumoga,*"Kalau figur tersebut banyak duit, maka ia bisa menjauh dai korupsi, kalau tidak peluang korupsinya tinggi. Kemudian harus dibuktikan pada masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan, walaupun orang lain mengatakan itu Money politis, bagi saya itu bagian dari pembuktian figur"*. Pendapat Jefry ini memperlihatkan bahwa dimensi rasional pemilih sampai memikirkan kapasitas figur dengan aksi nyata pemberian uang. Lebih jauh dicermati ia berada di lingkungan warga yang berasal dari etnik Minahasa, dimana ikatan karakter tradisionalnya telah memudah bagi pendapat sebagian besar ilmuwan budaya.

Pada dimensi Tradisional, yaitu kategori masyarakat yang memilih lebih mengutamaka nilai sosial budaya, asal-usul,etnis, agama dan lain-lain. Oleh sebab itu, dari kegiatan-kegiatan politik dapat disimpulkan berdasarkan pengamatan kepada sejumlah informan bahwa dapat dikatakan masyarakat di sebagian warga lertara etnik Mongondw dan Sangihe adalah termasuk dalam perilaku pemilih yang mendekati Tradisional. Sementara dari etnik Minahasa, cenderung lebih rasional,

karena karakteristik masyaeakatnya yang individual, dan dalam sejarah sosialnya tidak pernah mengenal tradisi kerajaan atau feodalistik. Kemudian dimensi Skeptis, yaitu pemilih yang tidak memperdulikan kebijakan yang dibuat atau yang akan dilakukan sebuah parpol, yang lebih dikenal dengan sebutan golongan putih (58olput). Dikarenakan ada beberapa masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

Dari hasil pemaparan dan analisis tentang Perilaku Pemilih Masyarakat di Bolaang Mongondow, dapat penulis simpulkan bahwa masih banyak wilayah yang termasuk dalam kategori Perilaku Pemilih Tradisional, yaitu pemilih yang lebih mengutamakan nilai sosial budaya, asal-usul, etnis, agama, dan lain-lain. Loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan dari pemilih tradisional. Serta pemilih jenis ini juga mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin dari seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar pemilih jenis ini adalah tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat pedesaan di beberapa tempat juga tidak sedikit masyarakat yang memilih pasangan calon menggunakan nilai asal-usul, sosial budaya, etnis,figur, dan lain-lain, memilih dengan melihat figur, nilai asal-usul, sosial budaya, etnis.

Dapat dilihat bahwa sebagian besar informan menjawab bahwa kinerja partai terdahulu baik, Sedangkan sebagian lain dari menjawab kinerja partai terdahulu tidak atau kurang baik dikarenakan menurut mereka masih banyak anggota-anggota partai yang korupsi dan hanya janji-janji palsu kepada masyarakat. Dari mereka yang memilih berdasarkan permasalahan yang ada di daerah pada Pemilukada Gubernur tahun 2010 tersebut, hanya sebagian informan pemilih yang memilih berdasarkan janji-janji pasangan calon pada pemilukada dan banyak pemilih melihat janji-janji tersebut tidak mempengaruhi mereka untuk memilih.

3. Partai

Pada Pilkada masyarakat memilih pasangan kandidat bukan partai, kemenangan dalam Pemilu Legislatif tidak selalu diikuti dengan kemenangan calon yang diusung dalam Pilkada. Pemilihan kepala daerah pada dasarnya pertarungan orang dan bukan partai. Pemilih lebih memilih orang dibandingkan dengan partai. Calon yang diusung oleh partai pemenang Pemilu Legislatif jika kurang "menjual" sulit untuk dipilih oleh pemilih. Kedua, keberhasilan dalam mengusung calon ditentukan oleh apakah mesin politik bisa didayagunakan dengan baik atau tidak oleh partai. Mesin politik ini bukan hanya struktur dan jaringan partai sampai ke akar rumput, tetapi juga loyalitas pemilih. Dukungan partai yang terpecah-pecah, misalnya ada beberapa kandidat dari partai yang ikut maju dalam pertarungan bisa mengurangi loyalitas dan dukungan penuh dari pemilih. Pemilih tidak bisa diharapkan secara penuh mendukung calon yang diusung partai ketika banyak kader dari partai yang ikut bertarung dalam pemilihan.

PDIP merupakan partai yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 dan pemilihan Bupati / Wakil Bupati. Kandidat yang diusung PDIP menang telak. Sebelumnya kabupaten Bolaang Mongondow didominasi oleh Golongan Karya.

Partai politik tidak memberi jaminan seorang kandidat akan lebih banyak dipilih masyarakat pemilih. Seperti yang di katakan oleh salah satu informan *: "Partai dahulu sangat mempengaruhi pemilih, tetapi sekarang tidak lagi, orang kebanyakan lebih melihat figur bahkanpun uang. Meskipun sebagian masih tetap berpegang teguh pada partai politik. Kapasitas kandidat sangatlah penting, orang melihat kapasitas intelektualnya, kepribadiannya, apa yang pernah ia perbuat selama ini"*.

Mereka yang masih kuat dengan pengaruh partai dapat dilihat dalam wawancara seorang informan di desa Uuwan Kec. Dumoga Barat *"di kampung kami beberapa calon yang telah menjadi anggota Dewan Rakyat, tidak banyak mengeluarkan duit, mereka menang di desa ini tanpa biaya yang diberikan kepada warga masyarakat"*. Ia menerangkan lebih lanjut kalau PDIP memenangkan suara mayoritas di desa Uuwan, bahkan salah satu kandidat mereka yakni Welty Komaling saat ini telah menjadi Ketua DPRD Bolaang Mongndow. Anggota dan partisan PDIP sangat kuat bertahan dan bangga dengan partainya.

Dapat dilihat bahwa mesin partai terutama partai lama yang telah memiliki massa loyalis, masih saja sangat berperan dan berpengaruh kuat. Di lain pihak Partai sudah tidak dijadikan orientasi untuk menentukan pilihan, akan tetapi figur dan uang menjadi kedua hal yang dianggap pilihan paling berpengaruh dan rasional.

4. Isu-Isu Program

Pilihan yang menentukan juga adalah isi-isu programyang diusung oleh kandidat. Wawancara dengan Kisman yang merupakan tokoh masyarakat "Alasan saya memilih pada Pemilukada dan Legislatif karena saya menilai kandidat yang saya pilih memiliki kepedulian terhadap rakyat bawah. Bagaimana perubahan warna Kabupaten Bolmong sebelum-sebelumnya seperti apa dan itu lebih dia tumbuh kembangkan dan lebih dia tingkatkan. Itu semua disampaikan dalam penyampaian kata hati politik dari kandidat ini.Misalnya bagaimana ekonomi bisa meningkat, pendidikan, kesehatan yang otomatis ini menyentuh kita semua. Bukan di kandidat lain tidak seperti itu, sama juga. Namun kita harus melihat realisasinya, Karena itu baru kata hati politik yang di sampaikan".

Berbagai program tersebut disosialisasikan kepada pemilih melalui kampanye-kampanye yang dilakukan para pasangan calon sehingga menarik minat pemilih melalui tawaran program-program yang atraktif dan populis.

5. Kampanye

Saat ini kekuatan media merupakan sarana yang paling banyak dipakai kandidat dalam kampanye dibanding dengan kampanye terbuka. Media massa, terutama televisi, menggantikan fungsi organisasi partai politik untuk menjangkau calon pemilih. Munculnya televisi sebagai medium utama penyebaran informasi politik dan sebagai medium persuasi paling massif.

Kemudian kampanye masing-masing pasangan calon lebih banyak dilakukan dengan alat sosialisasi non-media (spanduk, poster, dan lain-lain), pertemuan dengan pemilih, dan melalui media cetak. Padahal hasil temuan Lembaga Survei Indonesia (2008) juga menyebutkan bahwa memori pemilih secara umum dibentuk oleh iklan televisi ketimbang oleh iklan radio dan surat kabar. Secara berurutan, iklan televisi jauh lebih berpengaruh pada memori pemilih; diikuti kemudian oleh alat sosialisasi non-media (spanduk, poster, dan lain-lain); baru kemudian oleh surat kabar dan akhirnya radio.

4. Faktor Agama.

Faktor agama turut berpengaruh kepada pemilih khususnya di Bolaang Mongondow, dimana secara geografis Bolaang Mongondow memiliki penduduk dengan latar belakang agama yang beragam. Makanya tokoh agama pada masing-masingnya sangat berpengaruh baik untuk Islam dan Kristen.

5. Faktor Etnis/Wilayah

Faktor Etnis/wilayah juga memiliki hubungan dengan perilaku pemilih. Adanya rasa kedaerahan mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik atau kontestan tertentu.Seperti yang di katakan oleh salah satu informan : Wawancara dengan Jendri ,*"Dari pengamatan saya, kandidat calon kepala daerah yang di pilih oleh sebagian besar masyarakat bukan pada pilihan partai, akan tetapi isu-isu putra daerah. Karena sebagian besar masyarakat selalu membanding-bandingkan dengan kemajuan wilayah lain asal pejabat sebelumnya."*.

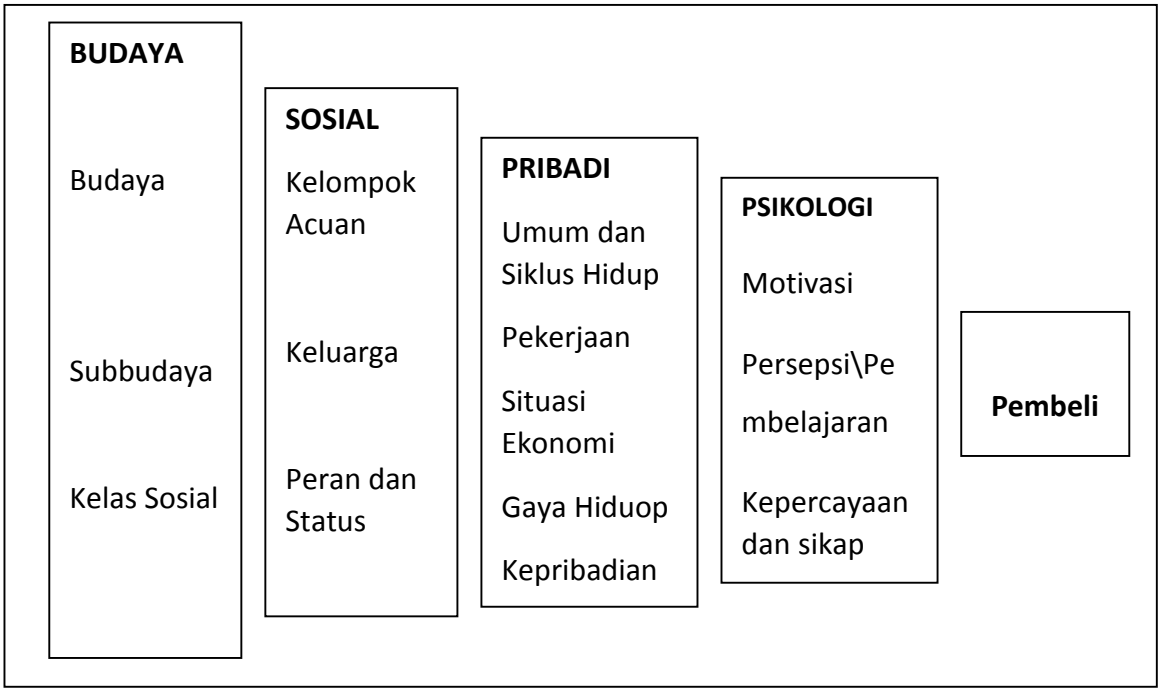
Wawancara dengan Umar yang merupakan salah satu anggota masyarakat…*"Alasan saya memilih pasangan Salihi-Yani karena berbagai suku bangsa, Dimana Bapak Salihi Mokodongan merupakan putra asli Bolmong, jadi hal yang tidak mungkin saya orang Bolmong memilih kandidat yang bukan orang asli Bolmong"*.

5. Politik Uang (Money Politics)

Seorang informan mengatakan Money Politics sangatlah berpengaruh terhadap perilaku politik masyarakat. Bahwa masyarakat sekarang sudah tidak bisa di bodohi, kalau ada uang pasti ada suara. Akan tetapi prakteknya money politics ternyata tidak selalu berhasil, karena belum tentu rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau memilih calon kandidat yang memberi uang atau mereka hanya mau menerima uang tanpa adanya tindakan yang pasti sebagai timbal baliknya. Fakor politik uang ini yang akan Dwibahasa lebih jauh pada bagian berikitnya.

D. Faktor Etnisitas/ Politik Etnik Bolaang Mongondow

Berbicara mengenai pemilih dapat dikaitkan dengan teori-teori pemasaran yakni konsep mengenai konsumen. Philip Kotler (2001) menandaskan, Pengaruh budaya kepada konsumen adalah suatu kekuatan pengaruh terbesar dari faktor-faktor lingkungan perilaku konsumen. Pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh karakteristik budaya, sosial, pribadi, dan psikologis seperti dalam Gambar 1. Faktor budaya memiliki pengaruh yang terluas dan terdalam dalam perilaku konsumen, sehingga pemasar perlu memahami peranan yang dimainkan oleh budaya, sub budaya dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah penyebab dasar keinginan dan perilaku konsumen, budaya meliputi nilai, persepsi, preferensi dan perilaku dasar yang dipelajari seseorang melalui keluarga atau institusi lain. Perilaku manusia sebagian besar merupakan hasil proses belajar. Sewaktu tumbuh dalam suatu masyarakat, seorang anak belajar mengenai nilai persepsi, keinginan, dan perilaku dasar dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Seorang anak dari Amerika Serikat biasanya mempelajari atau terpengaruh oleh nilai-nilai : pencapaian dan kesuksesan, aktivitas dan keterlibatan, efisiensi dan kepraktisan, kemajuan, kenyamanan, materi, individualisme, kebebasan, humanitarianisme, jiwa muda, serta kebugaran dan kesehatan.



Gambar 1 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen

Setiap kelompok atau masyarakat memiliki budayanya dan pengaruh budaya pada perilaku konsumen beragam dari satu negara ke negara lain. Kegagalan menyesuaikan diri dengan perbedaan itu akan menghasilkan pemasaran yang tidak efektif atau kesalahan yang memalukan. Karenanya pemasar internasional harus memahami budaya di tiap-tiap daerah pasar internasional dan mengadaptasikan strategi pemasrannya dengan budaya itu. Pemasar selalu berusaha mengenali pergeseran budaya untuk menemukan produk baru yang diinginkan. Misalnya pergeseran budaya konsumen ke semakin meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kebugaran telah membuka peluang besar bagi industri perlengkapan olahraga, makanan alami rendah lemak. Pergeseran ketidakformalan menghasilkan peningkatan permintaan akan pakaian kasual dan perabiotan rumah tangga lebih sederhana.

Meningkatnya akan waktu luang menyebabkan semakin tinggi permintaan akan produk jasa yang praktis.

Tiap-tiap budaya terdiri dari sub-sub budaya atau kelompok-kelompok orang yang memilki sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan. Sub budaya meliputi kewarganegaraan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis yang serupa. Sub-sub budaya ini menjadi segmen pasar yang penting dan pemasar sering mendesain produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Paul Peter (1996) menilai budaya sebagaimana halnya Kotler bahwa budaya sebagai aspek terluas dari lingkungan makro, kebudayaan memiliki pengaruh yang kuat pada konsumen. Namun semakin banyak penelitian dilakukan, kebudayaan tetap sulit dimengerti para pemasar, untungnya perkembangan teorinya (termasuk dari ilmu Antropologi) cukup membantu menjernihkan konsep budaya dan bagaimana kebudayaan mempengaruhi masyarakatnya. Ia melihat budaya secara luas sebagai makna yang dimiliki bersama oleh (sebagian besar) masyarakat dalam suatu kelompok sosial. Setiap masyarakat menetapkan visinya masing-masing terhadap dunia dan mengisi atau membangun dunia budaya tersebut dengan menciptakan dan menggunakan makna-makna sebagai pengejahwantahan perbedaan budaya yang utama.

Sebagaimana dijabarkan di atas dalam sejarah kebudayaan etnik Mongondow. Bolaang Mongondow pada mulanya sebuah daerah (landschap zaman penduduk Belanda) yang berdiri sendiri memerintah sendriri dan masih daerah. Tertutup sampai abad 19, hubungan dengan luar (asing) hanyalah waktu itu. Dengan masuknya pengaruh asing (belanda) pada sekitar tahun 1901, maka secara administratif daerah ini termasuk Onder Afdeling Bolaang Mongondow yang terdiri dari : Kerajaan

Bolaang Mongondow, Kerajaan Bintauna, Kerajaan Kaidipang, Kerajaan Bolaang Itang, dan Kerajaan Bolaang Uki. Ketika raja Sam Suit Mokodongan diangkat oleh Residen Manado menjadi raja Kaidipang, maka ia menyatukan Kerajaan Kaidipang Bolang Itang menjadi Kerajaan Kaidipang Besar.

Lahirnya Republik Indonesia serikat hasil Konferensi Meja Bundar di Denhaag pada bulan Desember 1949, telah menimbulkan pertentengan antara pengatut unitarisme yang menginginkan bentuk negara kesatuan dan penganut faham federalisme yang menginginkan bentuk negara federal. Situasai ini mencapai puncaknya pada tahun 1950. Gejolah politik terjadi di daerah-daerah termaksud empat kerajaan di Bolaang Mongondow yang tergabung dalam pemerintahan raja-raja. Dewan raja-raja ini diketahui olaeh Heny Jusuf Manoppo raja Bolaang Mongondow dengan ibu kota Kotamobagu. Akhirnya raja dari empat kerajaan itu bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebagai raja. Maka pada bulan Mei 1950 wilayah Bolaang Mongondow dimasukan ke dalam Kabupaten Sulawesi Utara yang berpusat di Gorontalo.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 tanggal 23 maret 1954 maka daerah Bolaang Mongondow menjadi daerah otonomi yang berhak mengatur dan mengrurus rumah tangga sendiri setingkat kabupaten. Tuntutan tentang perlunya kewenangan daerah unutk mengatur daerahnya sendiri telah mulai dipersiapkan terutama dalam pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999, Undang-undang Otonomi Daerah antara lain berisi pemberian otonomi luas bagi daerah kabupaten serta pemberian otonomi terbatas bagi Propinsi. Bunyi dari pada Undang-undang tersebut telah memberi keluasan kepada daerah Kabupaten untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Bolaang Mongondow sebagai satu komunitas adat memiliki potensi sosial budaya yang dalam pelaksanaan dan penentuan arah pembangunan khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah dapat digunakan sebagai kerangka acuan, dengan harapan agar pembangunan tidak mengabaikan budaya lokal atau adat-istiadat yang merupan ciri khas dari masyarakat adat di Bolaang Mongondow. Pengembangan kelembagaan masyarakat adat dapat diwujudkan dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan Bolaang Mogondow secara menyeluruh. Keberadaan Lembaga Adat dalan pemerintahan pada dasarnya hendak menjadi penunjang dalam tugas eksekutif dan legislatif.

1. Peranan Lembaga Adat

Lembaga adat adalah mitra kerja pemerintahan menyangkut pembinaan Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Desa), serta berfungsi memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Hukum adat , adat-istiadat dan kebiasaan yang masih berlaku dan hidup dalam masyarakat harus dipelihar dan dilestarikan. Adat-istiadat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan dipergunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu dibudayakan. Nilai-nilai dan ciri-ciri/budaya dan kepribadian bangsa dimaksud merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Adat-istiadat dan Lembaga adat di akui kemerdekaannya dalam kehidupan masyarakat sejak berabad-abad lampau. Peran tokoh masyarakat adat sangat diperlukan membentuk pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai masalah di desa.

Melalui Lembaga adat, para tokoh informasi itu menyelesaikan berbagai perkara di desa dengan cara lebih mengutamakan perdamaian, sedangkan tokoh formal (pemerintahan) lebih mengarah pada menyelesaian sacara formal, sehingga akhirnya akan menimbulkan dua kubu yang saling bertentangan. Namun demikian peranan tokoh formal masih tetap mendapat tempat ditengah masyarakat selama apa yang dilakukannya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam dunia pendidikan, bidang pemerintahan dan bidang-bidang lain. Peran tokoh masyarakat adat sangat ditentukan oleh kedudukan seseorang. Karena secara realitas, tatanan budaya adat dalam bidang pemerintahan desa berbasis pada kultur setempat yang secara tanpa disadari mengarah pada perubahan sejalan dengan perkembangan teknologi. Hal ini mengakibatkan sering terjadi gejolak dalam masyarakat yang merasa tidak puas dengan peran tokoh masyarakat formal (pemerintah). Masyarakat lebih mengedepankan tokoh informal (toko adat) dalam desa. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, peran tokoh masyarakat lebih mendapatkan tempat di hati rakyat kerana memiliki kekuatan arus bawah secara partisipatif.

2. Asal Mula Kepemimpinan Mongondnow

Kehidupan orang-orang Mongondow pada zaman dahulu kala hidup dengan cara berkelompok. Tempat yang didiami oleh tiap-tiap kelompok disebut wilayah lolaigan. Lolaigan asal kata laig artinya pondok kecil, yang dibuat dari ramuan-ramuan kayu yang tidak kuat dan beratapkan daun enau atau daun rotan.

Di wilayah kediaman lolaigan makin lama makin bertambah banyak anggota keluarga sehingga hidup masyarakat kelompok kecil tadi berubah menjadi kumpulan keluarga kelompok yang sudah lebih besar dan selanjutnya terjadilah wilayah penuaan seperti dusun atau disebut masyarakat pedukuan dengan salah seorang Bogani

(pemuka keluarga diantara kelompok-kelompok) yang diangkat dan di berikan kepercayaan oleh seluruh anggota masyarakat menjadi pimpinan serta dapat melindungi ketertiban keselamatan umum.

Dalam masyarakat pedukuan, anggota keluarga makin hari makin bertambah banyak, sehingga hubungan antara keluarga kelompok makin baik dan erat hubungannya dalam pergaulan masyarakat. Lebih banyak kumpulan gabuangan kelompok masyarakat, makin luas hubungan dan peningkatan cara hidup mereka, kemudian berubah menjadi sebuah kampung (perkampungan). Secara ideal dewasa ini satu rumah di Bolaang-Mongondow didiami oleh satu keluarga batih, yang terdiri dari suami-istri, anak-anak dan kadang-kadang ditambah dengan beberapa kerabat lainnya, ialah seorang ibu atau ayah yang sudah tua, menantu atau cucu-cucu, saudara-saudara istri perempuan dengan suaminya. Seperti masyarakat Minang orang Mongondow mendapat nama dari ayahnya dan dengan demikian tampak adanya golongan-golongan atau kolektif-kolektif dengan nama keluarga yang sama, yang merupakan kelompok kerabatan atau klen patrilineal kecil dan kolektifitas serupa itu oleh penduduk disebut : tongolaki artinya satu dapur.

Tongabuan adalah keluarga besar dimana ibu-bapak, anak-anak yang sudah kawin, kakek-kakek serta keluarga-keluarga lainnya tinggal dalam satu rumah besar. Dalam aktifitas sehari-hari saling terikat oleh satu sistem pengerahan kerja, misalnya mengerjakan tanah pertanian bersama-sama, pembukaan hutan baru untuk berladang dll.

Sekitar abad 20 Bolaang Mongondow terdiri dari beberapa distrik, yaitu : Mongondow (Passi dan Lolayan), serta onder distrik Kotabunan, Bolaang dan Dumoga. Penduduk pedalaman yang memerlukan garam atau hasil hutan, akan meninggalkan desanya masuk hutan mencari damar atau menuju ke pesisir pantai

memasak gara (modapug) dan mencari ikan. Dalam mencari rezeki itu, sering mereka tinggal agak lama di pesisir, maka disamping masak garam, juga mereka membuka kebun. Tanah yang mereka tempati itulah yang disebut Totabuan, yang dapat diartikan sebagai tempat mencari nafkah. Karena sejak pemerintahan raja Tadohe penduduk sudah mengenal padi, jagung, kelapa, yang dibawa oleh bangsa Spanyol, maka penduduk pedalaman yang berkebun di pesisir itu juga menanam kelapa yang lebih banyak hasilnya dibandingkan dengan bila hanya ditanam di dataran tinggi. Bila mereka telah betah tinggal di pesisir, maka keluarga dijemput lalu menetap di Totabuan. Semakin lama semakin banyak kepala keluarga yang membawa anggota keluarganya ke tempat baru di Totabuan, sehingga merekapun mulai membentuk pedukuan. Sebab itu maka di tempat baru biasanya tidak terdapat sigi sebagai perlambang kesatuan desa seperti yang ada di desa-desa pedalaman. Beberapa desa di dataran tinggi (pedalaman Mongondow) yang memiliki Totabuan di pesisir 2) antara lain :

1. Poyowa besar mempunyai Totabuan di Nuangan
2. Kobo kecil mempunyai Totabuan di Nuangan
3. Kobo besar mempunyai Totabuan di Molobog
4. Kopandakan mempunyai Totabuan di Buyat
5. Otam mempunyai Totabuan di Nonapan
6. Moyag mempunyai Totabuan di Motongkad
7. Pobundayan mempunyai Totabuan di Motandoi
8. Molinow mempunyai Totabuan di Tolog dan Kotabunan
9. Passi mempunyai Totabuan di Poigar
10. Biga mempunyai Totabuan di Tombolikat
11. Motoboi Besar mempunyai Totabuan di Alot, Oyuod, Matabulu

12. Tabang mempunyai Totabuan di Tobayagan

13. Poyowa Kecil mempunyai Totabuan di Pinolosian

14. Mongondow mempunyai Totabuan di Ayong, sampaka, Babo.

Kerajaan Bolang Mongondow yang dibahas dalam studi ini merupakan salah satu bentuk pemerintahan monarki yang pernah eksis di kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara SULUT kurang lebih 297 tahun dengan 18 Raja (1653-1950). Keberadaan kerajaan Bolaang Mongondow (BOLAANG MONGONDOW) secara langsung ataupun tidak, turut memengaruhi sistem dan kebijakan pemerintah daerah bahkan Negara Bangsa Indonesia. Sistem politik kerajaan BOLAANG MONGONDOW merupakan gerakan sejarah yang tak bisa dibiarkan begitu saja, sebab sejarah pada umumnya adalah prodak manusia yang luar biasa.

Dengan bersatunya seluruh kelompok masyarakat yang tersebar, baik yang yang berdiam di pesisir pantai, maupun yang berada di pedalaman Mongondow di bawah pemerintahan raja tadohe (Sadohe), maka daerah ini menjadi daerah Bolaang Mongondow yang kemudian dalam proposal ini selanjutnya disingkat BOLAANG MONGONDOW. Sekitar abad 20 BOLAANG MONGONDOW terdiri dari beberapa distrik, yaitu : Mongondow (Passi dan Lolayan), serta onder distrik Kotabunan, Bolaang dan Dumoga.

Kerajaan BOLAANG MONGONDOW mempunyai fungsi sebagai pelaksana pemerintahan pada semua wilayah kerajaan. Pemerintahan kerajaan tersebut berbentuk monarki absut-patrilineal, bahwa yang berhak menjadi raja adalah keturunan raja dan harus laki-laki. Corak Hubungan (patron klien) antara raja dan masyarakat dilakukan berdasarkan peraturan yang dibuat bersama antara perwakilan rakyat dan pemerintah kerajaan yang dikenal dengan perjanjian “PALOKO-

KINALANG”. Dalam perjanjian tersebut dirancang beberapa hal yang menyangkut stratifikasi sosial, penggantian dan pengangkatan raja, fasilitas dan hak-hak raja, perihal kematian, sistem perkawinan dan sangsi terhadap pelanggaran peraturan.

Fungsi sosial kerajaan BOLAANG MONGONDOW yang pada awalnya dimaksudkan untuk menjalankan pemerintahan (1653-1693) raja memerintah secara otonom tanpa dipengaruhi atau diperintah oleh pemerintah penjajah Belanda. Pada tahun 1694-1950 kerajaan BOLAANG MONGONDOW tidak ada pilihan lain kecuali sebagai alat legitimasi imperialisme (dalam bentuk kontrak politik) dengan pemerintah Hindia Belanda yang datang ke wilayah ini, sebagaimana yang kita ketahui Belanda menjajah Bangsa Indonesia kurang lebih 250 tahun 2 setengah abad lamanya. Meskipun demikian, kerajaan BOLAANG MONGONDOW tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakatnya. Dengan masuknya Islam yang kemudian menjadi agama kerajaan pada 1880, maka nilai-nilai spritual Islam kemudian masuk dalam mekanisme pelaksanaan pemerintahan kerajaan BOLAANG MONGONDOW.

Meskipun kerajaan BOLAANG MONGONDOW tidak melakukan konfrontasi politik dan ekonomi secara langsung dengan Belanda, tetapi masyarakat BOLAANG MONGONDOW lewat organisasi masyarakat melakukan perlawanan terhadap Belanda, terbukti dengan adanya upaya pembentukan wadah perjuangan rakyat untuk memepertahankan kemerdekaan pada tanggal 22 Agustus 1945, pembentukan Kelaskaran Banteng RI 14 Oktober 1945 dan perlawanan mereka terhadap KNIL atau NICA pada 19 Desember 1945.

Makanisme pelaksanaan Pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow diatas sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena beberapa alasan. Antara lain adalah belum adanya penelitian ilmiah yang secara serius mengkaji masalah ini, disamping

itu Kerajaan BOLAANG MONGONDOW yang telah masuk Islam pada tahun 1880 namun tidak merubah bentuk Kerajaan menjadi Sistem Kesultanan seperti yang terjadi pada Kerajaan-Kerajaan Ternate dan Jawa. Dalam keterbatasan wawasan, teori dan informasi tentang konsepsi Pemerintahan yang baik, Kerajaan BOLAANG MONGONDOW telah membuat sebuah Konsensus dalam bentuk ; "PERJANJIAN PALOKO-KINALANG yang didalamnya termaktub beberapa aturan normative mengenai hubungan, hak dan kewajiban serta sangsi bagi Pemerintah dan rakyat di dalam kekuasaan Kerajaan BOLAANG MONGONDOW. Kondisi Kerajaan yang masih sederhana tersebut, tenyata telah mampu melahirkan konsturksi budaya lokal yang berpengaruh positif dalam bangunan sosial dan budaya masyarakat BOLAANG MONGONDOW.

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi serta tranformasi budaya, telah membuat erosi budaya di tingkatan masyarakat Indonesia khususnya BOLAANG MONGONDOW. Kondisi ini semakin jelas dengan melemahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang budaya dan etika politik yang bermartabat. Aktivitas sosial-Politik yang cenderung materialistik cum hedonistik telah mengikis budaya gotong royong (mododuluan), toleransi (mooaheran) dan mengasihi (Mototabian) serta kritik (Mototanoban) yang merupakan warisan etika Kerajaan BOLAANG MONGONDOW yang konsep ini tentu saja memiliki relasi konseptual dalam Islam.

3. Politik Etnik Mongondow dalam kaitannya dengan Pemilu

Pola kepemimpinan dan politik etnik orang Mongondow sangat mempengaruhi perilaku pemilih etnik Mongondow. Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya bahwa karakteristik orang Mongondow yang memiliki sejarah panjang

sistem kerajaan maka tradisi feodalistik sangat kental bagi masyarakat Mongondow, sehingga ikatan etnik, patron klien dalam bentuk pembagian kelas masih mewarnai kepemimpinan dan ikatan struktur sosial masyarakatnya.

Dalam lingkup perkampungan masyarakat Mongondow, masih sangat berpengaruh para lembaga adat atau yang disebut Guhanga, yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya seperti dalam pemeliharaan keamanan, hubungan kekerabatan, perkawinan, kematian, dansiklus kehdupan masyarakat lainnya. Sehingga terkadang warga lebih mendengarkan tokoh adatnya daripada pemerintah formal. Faktor ini dimanfaatkan sebagian politisi untuk menjaring suara dari tokoh-tokoh adat, pemuka-pemuka atau tokoh dalam ikatan keluarga besar. Kemudian mereka yang berasal dari kaum "bangsawan" dalam arti memiliki hubungan darah dari keturunan raja Bolaang Mongondow seperti pada marga Manoppo, Mokoagouw, Mokodompit, Paputungan, Sugeha, dll sehingga pengaruh nama-nama keluarga besar tersebut turut berpengaruh besar.

Tokoh Masyarakat Lolak....."*Masyarakat Mongondow masih kuat dalam adat istiadat, ikatan kekeluargaan. Sehingga warga sangat perhatian kepada tokoh-tokoh politik yang dekat cengang mereka atau selalu berbuat dalam lingkup ikatan etnik atau kekerabatan mereka. Di Lolak sendiri memiliki banyak organisasi kekerabatan, yang paling besar.... saya adalah penasehatnya. Masyarakat Mongondow lebih memperhatikan ikatan kekerabatan tersebut, manakala seorang politisi seringai melakukan pendekatan kepada acara-acara kekeluargaan tersebut, maka dialah yang lebih diminati masyarakat. Minimal mereka hadir dalam acara-acara seperti arisan keluarga, pertemuan keagamaan keluarga, kedukaan, pesta, dan sebagainya. Masyarakat Mongondow masih sangat kuat memegang prinsip kekeluargaan. Kami masih mengena adanya sistem Moposad atau Gotong oyong khas Mongondow dimana*

prinsip saling tolong-menolong atau kerja sama masih diberlakukan, behitu juga dengan menghadapi pemilihan umum atau acara-acara politik lainnya”.

4. Etnik Minahasa

Membicarakan etnik Minahasa karena Bolaang Mongondow secara demografi telah sangat majemuk atau beragam etniknya, yang terbesar adalah Mongondow, Minahasa, Sangihe, Jawa, dan Bali. Soal Minahasa, keunikan etnis ini dibanding dengan etnis lain yang ada di wilayah nusantara ini ialah Minahasa lahir dari proses unifikasi antar beberapa sub etnis yang mendiami bumi malesung dan unifikasi ini bukan bersatu dalam pola kerajaan tetapi dalam bentuk Republik atau persekutuan. Latar belakang bersatu kebanyakan dikarenakan seringnya konflik internal dan konflik eksternal. Penyelesaian konflik-konflik tersebut selalu dilakukan melalui musyawarah-musyawarah. Hal ini membuat pola pemerintahan di Minahasa berbentuk Republik, musyawarah-musyawarah adalah pengambilan keputusan tertinggi. Pada era Belanda, mereka mencatat bahwa Minahasa memiliki satu lembaga tertinggi yakni Dewan Wali Pakasaan atau oleh Belanda disebut *Raad der Dorpshoofden*. Dalam lembaga ini duduk para tokoh dari masing-masing pakasaan.

Masing-masing sub etnis di Minahasa selalu saling berperang. Schefold (1998:267) menjelaskan lagi, orang Minahasa dinggap amat suka berperang. Kompetisi individual sangat berarti dalam budaya mereka, sebagaimana terungkap dalam hirarkis dari perayaan-perayaan yang semakin marak dan didasarkan pada perseteruan sebagaimana juga dalam pemburuan kepala manusia (pengayauan). Beberapa ritual mengharuskan adanya korban manusia sehingga perang dengan kampung tetangga sering terjadi, belum lagi masalah batas-batas tanah. Semua dimungkinkan karena pola pemerintahan Minahasa yang tidak mengenal adanya

sistem kerajaan, masing-masing kelompok memiliki pimpinan sendiri atau Tonaas yang terpilih dalam kelompok tersebut.

Musyawarah penyelesaian konflik antar kelompok sub etnis di Minahasa dan penyelesaian batas-batas tanah dilakukan dalam musyawarah tertinggi yang ada di Minahasa yakni suatu musyawarah Watu Pinawetengan sehingga muncullah nama Minahasa untuk menyebut forum musyawarah tersebut. Kemudian musyawarah pelangsung terus setiap ada persoalan yang melanda Minahasa, terutama serangan-serangan dari pihak asing seperti bangsa Mindanau, Bolaang Mongondow, dan bangsa Barat.

Perang pertama yang panjang adalah melawan penguasaan kerajaan Mongondow yang berlangsung. Awalnya Raja Damopolii dari Bolmong menikahi gadis Malesung bernama Uwe Randen, sebagai harta kawin diberikanlah daerah Lewet pada orang tua gadis sekitar tahun 1450. Sejak itu suku Tountemboan langsung menduduki atau *tumani* daerah tersebut. Dikemudian hari daerah ini ingin direbut kembali pada masa kekuasaan raja Loloda Mokoagow pada tahun 1692, karena itu terjadilah peperangan. Serangan pasukan Loloada Mokoagow terjadi beberapa kali. Nanti pada akhirnya mendapat balasan dari pasukan Minahasa atau yang disebut juga pasukan Mahasa dari kesatuan walak Tompaso, Kawangkoan, Rumoong dan Sonder. Ini memaksa pasukan Mongondow harus mengundurkan diri sampai wilayah Mondona (wilayah Bolmong), dalam persitiwa ini Loloda Mokoagow terkena luka dan setahun kemudian meninggal (1693). Peristiwa pengejaran pasukan Mahasa sempat dicegah Residen Jansz Herman Steijenkuiler Kepala VOC di Manado.

Tanah Lewet dan semua wilayah Minahasa Selatan masa sekarang, meski pernah masuk dalam wilayah kerajaan Bolaang Mongondow, telah menjadi bagian kesatuan tanah Minahasa sebagaimana cerita peperangan diatas. Pada jaman raja

Bolmong Jacobus Manoppo, putra Loloda Mokoagow, telah dibuat perjanjian dengan kepala-kepala pakasaan Minahasa tanggal 21 September 1694 dimana batas Minahasa dan Bolmong di tanjung Poigar. Nanti pada tanggal 12 Maret 1907 diadakan penetapan batas wilayah Minahasa dan Bolaang Mongondow, kolonisasi yang berlangsung terus menerus dari batas sungai Poigar, Gunung Muntoi dan Danau Modoinding telah ditetapkan menjadi milik Minahasa. Perincian batas ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia-Belanda tanggal 12 September 1907 nomor 30.

Daerah Minahasa Selatan selain hasil dari pemberian hadiah dan peperangan dengan kerajaan Bolmong, orang Minahasa juga menyadari bahwa wilayah ini adalah tanah tua Tou Malesung. Berdasarkan mitos Toar Lumimuut, daerah Minahasa Selatan yang dahulunya merupakan kawasan Wulur Maatus adalah pemukiman awal mereka, sehingga perjuangan yang gigih Tou Malesung berusaha mendapatkan kembali tanah tuanya setelah sempat eksodus dari kawasan tersebut.

Ada cerita lain yang lepas dari permusuhan Minahasa dan Mongondow, bahwa kalangan kerajaan Mongondow beberapa kali menjalin hubungan perkawinan dengan orang Minahasa dan cerita lainnya bahwa pada saat Tou Malesung eksodus dari Tu'ur in Tana di kawasan Wulur Maatus, sebagaian besar menuju timur-utara dan lainnya menuju selatan, mereka yang menuju selatan membuat suku Mongondow sekarang ini. Ternyata etnis Minahasa dan Bolaang Mongondow dapat dikatakan sebagai dua bangsa yang bersaudara, namun dalam kelanjutan selalu bertikai terutama masalah-masalah penguasaan tanah atau wilayah.

Kemudian pada bagian lain lagi, perang antara Minahasa dan Bolaang Mongondow bukan hanya memperluas wilayah Minahasa dari sungai Ranoiapo melebar ke sungai Poigar. Peristiwa tersebut memunculkan istilah Minahasa atau persekutuan. S.Coolsma dalam laporannya mengenai kegiatan Zending di Hindia

Belanda bagian timur menyatakan “Kepala-kepala dari beberapa suku bersatu dan mengusir orang-orang Bolaang keluar dari tanah itu. Sejak waktu itu muncul ama Mahasa atau Minahasa (persekutuan).”

Perang besar melawan bangsa Eropa yang dikenang dalam sejarah yakni pertama, perang melawan Portugis dan Spanyol yang melibatkan Pakasaan Tombulu kemudian dibantu rakyat Minahasa lainnya dari Pakasaan Tonsea, Tondano dan Tountemboan. Penyebab perang ini adalah perlakuan tentara Spanyol yang sewenang-wenang kepada orang pribumi hingga beberapa perang terjadi, tahun 1643 terjadi perang di desa Kali menyebabkan 40 orang Spanyol dan para pengikutnya dari Pilipina telah terbunuh. Pada suatu waktu mereka bermasalah dengan pimpinan pakasaan Tombulu terjadilah perang besar. Sebagaimana ditulis saksi perang tersebut, Pater Juan Yranzo yang lolos dalam peristiwan itu, ia menulis perang ini sampai pada puncaknya tanggal 10 Agustus 1644 dimana 10.000 serdadu Minahasa serentak menyerang para serdadu Spanyol. Penyerangan dilakukan pada garnisun pos serdadu Spanyol di seluruh Minahasa seperti Pos Tanawangko, Tomohon, Kawangkoan, Amurang, Bentenan, Tondano, Kema, Airmadidi, Likupang dan Wenang-Manado. Korban banyak berjatuhan dipihak Spanyol, yang pada akhirnya membuat mereka menarik diri dari tanah Minahasa, pindah ke Pulau Siau dan di Pilipina.

Perang besar kedua yakni perang Tondano, perang melawan Belanda berlangsung tahun 1808-1809. Perang Tondano diakibatkan pengingkaran perjanjian persabatan antar Minahasa dengan Belanda, dimana Belanda sudah mulai menjadikan Minahasa sebagai tanah jajahan yang harus tunduk mutlak pada pemerintah colonial Belanda. Reaksi keras diprakasai Pakasaan Tondano, kemudian diikuti pakasaan lainnya di seluruh tanah Minahasa melalui beberapa kali musyawarah Minahasa. Pada akhirnya perang dikobarkan, selama setahun pasukan Minahasa belum dapat

dikalahkan malahan Residen C.C. Prediger terkena tembakan pasukan Minahasa yang dipimpin para tokohnya seperti Lontoh Kamasi, Tewu, Matulandi, Lumingkewas dan Mamahit. Serangan terakhir dari berbagai arah kepada pertahanan terakhir Minahasa di Minawanua dilakukan pada tanggal 5 Agustus 1809. Belanda membumihanguskan benteng moraya, inilah perang modern pertama di Indonesia dimana pihak Belanda mendapat perlawanan dari penduduk Minahasa dengan senjata api meriam dan senapan.

Serangan-serangan ini menimbulkan kerjasama antar kelompok melalui musyawarah watu pinawetengan dan beberrapa musyawarah lainnya lagi untuk menghalau kepentingan asing pada bumi malesung. Ini lagi yang menciptakan proses unifikasi Minahasa menjadi sebuah etnis bangsa. Pada lain pihak Belanda memanfaatkan penduduk pribumi untuk dijadikan tentara mereka dalam pasukan Marsose dan KNIL. Tercatat serdadu Belanda asal Minahasa adalah paling banyak dalam jumlahnya. Mereka terlibat dalam perang Aceh, Perang Padri di Sumatera Barat, Perang Diponegoro di Jawa, dan sebagainya.

Namun demikian perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia, orang Minahasa tidak ketinggalan mengambil bagian, seperti adanya lascar KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) dan Brigade XVII. Lascar-laskar ini sebagian besar adalah warga Minahasa di Pulau Jawa sebagai pasukan terbesar dalam tubuh lascar Indonesia yang berasal dari luar Pulau Jawa dalam rangka membela kemerdekaan Indonesia. Di tanah Minahasa sendiri sangat dikenal peristiwa perebutan Merah Putih tanggal 14 Februari 1946, peristiwa ini menyebabkan kepemimpinan Belanda diambil alih dalam beberapa waktu oleh Tou Minahasa.

Tokoh-tokoh penting dalam perlawanan fisik melawan penjajah dari Tou Malesung seperti Daan Mogot (Direktur Akademi Militer Pertama), Rober Wolter

Mongisidi (pemimpin perlawanan di Makasar), AE Kawilarang (pemimpin TNI/TRI, AG. Lembong, E Langkay, Joop Warouw, Ventje Sumual, HV Worang, dll.

Selain perlawanan fisik yang dilakukan Tou Minahasa, perlawanan melalui pergerakan politik dilakukan tokoh-tokoh dari daerah Minahasa ini. Para pahlawan bangsa dalam pergerakan nasional Indonesia dan tokoh pejuang politik nasional tercatat nama-nama seperti Sam Ratulangi (anggota BPUPKI, Gubernur Sulawesi, Penggerak Nasionalisme Indonesia Timur), AA Maramis (Anggota PPKI, Menteri Keuangan Pertama), Arnold Mononutu (Pendiri Perhimpunan Indonesia, Menteri Penerangan Pertama).

Mengenai politik etnik Minahasa dalam kaitannya dengan pemilihan umum di Bolaang Mongondow, mereka banyak tersebar di wilayah dataran Dumoga, Poigar. Saat ini wakil bupati Yani Tuuk dan Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling berlatar etnik Minahasa. Dimana jumlah pemilihnya cukup besar. Pemilihnya sebagian besar berkarakter individual dan memilih dengan dimensi rasional, dikarenakan latar budayanya yang tidak pernah mengenal tradisi kerajaan dan feodalistik dimana faktor strata sosial berdasarkan tradisi feodalistik tidak berpengaruh, sehingga pilihan perilaku yang berwatak seperti ini dan tergantung pada faktor individu yang ia pilih, dengan mencermati faktor lain di luar unsur-unsur feodalistik dan etnisitas. Karena itu figur yang memiliki kapasitas lebih, sangat menentukan, kemudian figur yang membuat pendekatan langsung apakah dengan strategi kampanyanya atau dengan materi yang diberikan.

3. Etnik Sangihe

Etnik Sangihe termasuk Talaud, cukup besar jumlahnya di kabupaten Bolaang Mongondow, mereka mendiami kawasan pesisir utara di wilayah Poigar, Inobonto,

Lolak. Keran itu pemilih mereka sangat berperan, beberapa anggota legislatif berasal dari etnik ini. Dan para kandidat beramai-ramai mendekati etnik ini untuk menggalang suara.

Suku Sangir (Sangihe) Talaud, adalah komunitas suku yang mendiami pulau-pulau kecil antara Sulawesi dan Filipina. Menurut penuturan tokoh masyarakat Sangihe Talaud, dulunya mereka berasal dari beberapa kelompok suku pendatang yang pada akhirnya berbaur menjadi suatu suku bernama Suku Sangihe Talaud. Suku-suku pendatang tersebut adalah: Apapuang (yang paling awal), konon ceritanya berasal dari Bangsa Negrito; Dari Saranggani, Mindanao Selatan; Dari daratan Merano, Mindanao Tengah; Dari Kepulauan Sulu (sebagian kecil adalah raksasa), Dari Kedatuan Bowentehu + Manado Tua, dimana ras ini berasal dari Molibagu (Bolangitam).

Suku Sangir Talaud diperkirakan telah ada ribuan tahun Sebelum Masehi, hidup dan bertahan di pulau-pulau antara Sulawesi dan Filipina. Kajian antropologi kebudayaan pada masa sebelumnya menjelaskan orang Sangihe Talaud merupakan rumpun manusia berbahasa *Melanesia* yang berasal dari migrasi Asia pada 40.000 tahun SM. Kemudian disusul pada masa yang lebih muda sekitar 3.000 tahun SM dari Formosa yang berbahasa Austronesia. Penemuan terbaru yang lebih mengejutkan yang berhasil mematahkan terori linguistic di atas, adalah adanya kemungkinan nenek moyang suluruh klan di Indonesia berasal dari Nias-Mentawai, dengan ciri gen dari masa yang lebih tua sebelum migrasi Formosa.

Sejumlah legenda pun ikut memperkaya kesimpangsiuran jejak asal muasal manusia Sangihe Talaud. Dari kepercayaan turun-temurun, Pulau-pulau Sangihe Talaud konon tercipta dari air mata seorang bidadari. Dari bidadari inilah manusia Sangihe dilahirkan. Ini sebabnya nama Sangihe itu berasal dari kata *Sang*i (tagis). Di

pulau-pulaud Talaud, penyebutan Porodisa untuk kawasan itu justru dikaitkan dengan anggapan dimana manusia Talaud adalah keturunan Wando Ruata, yaitu seorang manusia gaib yang berasal dari Surga. Padahal kata Porodisa menurut teori linguistic justru merupakan mutasi neurologist bahasa lisan dari bahasa Spanyol: Paradiso (surga). Kata Sangi di Sangihe sendiri merupakan mutasi dari kata Melayu:tangis.

Manusia Sangihe Talaud sejak masa purba, juga mengakui adanya zat suci pencipta alam semesta dan manusia yang di sebut “Doeata, Ruata”, juga dinamakan ”Ghenggona”. Di bawahnya, bertahta banyak roh Ompung (Roh penguasa laut), dan Empung (roh penguasa daratan). Dewa-dewi ini berhadirat di gunung dan lembah-lembah, di laut, di sehamparan karang. Di cerocok dan tanjung. Di pohon, dan dalam angin. Di cahya, bahkan bisikan bayu. Di segala tempat, ruang, dan suasana. Kendati begitu, eksplorasi yang lebih ilmiah terhadap asal usul manusia Sangihe Talaud, yang telah ada saat ini baru sebatas dari masa abad ke 14. Bermula pada periode Migrasi Kerajaan Bowontehu 1399-1500. Disusul periode Kerajaan Manado 1500-1678. Dan terakhir periode kerajaan-kerajaan Sangihe Talaud dari 1425-1951.

Gumansalangi (Upung Dellu) sebagai Kulano tertua kerajaan Tabukan atau Tampunglawo, yang bermukim di gunung Sahendarumang bersama Ondoasa (Sangiang Killa), istrinya, adalah anak dari Humansandulage bersama istrinya Tendensehiwu, yang mendarat di Bowontehu pada awal mula migrasi Bowontehu, Desember 1399. Mereka melakukan pelayaran dari Molibagu melalui Pulau Ruang, Tagulandang, Biaro, Siau terus ke Mangindano (Mindanau-Filipina), kemudian balik ke pulau Sangir – Kauhis dan mendaki gunung Sahendarumang, dimana mereka dan para pengikut mendirikan kerajaan Tampunglawo sebagai kerajaan tertua di Tabukan, yang pada periode kemudian melebar hingga ke seluruh kawasan kepulauan Sangihe dan Talaud.

Sementara Bulango bermigrasi dari Bowontehu pada 1570 menuju Tagulandang dimana anaknya bernama ratu Lohoraung mendirikan kerajaan Tagulandang di pulau itu bersama para pengikutnya.

Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro (satas) Nusa Utara adalah sebutan untuk pulau-pulau di antara sulawesi dan Mindano disebut Sangihe (Suku Sangir dan Talaud). Sangir, Sangil, Sangiresse (Sangihe) adalah nama etnis yang hidup di Indonesia dan Phlipina Selatan. Etnis ini sudah sejak purbakala dikenal oleh bangsa-bangsa luar karena memeliki kehebatan dalam mengarungi lautan. Etimologi Sangir atau Sangihe terdiri dari dua suku kata yaitu berasal dari kata Sangi, Muhunsangi, Sangitang, Masangi yang berarti menangis, tangisan juga Sang dan ir ; Sang merujuk pada Sangiang artinya Putri Khayangan(Bidadari) sedangkan Ir berati air dalam hal ini lautan atau ihe berarti emas, Sejalan dengan tulisan kuno di daun lontar yang dimiliki oleh suku Bugis-Makasar dinyatakan bahwa Utara penuh dengan Emas Permata. Kata Sangir merujuk pada beberapa tempat suku bangsa yaitu di Jawa, Sunda, dan sumatera bahkan di Madagaskar, India, Amerika Latin. Suku bangsa ini memiliki banyak kerajaan seperti terungkap dalam buku Kakawin Negara Kertagama eleh Empu Prapanca pada tahun 1365 disebut Udamakataraya dan pulau-pulaunya dalam terjemahan Moh. Yamin 1969. Oleh orang China (Thionghoa) disebut dengan Shao San. Oleh oleh Portugal dan Spangol di sebut Sang Gil, Jepang menyebutnya San. Suku bangsa atau etnis ini memeliki bahasa yakni Bahasa Sangir/Sangihe. Etnis ini dikenal sebagai suku bangsa pelaut yang terkenal sejak jaman purba-kala karena keberaniannya mengarungi lautan.

Lewat catatan jurutulis Magellan tahun 1421, Antonio Pigaffeta. Di Sangihe, Pigafetta mencatat ada empat raja. Dua di Siau dan satu di Tagulandang. Tapi sumber sejarah tiga abad sesudahnya, hasil tulisan F. Valentijn yang datang ke Sangihe awal

abad ke-18, menyebut awalnya hanya dua saja kerajaan di Sangihe, yaitu Tabukan dan Kendahe. Menurutnya, nanti kira-kira tahun 1670 muncul sembilan kerajaan di Sangihe, yaitu: Kerajaan Kolongan, Kerajaan Taruna, Kerajaan Kolongan, Kerajaan Manganitu, Kerajaan Kauhis, Kerajaan Limau, Kerajaan Tabukan, Kerajaan Sawang (Saban) dan Kerajaan Tamako. Namun, kemudian kerajaan yang terakhir (Tamako) menjadi bagian Siau. Sementara, Raja Limau ditumpas pasukan kiriman Padtbrugge. Kerajaan ini hancur lebur. Dan, Sawang bergabung dengan Kerajaan Taruna dan Kerajaan Kolongan. Sedangkan Kauhis bergabung dengan Manganitu.

Kerajaan Sahangsowang

Sebelum kerajaan ini berdiri sudah ada kerajaan Apapuang, kemudian diganti dengan Kerajaan Sahangsowang. Kerajaan Sahangsowang adalah kerajaan dari manusia raksasa yang musnah karena letusan Gunung api Awu.

Kerajaan Tampung Lawo berdiri pada abad ke 13 dengan raja pertama bernama Gumansalangi dengan permaisuri Konda Wulaeng/Sangiang konda (putri khayangan). Pangeran Gumansalang berasal dari suku Sangil/Sanghi, Sangir kerajaan di Kotabato Mindanauw selatan sekarang Fhilipina. Gumansalangi anak dari Tumudai/Tuwondai melalui permaisuri Bintang Keramat dari kedatuan Ternate. Wilyah kerajaannya meliputi Sangihe, Maluku Utara hingga Mindanauw.Keturunan Gumansalangi menurunkan Datu-datu di Mindanao. Ampuang menikah dengan Ruatangkan, mereka dikaruniai anak bernama Datu Tahidumole. Datu Tahidumole menikah dengan Hiabunti, mereka melahirkan Datu Matumama. Datu Matumama menikahi Lalakangbulang lalu melahirkan Ondolilare. Ondolilare menikah dengan Waulana, mereka melahirkan Lapatua. Lapatua menikah dengan Binilangkati, lalu melahirkan Ampuang II. Kemudian Ampuang II menikah dengan Belisehiwu lalu memperanakan anak-anak sebagai berikut : Balatanggara, Ratu Mangantanusa, Tubu-

tubu, Mangingbulang, Manamehe, Tandingbulaeng, Tikase, Bawu Raupang dan Lamanaowa.

Kerajaan Malinggaheng, Kerajaan ini berdiri merupakan pemekaran dari kerajaan Tapung Lawo. raja Malinggaheng pertama bernama Balanaung (anak Raja Mindanauw) dengan permaisuri (Boki Siti Bai)cucu raja Gumansalangi. Wilayah kerajaan Kendahe, P. Lipang, P. Kawaluso, P. Kawio, P. Komboleng, P. Sulu, P. Kaluwulang, P. Saranggani, P. Matutuang (Balut).Kemudian kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Kendahe (Candahar).

Tercatat pula ada kerajaan yang ‘wilayahnya’ sampai ke bagian-bagian negara Filipina kini. Kendahe misalnya disebut-sebut dalam beberapa situs di Mindanao sebgai candahar mempunyai wilayah ke Mindanao. Raja Buisang/Wuisang menjadi raja menggantikan Balanaung,dikisahkan raja Buisang pergi ke Mindanow untuk berunding dengan Raja Babulla dari Kerajaan Ternate untuk membuat pertanan bersama namun setelah kembali ke Makiwulaeng (Kendahe) istrinya telah diambil oleh orang lain dan kerajaan diganti oleh anaknya bernama Samensi Alang, lalu raja Wuisang pergi mengembara ke Minahasa.

Adapun wilayah Kerajaan Kendahe setelah pisah dari Tubis meliputi Bahu, Talawid, Kendahe, Kolongan, Batuwukala dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Kawio, Lipang, Miangas sampai sebagian Mindanau Selatan. Bagian yang di Mindanao merujuk pada data Valentijn adalah Coelamang, Daboe (Davao), Ijong, Maleyo, Catil dan Leheyne,

Meski demikian, penting digarisbawahi pada waktu lalu konsep kekuasaan tidaklah total dipahami sebagai kekuasaan kewilayahan dalam pemahaman kini.Kala itu, kekuasaan dominan terkait dengan kemampuan membentuk kekuatan bersenjata yang mobile demi merebut kendali atas perdagangan tenaga kerja budak dan monopoli

atas produk-produk dagang lain27. Sedang, kekuasaan menurut Evelyn Tan Cullamar dalam tulisannya ‘’Migration Across Sulawesi Sea” dibangun atas relasi orang atau tokoh lain. Aliansi politik dibangun dominan dengan kawin-mawin di antara para elit pemimpin.

Kerajaan Kerajaan Bowontehu berdiri pada akhir abad 9 dengan pusat kerajaan di Molibagu dengan raja bernama Humansandulage dengan boki Tendensehiwu putri khayangan, kemudian Budulangi dengan boki Rantingan (putri Ting)kemudian Mokodoludud pindah ke Bentenang, ke Pesolo (Lembe) ke Pulisang ke Lokon lalu ke Manarauw (Manado Tua). Raja Budulang dengan permaisuri Putri Ting memperanakan Toumatiti, Toumatiti memepranakan Mokodoludut.Mokodoludud membangun kembali kerajaan Bowontehu dengan pusat pulau Manarouw dengan gelar Kulano. Di Manarouw ini Mokodoludud dan Baunia dikaruniai lagi anak yang bernama, Jayubangkai, Uringsangiang dan Sinangiang. Penduduk kerajaan ini berkembang bertambah banyak sehingga sebagian mendiami daerah bagian utara dataran pulau Sulawesi yaitu Gahenang/Mahenang nama kuno untuk Wenang berasal dari bahasa Sangir Tua yaitu artinya api yang menyala/bercahaya/bersinar(suluh, obor, api unggun). Perpindahan dilakukan dengan menggunakan perahu (Bininta), melalui tempat yang bernama Tumumpa berasal dari bahasa Sangir yang artinya turun sambil melompat,kemudian menetap di Singkil berasal dari bahasa sangir Singkile artinya pindah/menyingkir. Mereka menyebar sampai ke Pondol bahasa Sangir disebut Pondole artinya di ujung. Wilayah kerajaan Manarouw sesuai memori Padtbrugge disebut menurut nama asalnya meliputi : P. Manado Tua, P. Siladeng, P. Bunaken, P. Mantehage, P. Nain, P. Talise, P. Gangga, P. Bangka dan P. Lembeh serta daerah pesisir pulau Sulawesi.

Lokon Banua II (leken artinya nama yang diangkat kembali) adalah keturunan kesembilan dari Raja Mokodoludud Kulano(raja) Bowontehu. Berlayar dari Manarouw bersama dengan pengikutnya pergi ke pulau Siauw lalu mendirikan kerajaan Leken Banua II atau Karangetang pada tahun 1510.

Tahun 1570 Bulango dari kerajaan Bowontehu (pulau Manarouw) berlayar menuju Tagulandang. Bulango mempunyai seorang anak perempuan bernama Lohoraung mendirikan kerajaan Taghulandang atau Mandorokang di pulau itu bersama para pengikutnya. Bulango adalah saudara dari Lokongbanua II dimana keduanya adalah keturunan ke sembilan dari raja Mokodoludut dengan istrinya Baunia dari kerajaan Bowontehu.

Raja Tadohe anak dari raja Mokodompit raja Bolaang Mongondow dari ibu berasal dari kerajaan Siau yaitu cucu dari raja Lokonbanua II dan Mangima Dampel yang berasal dari keturunan Gumansalangi dari Kotabatu Mindanow Kulano (raja) pertama kerajaan Tampung Lawo dari permaisuri Sangiang Konda Wulaeng (putri khayangan) yang bergelar Madellu dan Mekilla. Raja Tadohe menikah dengan Rasingan adalah keturunan ke sembilan dari Gumansalangi. Boki Rasingang cucu dari Raja Batahi dari permaisuri Maimunah dari kerajaan Rimpulaeng (Tabukan)bernama Raja Don Franciskus Macaampo Juda I, serta anak dari Hendrik Daramenusa Jacobus. Alkisah ketika raja Mokodompit gugur dalam peperangan, Tadohe masih kecil dan dibawa oleh ibunya ke Siau. Kerajaan Bowontehu serta Kerajaan-kerajaan di Bolaang Mongondow diduduki oleh pasukan kerajaan Goa-Tallo.

Loloda Daloda Mokoagow adalah cucu dari Raja Tadohe merupakan keturunan ke sebelas dari Raja Gumansalangi Madellu dengan Sangiang Konda Wulaeng dari kerajaan Tampung Lawo. Laloda Daloda Mokoagow adalah raja pertama yang menjadi raja kerajaan Manarow yang berpusat di daratan pulau Sulawesi

bagian Utara sekarang disebut Manado,sebelumnya bernama kerajaan Bowontehu/Wawontehu yang berpusat di pulau Manarouw (Manado Tua). Kemudian Bowontehu/Wowontehu berubah menjadi Kerajaan Manarouw dengan raja bernama Laloda Daloda Mokoagow.

Politik etnik Sangihe dalam kaitannya dengan perilaku pemilih di Bolaang Mongondow, bahwasanya karakter feodalistik yang dibawa dari pola kerajaan dalam sejarah sosial mereka, sehingga memiliki kemiripan dengan karakter etnik Mongondow. Atasnya pemilih sangat ditentukan oleh faktor-faktor unsur-unsur tradisi dan etnisitas. Faktor kekeluargaan akan sangat berpengaruh ketika memilih seorang kandidat, dalam pemukiman etnik Sangihe, tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat yang dituakan dan dinilai masih murni, akan sangat disegani oleh semua unsur masyarakat. Karena ini, mereka akan sangat loyal kepada tokoh atau kepada partai. Jelas model ini bersifat pemilih tradisional. Khusus partai, pengaruh PDIP terhadap mereka cukup kuat, sehingga menjelaskan akan kemenangan PDIP pada masyarakat Bolmong berlatar etnik Sangihe.

4. Faktor Agama

Perilaku politik ditentukan pula oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat. Faktor pembentuk identitas bersama itu menurut Ramlan Surbakti mencakup identitas primordial, sakral, personal, dan civilitas. Faktor primordial antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan, dan adat istiadat. Dengan demikian ketika seseorang mengeskpresikan perilaku politiknya, kemungkinan yang bersangkutan menyandarkannya kepada faktor kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah, dan adat istiadat.

Faktor sakral pada umumnya didasarkan karena keagamaan yang sama. Dengan demikian, adanya pluralitas agama dan corak pemikiran keagamaan dalam suatu agama dengan sendirinya dapat pula membentuk perilaku politik seseorang. Faktor personal biasanya disandarkan kepada seseorang. Ketokohan seseorang menjadi identifikasi suatu kelompok masyarakat. Dalam mengekspresikan perilaku politiknya, suatu masyarakat melihat perilaku politik yang diperlihatkan oleh sosok yang menjadi panutannya

Agama dan Politik secara historis penciptaan suatu identitas bersama sebagian didasarkan pada identitas agama. Sampai abad kesembilan belas, orang belum membuat pembedaan yang tegas antara yang spiritual dan sekuler, antara yang suci dan yang fana (profane). Pada umumnya, nilai-nilai sakral memberikan rasa solidaritas sosial yang kuat. Dengan adanya komunitas-komunitas etnis yang relatif homogen dan munculnya negara-bangsa yang sekuler, dasar-dasar yang bercorak sakral belum juga hilang.

Bahwa elit Muhammadiyah di Bolaang Mongondow yang menduduki posisi formal dalam organisasi pada umumnya menunjukkan pola perilaku yang moderat dengan kecenderungan akomodasionis. Di luar pola akomodatif dijumpai pula sebagian kecil kecenderungan perilaku politik yang pragmatis dan idealis dengan tetap berada dalam semangat moderat. Tidak nampak di kalangan elit Muhammadiyah ini kecenderungan perilaku politik yang radikal dengan pola konfrontasi dan revolusioner.

Machmud (2015), mengemukakan bahwa Partisipasi Islam Tradisional (NU) di Bolaang Mongondow belum menunjukkan hasil yang efektif, hal ini ditandai dengan lemahnya dukungan warga NU itu sendiri dalam memberikan dukungan kepada mesin politik NU yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, dimana hanya memperoleh

dua kursi dari tigapuluh kursi yang diperebutkan di lembaga legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow. Secara kelembagaan NU bergerak sebagai kekuatan kemasyarakatan islami, sehingga domain politik NU lebih dititik beratkan pada Partai Kebangkitan Bangsa. Partisipasi Islam Tradisional (NU) dalam mengawal kebijakan reformasi birokrasi di Bolaang Mongondow terbatas pada mempersiapkan para kader NU agar nantinya disaat duduk dalam lembaga eksekutif, dapat mempertahankan Aqidah, nilai-nilai luhur islami, sehingga kualitas kader NU akan berbeda dengan kader lainnya. Kekuatan Islam Tradisional (NU) di Kabupaten Bolaang Mongondow belum mendapat perhatian lebih oleh penguasa daerah, sehingga belum dapat memberikan pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih kebijakan reformasi birokrasi yang dilakukan di kabupaten Bolaang Mongondow. Top Eksekutif Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak menempatkan Islam Tradisonal (NU) sebagai kekuatan kemasyarakatan yang besar di Bolaang Mongondow, sehingga saran pemikiran, gagasan, yang disampaikan oleh pengurus cabang NU Bolaang Mongondow bekum mendapat prioritas utama bagi penguasa.

Aktivitas gerakan Islam tradisional dapat dijumpai di berbagai daerah, termasuk di Bolaang Mongondow, ada kelompok muslim tradisional menentang kaum modernis dan nasionalis dalambidang politik. Agar lebih memperkokoh sosialisasi tradisionalis yang ada padagerakannya maka kelompok tradisional ini mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mengajarkan pengetahuan agama. Karakteristik yang telah dijelaskan di atas adalah aspek-aspek yang menjadiciri dari gerakan Islam tradisional di dunia Islam secara umum. Pada gerakan Islamtradisional di daerah-daerah juga muncul beberapa karakteristik seperti aktivitas gerakanyang terfokus pada perbaikan individu, aspek kebatinan yang berhubungan dengan sufisme, dan kesinambungan pola pendidikan tradisional pada masa kontemporer.

Partisipasi NU lebih condong untuk mempersiapkan kader-kader NU dari segi akhlak, mental, dan spiritualnya ketika masuk dan dipercayakan sebagai pejabat pemerintahan, NU tidak dapat dengan seenaknya memberikan kritik kepada pemerintah daerash dalam melakukan kebijakan reformasi birokrasi. Dalam ranah tersebut, NU memiliki kekuatan politik dalam organisasi tersendiri yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, namun ironisnya mesin politik NU ini terbilang sedikit mendapat dukungan dari warga NU itu sendiri, dimana hasil Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan tahun 2014 silam, Partai Kebangkitan Bangsa harus puas meraih dua kursi di legislatif dari tigapuluh kursi yang tersedia, hal ini mengindikasikan bahwa warga NU tidak sepenuhnya sadar secara ideologis dan fundamentalis untuk mendukung dan memberikan kesempatan kepada NU agar lebih berkiprah lagi dikancah politik dan pemerintahan, sehingga kepentingan-kepentingan agenda reformasi yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten bolaang mongondow, dapat diawasi dan dikawal oleh NU itu sendiri, dengan perkataan lain, Pengusrus Cabang NU Bolaang Mongondow harus lebih lagi mempersiapkan kader yang militan.

Rendahnya partisipasi warga NU dalam menentukan pilihan bagi mesin politik NU yaitu PKB. Keberadaan warga NU di Bolaaang Mongondow diakui sejumlah informan bahwa sebagian besar Bolaang Mongondow nerlatar warga NU. Namun perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai yang berciri Muhamadiyah memiliki 5 kursi di DPRD Bolmong, dibandingkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berasal dari NU yang hanya meraih 2 kursi. Dikatakan informan bahwa solidaritas dikalangan warga NU itu sendiri banyak terpecah belah, sehingga dukungan warga NU memperoleh hasil yang sangat minim. Figur-figur dari PAN dan sepak terjangnya sangat menentukan pilihan pemilih

Peneliti mendapatkan bahwa apakah NU atau Muhamadyah, faktor agama tersebut sangat menentukan pilihan warga kepada para-partai berbasis agama. Namun lainnya berdasarkan faktor aliran politik seperti warga yang menamakan dirinya kaum nasionalis yang selalu menjatukan pilihan kepada PDIP dan Golkar.

Perilaku memilih Tokoh masyarakat masih sangat dipengaruh system kerabatan/kekeluargaan dalam hal ini kesukuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, masih terkesan terikat dengan ikatan-ikatan primordialisme kedaerahan. Pada prinsipnya pemimpin itu mesti dekat dengan masyarakat, dan memiliki kecerdasan serta aklhak yang baik untuk dijadikan panutan bagi masyarakat.

Pada satu sisi ada Tokoh Agama tersebut cenderung memberikan legitimasi kepada salah satu kandidat, walaupun tidak secara langsung mendukung tetapi ini menunjukkan dan menganggap bahwa apa yang dibahasakannya, tersirat dukungan yang terselubung. Tokoh masyarakat cenderung mengarahkan pandangan politik masyarakat pada wacana kesukuan. Tokoh masyarakat sebagai *patron* yang memiliki kekuasaan dan mengarahkan opini publik.

Otonomi daerah telah melahirkan *politik identitas* atau politik etnik, isu-isu etnisitas menjadi isu yang menguat. Ini terlihat oleh hadirnya beberapa tokoh masyarakat lokal sebagai patron yang mengangkat etnisitas sebagai sebuah kekuatan politik dalam merebut kekuasaan. Untuk Bolaang Mongondow sendiri mereka yang berlatar keluarga kerajaan menjadi sangat berperan, seperti marga Manoppo, Paputungan, Mokodompit, Sugeha, Mokoagouw, dsb. Kuatnya isu-isu primordialisme yang muncul pada saat pemilu mengindikasikan kuatnya faktor etnisitas dalam perilaku memilih masyarakat. Bahwa ikatan-ikatan primordialisme seperti ikatan darah, kesukuan, kekeluargaan menjadi faktor yang berpengaruh dalam perilaku memilih masyarakat.

E. Peran/ Faktor Strategi Pemenangan, Kampanya, dan Pendukung

Strategi penemangan akan terlihat dari beberapa informan yakni caleg dan tim suksesnya. Beberapa caleg berkampanye pada saat acara di rumahnya. Makan bersama sesudah ibadah, sesudah ibadah, mengajak makan bersama dan bincang-bincang dengan sekelompok masyarakat yang berkunjung ke rumahnya. Masyarakat tetangganya yang hadir menyambut dengan semangat acara yang diadakan, apalagi pada saat makan bersama.

Pendekatan yang dilakukan kebanaykan kandidat seperti pendekatan kekeluargaan, pendekatan keagamaan, pendekatan pertemanan. Kandidat yang juga anggota Legislatif yang masih berjalan, Ia melakukan Sosialisasi, membantu melalui kebijakan APBD sebagai anggota DPRD Bolaang Mongondow yang sedang berjalan dengan program infrastrustur jalan, penerangan, pendekatan ke gereja/mesjid. Mengingatkan mohon dukungan doa.

Dodi, Tim sukses seorang Caleg. Strategi Pemenangan menyukai caleg yang didukung karena figurnya sebagai teman dan orang kampung sendiri, tidak bisa memilih yang lain. Calon sudah membuktikan sebagai sumbangan kepada masyarakat yang ada susah dibantu dilayani, juga tempat-tempat ibadah, dan fasilitas jalan dibantu. Walaupun tidak ada janji-janji masa depan tapi suka memberikan kaos dan makanan.

Desmon (42 th) warga Poigar seorang Informan menjelaskan, selalu mengikuti kampanye yang dilakukan oleh si calon legislatif. Dan selalu menyampaikan kepada warga di Lolak untuk memilih calon legislatif yang didukung, Sebagai relawan pendukung si caleg memilih mendukung karena satu wilayah tempat tinggal, dan sudah melihat langsung apa saja karya nyata yang telah dibuat oleh

seorang anggota DPRD selama dia menjadi anggota dewan Kabupaten Bolaang Mongondow yang menyentuh infrastruktur maupun kemanusiaan sambil secara transparan menjelaskan adanya pemberian uang untuk makan dan transportasi bila diadakan kampanye terbuka.

Calon dari partai PAN, strategi yang ia gunakan menjalin hubungan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Memiliki daerah basis dukungan di keluarga, di beberapa organisasi. Untuk rival internal partai tetap ada persaingan tapi tetap berusaha untuk mencapai suara terbanyak. Tetap mengadakan sosialisasi atau pendekatan pemilih yang masih bimbang. Membangun jaringan lewat struktural partai dan tim sukses. Ia mengatakan untuk tim sukses dengan kriteria karena kebanyakan tim sukses abu-abu, jadi harus dicoaching terlebih dahulu. Tim sukses ada sampai tingkat bawah. Bila kedapatan tim sukses yang berdiri di dua kaki, akan dinasehati agar jangan terulang lagi.

Mengenai pendanaan partai hanya mendukung atribut dalam kampanye. Didukung pertama-tama oleh keluarga. Membangun hubungan dengan pemilih terlebih dahulu face to face. Banyak pemilih yang minta tolong dibantu, tapi dibantu sebatas kemampuan, tidak berlebih supaya tidak bermasalah secara hukum. Memasang spanduk, membuat kartu nama, dll, mobilisasi dan atribut yang paling tinggi biayanya. KPUD/Panwaslu memonitor pengeluaran dengan menunjukkan kwitansi-kwitansi.

Menurut ST, Caleg PDIP, masyarakat sekarang ini lebih memilih figur yang dapat memberikan solusi. Contohnya waktu pemilihan gubernur Jakarta walaupun jokowi bukan partai pemenang akhirnya jokowi menjadi tokoh yang harga mati, figur yang luar biasa dan jokowi adalah figur yang memang diinginkan masyarakat dan akhirnya dia bisa jadi gubernur. Di tempat lain juga sama Jadi masyarakat sudah pintar

memilih mana yang pantas dan tidak pantas atau mana yang layak atau tidak layak. Dia tidak mau melakukan black campaign dan hal itupun dia sering sampaikan ke masyarakat, dia tidak mau menyampaikan janji karena kadang-kadang ada masyarakat yang tidak mau menerima itu karena mungkin ada janji-janji yang terlalu muluk-muluk trus tidak ditepati bagaimana.

Program yang dia tonjolkan adalah ke supremasi hukum sesuai basic ilmu karena kalau pendidikan dan kesehatan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sudah ada program tentang itu. Peran tokoh masyarakat atau organisasi-organisasi masyarakat, lsm itu penting karena mereka juga yang tahu tentang permasalahan masyarakat. Melakukan dialog tertutup ke masyarakat dan didalam dialog tersebut dia menyampaikan pendidikan politik.

Dia merekrut teman dan kerabat untuk menjadi tim sukses. Menurutnya lebih penting tim sukses karena kalau struktural partai cenderung memikirkan bagaimana organisasi atau partai politik itu terstruktur dengan baik tapi kalau tim sukses mereka yang turun ke bawah, mereka yang bekerja dibawah dan mereka lebih mengetahui masyarakat yang ada di bawah. Pak Novi memiliki tim sukses, tim sukses tidak diimingi dengan imbalan namun mereka selslu dihimbau untuk bekerja yang terbaik jadi ketika mereka melakukan yang terbaik pasti dia akan memberi yang terbaik untuk mereka,tim sukses selalu diingatkan bahwa kemana mereka turun disitu juga dia ada karena citranya bisa terlihat dari tim suksesnya. Dia tidak mau ada tim sukses yang berdiri dua kaki dan kalaupun ada yang dia temui tim seperti itu langsung dikeluarkan.

JEFRI, 44 TH pendukung Salah satu caleg, yang sebenarnya tidak terlalu menyukai dunia politik. Memberi masukan-masukan/ide-ide kreatif yang bisa berguna untuk strategi pemenangan, karena caleg yang didukung masih muda dan belum menikah jadi perlu banyak informasi-informasi berharga demi suksesnya

pemenangan. Membayar orang untuk diminta membagi-bagikan kartu nama, memasang spanduk dan baliho-baliho. Membantu secara finansial sebatas kemampuan untuk dapat dipergunakan demi menunjang berbagai aspek yang dibutuhkan dalam kampanye.

Seorang, Caleg PDIP, memanfaatkan masa kampanye dengan gaya blusukan dengan lebih banyak turun ke arus bawah (tukang ojek dan orang-orang di pasar), hal ini dilakukannya sebagai wujud komitmen dan kesadaran akan fungsi legislator sebenarnya. Menurutnya menjadi anggota DPRD itu artinya menjadi pelayan masyarakat jadi melayani bukan di layani, memperjuangkan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi. Menurut EA memahami kondisi masyarakat di Bolaang Mongondow khususnya masihbanyak hal yang harus diperjuangkan dan tentunya harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. DPRD membantu kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, karena itu kita harus tahu dulu apa kepentingan masyarakat.karena itu dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya dan bukan lebih banyak mengubar janji tapi legislator harus berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

Calon ini memakai pola politik uang, dia tetap memberikan bantuan kepada orang, organisasi yang datang membawa proposal, saat dia turun lapangan dan ada yang perlu di bantu dia tetap memberikan bantuan walaupun hanya sebatas kemampuannya saja yang dia berikan, orang yang ikut dengan dia saat kampanya tetap diberikan uang pengganti transportasi dan makan. Pak ichad memiliki tim sukses dari teman-teman sesama mantan aktivis mahasiswa dan teman-teman sesama pencinta alam.

Seorang Caleg Gerindra Mawira (54 th), memperkenalkan diri ke masyarakat dengan Jalan-jalan, mengajak masyarakat untuk ikut memilih,melakukan blusukan

sambil memberi pemahaman ke masyarakat tentang tugas dan fungsi Dewan. Mawira adalah pemantau kinerja Dewan, dan banyak mengkritik tupoksi dewan tersebut diantaranya tentang pembuatan peraturan daerah, lewat hasil pantauannya dimana banyak anggota dewan yang kurang memahami tupoksinya, dan hasil inilah yang dia sering sampaikan ke masyarakat, dan mengingatkan ke masyarakat supaya tidak memilih mental-mental anggota dewan yang seperti itu. ketika bertemu dengan kelompok masyarakat di dapilnya, Mawira tidak hanya memperkenalkan dirinya tetapi juga memperkenalkan caleg-caleg lain yang satu partai, program-program dari Prabowo serta program partai gerindra. Menurutnya dia tidak akan membagi-bagikan uang karna tidak mendidik, Mawira selalu menyampaikan bahwa jadilah pemilih yang cerdas tanpa harus melihat adanya pemberian uang,karna dia juga tidak memiliki uang yang banyak tetapi hanya memiliki banyak ide.

Dia tidak memiliki tim sukses diluar tim partai, baginya tim sukses kadangkala tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan programnya, dan hasilnya tim sukses hanya mencari uang, dan kadangkala juga tim sukses tidak komitmen karna hari ini bisa dengan dia tapi besok juga bisa dengan caleg yang lain. Yang sering dia sampaikan ke masyarakat yaitu jangan golput. Tapiikut memilih sesuai yang masyarakat suka, Bapak Mawira tidak menekankan bahwa dialah yang harus dipilih. Selama dia kampanye memakai uang sendiri, ada kalender yang dicetak tetapi biaya dari temannya ibu Henny Wulur dan gambar di kalender tersebut adalah gambarnya dia dan ibu henny tersebut.

Dalam kasus kelompok muslim dan etnis bukan Muslim, dapat lihat bahwa Aditya Moha telah menganggap ini sebagai sebuah modal politik untuk menuntut adanya representasi orang Bolaang-Mongondow di parlemen pusat. Dia bersama Yasti Mokoagouw, telah diberitakan sebagai harga mati dan harga diri orang Mongondow.

Politik representasi semacam ini, juga mengerucut pada daerah kabupaten yang telah dijelaskan mengangkat persoalan etnis.

Dalam skala yang lebih mengerucut, di Bolmong, daerah yang dianggap representasi Islam di provinsi, kader Kristen yang mencalonkan diri dan mendapat tempat secara politik telah dilihat sebagai suatu yang membanggakan. Ini dapat kita lihat dalam kasus Wakil Bupati Bolmong, Yanny Tuuk yang saat mencalonkan diri dalam Pilkada telah mendapat sumbangan dari salah satu pengusaha beragama Kristen, bukan hanya karena soal ekonomi-politik semata, dan terlebih secara simbolis kerena menimbulkan kebanggaan sebagai komunitas Kristen di daerah Islam yang berhasil secara politis.

Soal-soal seperti ini, sejauh tangkapan tidak hanya digunakan oleh para Caleg yang namanya ada di atas, tetapi juga oleh banyak yang lain. Ini setidaknya menunjukkan hal penting, bahwa isu agama sebagai sebuah representasi dalam bidang politik, baik itu berbeda agama, berbeda denominasi ataupun sama agama dan sama denominasi telah secara sadar digunakan untuk mengeskalasi suara, baik oleh Caleg, Tim Sukses atau bahkan rakyat sumber suara. Ini menunjukkan hal penting bahwa, warga memiliki kesadaran untuk menggunakan representasi agama sebagai komoditas politik yang menjanjikan.

F. Fenomena Money Politics

Fenomena Money Politik atau Politik Uang di Indonesia seakan sudah menjadi sesuatu yang wajar, bahkan menjadi suatu keharusan. Idealnya seorang yang dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai seorang bintang dalam suatu partai politik untuk mengikuti suatu pemilihan legislatif ataupun eksekutif haruslah memiliki bekal pengetahuan dan pengamalaman politik bukan hanya sekedar terkenal dan memiliki

dompet tebal. Akan kemana Indonesia ini untuk kedepannya tentulah ditentukan oleh pemimpinnya. Merupakan suatu kemunduran untuk Indonesia apabila para pemimpin kita hanyalah seorang pemimpin *karbit*-an yang hanya muncul apabila pemilihan mendekat dan menghilang ketika pemilihan telah usai.

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan (1999) kalau kasus *money politic* bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.

Secara umum money politic biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan money politic sebagai tinadakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.Secara umum *money politic* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politic* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.

Di dalam pemilihan umuum atau PEMILU ada beberapa praktik tindakan money politic misalnya;

a. Distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu,

   Didalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2003 mengenai masalah dana kampanye telah ditentukan maslah dana kampanye pada pasal 43 antara lain;

- Dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan calon, partai politik yang mencalonkan, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat dan meliputi sumbangan perseorangan atau badan hukum swasta
- Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye.
- Sumbangan dana kampanye dari perseorangn tidak boleh lebih dari Rp 100.000.000,- dan dari badan swasta tidak boleh lebih dari Rp 750.000.000,-

b. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang *ilegal,*
c. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai poltik tertentu (Sumartini, 2004).

Ada beberapa macam-macam bentuk pemberian uang dari kandidat kepada anggota dewan yang terlibat dengan politik uang (*Money Politics*). Macam-macam itu adalah sebagai berikut:

1. Sistem ijon.
2. Melalui tim sukses calon.
3. Melalui orang terdekat.
4. Pemberian langsung oleh kandidat.
5. Dalam bentuk *cheque.*

Dari wawancara dan pengamatan kepada para Caleg khususnya Bolaang Mongondow, didapati bahwa perkunjungan langsung ke masyarakat adalah sangat diandalkan para caleg dan tim pemenangannya. Kemudian lebih dari itu masyarakat juga meminta uang atau dalam bentuk barang. Bagi sebagian masyarakat uang atau barang sebagai tanda jadi atau uang panjar untuk memilih caleg tersebut. Menurut beberapa caleg yang sudah pernah mencalonkan diri pemilu sebelumnya, mereka mengatakan pada pemilu sekarang ini, politik uang sudah semakin menguat dan masif.

Penyaluran uang dan barang terjadi dalam beberbagai bentuk seperti serangan fajar sebelum pemilih ke TPS, hingga memberikan uang saat di TPS yang tidak malu-malu lagi, sebagian memberikan pada malam hari sebelum hari pemilihan. Kalau barang-barang disalurkan sebelum pemilihan, yakni berupa sembako, kartu asuransi, dll. Kemudian mereka yang sebelumnya anggota legislatif, memanfaatkan posisinya untuk memfasilitasi warga mendapatkan bantuan-bantuan sosial atau fasilitas infrastruktur.

Pendekatan yang selalu dilakukan para caleg adalah pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang memiliki massa besar. Akan tetapi pendekatan terlebut lagi-lagi harus disertai dengan pemberian sejumlah uang atau barang.untuk menggerakan tokoh-tokohnya. Meski telah melakukan negosiasi ataupun sang caleg adalah beradal dari komunitas tersebut. Tetap saja ia harus melakukan penyerahan uang yang akan membuat istitusi itu melakukan konsolidasinya. Ketidakberdayaan sang kandidat memberikan sejumlah uang, membuatnya tersingkir, sebab caleg lain yang diluar komunitas bisa melakukan transaksi. Kecuali memang ketokohannya sangat kuat dalam komunitas tersebut.

Pendekatan kepada basis-basis komunitas, mereka saling berebut simpati dukungan dengan disertai uang. Basis agama seperti Islam di kebanyakan wilayah Bolaang Mongondow bagian utara, basis Kristen di Bolaang Mongondow tengah. Kemudian basis-basis kesukuan, Minahasa di Bolaang Mongondow Tengah dan Selatan, Sangihe dan Gorontalo di Bolaang Mongondow bagian utara. Saling merebut dukungan komunitas ini dilakukan juga dengan mengunjungi langsung masyaraktnya. Yang lain sudah jauh-jauh hari melakukannya, dan berlangsung marak saat mendekati pemilihan umum.

Kepada komunitas agama, mereka memberikan sumbangan dana bagi pembangunan gedung Gereja atau Mesjid. Menghadiri cara-acara peribadatan, hingga memberikan sambutan sampai memberikan kotbah atau renungan. Sesudah itu meninggalkan yang kepada komunitas agama tersebut.

Uang yang diberikan pada saat akan pemilihan berfariasi mulai dari lima puluh ribu, seratus ribu, dan dua ratus ribu rupiah. Penyalurannya oleh para tim suskses kepada kelompok-kelompok basis, kelompok keluarga, tukang ojek, dan lainnya. Jauh-jauh hari Celeg sudah dimintakan sumbangan untuk membantu pembangunan fasilitas publik di lorong-lorong Kabupaten Bolaang Mongondow seperti tempat ibadah, pembuatan jalan, saluran air. Kalau ada acara-acara besar keluarga seperti pesta, dan acara keduakaan, maka caleg akan mengunjunginya dan memberikan sumbangan.

Pemberian uang kepada konsituan telah dianggap biasa, sang kandidat harus rajin melakukan kunjungan dan meninggalkan uang pada pendungnya. Banyak yang tidak melakukan hal tersebut, pada akhirnya tidak mendapatkan dukungan kecuali faktor keluarga dan ketokohan seperti yang disebutkan tadi. Meski warga Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan kelas menengah, dan banyak juga kelas atas. Akan tetapi uang dianggap sebagai tanda bahwa Caleg serius akan berkontribusi selanjutnya ketika menjadi anggota Dewan.

Politik uang di Sulawesi Utara terjadi dengan berbagai macam cara, yang paling kentara adalah saat *door to door*, penyalagunaan fasilitas negara pada masa kampanya. pemberian barang, pemberian uang, pemberian jasa. Pemberian barang paling banyak berupa pakaian, sembako dan peralatan rumah tangga. Kalau jasa, bisa berupa pelayanan kesehatan, hiburan, pertunjukan, layanan pendidikan dan janji pemberian uang. Pemberian uang, dalam berbagai modus terutama melalui *door to door* sebagai

modus klasik, dengan mendatangai konstituen kemudian meninggalkan uang. Cara lain, keluarga caleg atau relawannya memberikan uang kepada sejumlah konsituen di acara kebaktian, pengajian atau keagamaan. Memberi uang kepada lansia, anak-anak. Pasca pencoblosan ada lagi menukarkan nama yang dicoblos dengan uang.

Saat kampanya, modus mengadakan kuis, kemudian memberikan sejumlah barang atau uang. Pengamat Politik dari Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando (2014) mengatakan caleg yang mengandalkan uang belum tentu akan terpilih. Dia harus mampu menentukan modus, lokasi, dan jenis transaksi serta distribusi yang tepat, empat unsur tersebut harus dipenuhi sang kandidat, kalau salah satu unsur tidak tepat maka sia-sia uang yang diberikan. Kebanyakan lagi menjelang waktu orang-orang ke TPS atau tempat pemungutan suara. Siapa yang terakhir menemui mereka yang paling menentukan, bukannya sentuhan pertama namun sentuhan akhir.

Katanya, ada juga modus pencapaian target suara. Contohnya Caleg menargetkan 100 suara di salah satu TPS, dengan menugaskan seorang anggota masyarakat, biasanya orang yang ditugaskan adalah perangkat Desa, tokoh masyarakat untuk memobilisasi suara. jika target tercapai maka transaksipun berlaku. Jika satu TPS bisa 100 suara, lalu dikalikan dengan jumlah TPS di Dapil tersebut, maka sudah dipastikan si Caleg bisa melenggang mulus ke kursi dewan.

Pecing Sambur (36 th), seorang tim sukses beberapa caleg mulai dari Caleg DPR-Ri, Caleg untuk Propinsi, dan Caleg untuk Kabupaten Bolaang Mongondow. Caleg DPR-RI menintipkannya Alat Peraga Kampanya berupa stiker, pemasangan Baliho, dan permintaan untuk memobilisasi suara. Kandidat DPR-RI hanya menitipkan alat peraga dan mobilisasi suara menurut Pecing, Kandidatnya tidak mau dianggap melakukan money politik, padahal di masyarakat di Desa berkali-kali bertanya berapa uang yang akan diberikan agar mereka akan mencoblos calon

tersebut. Ia tidak bisa berbuat banyak, hanya mengandalkan kapasitasnya sebagai figur yang dikenal di masyarakat khususnya mereka yang memanfaatkan fasilitas pertanian yang dipunyai keluarganya. Kemudian ia berkoordinasi dengan struktur partai yakni Ranting yang ada, akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil, mereka sudah diatur sedemikian rupa untuk memilih Caleg PDIP urut 1 yakni Olly Dondokambey. Ia sendiri tetap menjatuhkan pilihan kepada caleg tersebut atas dasar latar belakang menjadi anggota PDIP sejak lama dari keluarganya, dan caleg yang didukung ini diamanatkan oleh saudaranya dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengajaknya menjadi tim sukses atau relawan di Desa Ponompiaan.

Ia juga sebagai relawan seorang Caleg dari PDIP untuk menggapa kursi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Tim Sukses utama Caleg memberikan APK beserta himbauan memilih, pemberian bantuan sejumlah uang dilakukan juga dengan tarif Rp. 50.000, dibandingkan dengan calon lain untuk propinsi bisa lebih besar sekitar 100-150 ribu, akhirnya permintaan *"uang segar"* dari konstituen dari berbagai latar belakang, mulai kelompok agama, kelompok tani, atau anggota partai lain yang mau menukarkan calonnya kalau dana yang diberikan lebih besar. Tim mereka ada yang menamakan tim 10 setiap kampung, dalam arti ada 10 orang yang menyalurkan uang dengan target 10 orang dan 10 orang cari 10 orang lagi, kompensasi uang sekitar 50-100 ribu per orang. Jadi dalam satu Desa 10 x 10 orang berjumlah 100 orang target untuk mendapatkan 10 orang menjadi total semua 1000 orang. Dengan hitungan ada yang meleset tapi tidak banyak.

Pecing juga sebagai Tim Sukses Caleg dari Partai Demokrat untuk Kabupaten Bolaang Mongondow, meski dalam berbagai hal katanya tidak mau melakukan *money politik*. Akan tetapi ia telah melakukan aksi-aksi pemberian bantuan di Desa berupa sejumlah uang pembangunan gereja dan mesjid. Kemudian bantuan Komputer dan

peralatan lainnya di Kantor Desa, bantuan bagi kelompok-kelompok tani, serta bantuan pengadaan jalan pada lokasi yang memiliki akses jalan yang buruk, mensponsori acara-acara olahraga. Pada saat kampanya, katanya karena permintaan masyarakat yang mengharuskan kandidatnya berpikir untuk memberi sejumlah uang. Di Desa dibagi kedalam lingkungan-lingkungan, dimana setiap lingkungan memiliki kontak person atau relawan yang akan mendistribusikan uang tersebut serta memobilisasi suara. Mereka diberikan target 20 orang setiap lingkungan, 20 orang ini akan mendapatkan kompensasi Rp. 50.000, dengan harapan lain bahwa bantuan-bantuan sebelumnya ke organisasi keagamaan, pemerintah Desa, kelompok-kelompok tani, ivent-iven kampung akan menjadi kekuatan utama mendongkrak suaranya.

Pengakuan informan diatas, memperlihatkan aksi permainan uang di medan politik pemilu telah membiasa pada masyarakat. Namun ada bagian lain yang tidak hilang dalam strategi pemenangan sang kandidat, yakni mengandalkan pola kerja partai politik serta daya pemikatnya masih saja ada, pemilih juga masih mengacuhkan pilihan pada pandangan politiknya. Masih banyak anggota atau simpatisan Partai Politik tertentu yang tetap menjatuhkan pilihan kepada kandidat dari partai yang sesuai dengan pandangan politiknya. Baru kemudian latar belakang agama kepercayaan, keluarga atau kekerabatan, komunitas, organisasi, birokrasi pemerintahan. Mana yang lebih kuat mempengaruhi, sangat tergantung kepada kinerja faktor-faktor tersebut.

Tidak ada laporan resmi tentang terjadinya money politic dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini didasari oleh pemikiran para stake holders bahwa pilkada yang berhasil adalah pilkada yang aman dan nir pelanggaran (termasuk money politik) sehingga para stake holder cenderung menutup mata terhadap terjadinya pelanggaran dalam pilkada. Namun dilapangan pelanggaraan dalam bentuk money politic sudah jamak ditemui. Money politics ini

bisa terjadi antara : (a) Pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi (pengusaha) di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan calon peserta pilkada. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan dana untuk kepentingan pemilu bagi calon peserta pilkada dengan kompensasi pemberian proyek kepada pengusaha, atau setidaknya apabila calon peserta pilkada itu nantinya terpilih, maka ia tidak akan mengganggu atau menghambat kepentingan ekonomi pengusaha tersebut; (b) Calon peserta pilkada dengan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan massa. Hal ini dilakukan dengan bentuk pemberian dana dan atau proyek kepada tokoh masyarakat, dengan kompensasi tokoh masyarakat tersebut mau mengarahkan massanya untuk memilih calon perserta pilkada yang memberikan dana dan/atau proyek tersebut; (c) Calon peserta pilkada dengan calon pemilih. Hal ini dilakukan dalam bentuk: (1) Memberikan uang kapada para calon pemilih (baik itu kepada para simpatisan calon tertentu maupun kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan kepada calon tertentu (floating mass), yang umumnya dilakukan pada :

Kampanye, yang mana hal ini dimaksudkan agar para calon pemilih mau hadir dalam kampanye (baik dalam kampanye dialogis maupun dalam kampanye monologis) kehadiran para calon pemilih dalam kampanye pada umumnya diharapkan dapat mendongkrak popularitas calon dan juga lebih dijadikan kesempatan untuk menyampaikan pesan agar calon pemilih yang hadir untuk memilih calon tertentu dari pada menyempaikan visi dan misi calon tersebut.

Kegiatan sosial-keagamaan yang dilakukan diluar masa kampanye, baik itu kegiatan yang diadakan oleh tim sukses calon peserta Pilkada maupun kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sendiri namun dimanfaatkan oleh tim sukses calon peserta Pilkada untuk menyampaikan pesan politik tertentu.

Menjelang pencoblosan/ pemungutan suara (serangan fajar). Hal ini merupakan kesempatan terakhir bagi tim sukses calon peserta Pilkada untuk membujuk calon pemilih untuk memilih calon tertentu. Sehingga intensitasnyapun menjadi kian tinggi. Pada umumnya money politic yang dilakukan pada tahap ini, sasarannya adalah calon pemilih yang belum menentukan pilihan (floating mass) yang tingkat ekonominya rendah.

Disamping melakukan kegiatan sosial (seperti, pelayanan kesehatan gratis, bagi-bagi sembako, dsb) yang sasarannya adalah para calon pemilih (baik itu kepada para simpatisan calon tertentu maupun kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan kepada calon tertentu (floating mass), yang umumnya dilakukan masa kampanye dan sebelum masa kampanye.

Data-data tersebut belum juga ditambah keterangan lain dari berbagai daerah, misalnya di Poigar, Bolaang Mongondow dimana pada malam sebelum pemungutan suara, para tim sukses dari Caleg Gerinda, PDIP dan PKS telah bergerilya untuk membagikan uang yang rata-rata berjumlah Rp. 100.000/suara. Proses jual beli suara ini, sering juga ditambah dengan sajian makan-minum yang diberikan para Caleg pada warga hampir tiap hari menjelang masa pemilihan.

Dari sekian banyak data lapangan di atas, kita menjadi mengerti mengapa bahkan untuk pemilihan DPRD tingkat Kabupaten/Kota, dana politik yang disediakan sangat tinggi, yang menurut keterangan informan diambil dari uang pribadi. Di daerah Bolmong, baik di Kabupaten ataupun Kota, 200-300 juta merupakan standar terendah untuk mencalonkan diri. Seorang caleg yang merekapitulasi pengeluarannya, mengaku pada pemilu lalu menghabiskan sekitar 500 juta106 hanya untuk mendapatkan kursi PAW pada periode yang masih berlangsung ini.

Sumampouw (2013) melaporkan di Bolaang Mongondow, daerah yang turun temurun menjadi sarang Golkar, telah secara fluktuatif berubah menjadi didominasi kader-kader PAN -terutama di Bolaang Mongondow dan Kotamobagu- yang dikenal membeli suara dengan harga paling tinggi semenjak Pilkada terakhir. Ada fenomena yang secara lokal disebut baku-tindis, jor-joran yang sangat umum dan permisif ditemui. Prosesnya adalah salah seorang tim sukses datang menanyakan berapa yang diberikan calon sebelumnya dan dia akan memberikan harga yang lebih tinggi. Tentu warga mengambil uang dari semua tim sukses yang datang. Karena itulah, di Bolmong telah berkembang sebuah pameo politik yang populer untuk menyikapi watak masyarakat dalam jual-beli suara ini: kalo orang Sangihe, kalo bilang io, io; Kalo orang Minahasa, bisa ia, bisa tidak; Kalo orang Mongondow, io mar nyanda [orang Sangihe, kalau bilang ia berarti ia, tidak berarti tidak; kalau orang Minahasa, bisa ia, bisa juga tidak; kalau orang Mongondow, mereka berkata ia tetapi tidak melakukannya. Sederhana memang, lahir dari lapisan masyarakat yang sangat umum, tetapi tentu saja secara kultural ini bisa mewakili perilaku politik jual-beli suara di Sulut. Mungkin juga, pameo ini dapat menjelaskan bagaimana perilaku salah seorang Caleg yang menutup jalan, yang oleh warga dinilai merasa kecewa karena tidak dipilih padahal telah dijanjikan. Secara kultural, dari hasil pengamatan dan wawancara, kita dapat menyimpulkan bahwa warga melihat ini sebagai wujud intelektualitas dalam berpolitik, karena mereka menganggap diri lebih pandai dari para calon.

Secara kultural, proses jual beli-suara baik dalam bentuk uang segar, pemberian barang atau menyajikan makan dan minum berhari-hari kepada konstituen juga menjadi semacam mekanisme alami untuk menilai kapasitas ekonomi dan seberapa kuat secara sosial seorang calon. Intensitas serta kuantitas menjadi ukuran

dalam laku tersebut. Kenyataan bahwa semua informan -selain kebanyakan Caleg-, menyatakan motivasi seseorang menjadi calon karena persoalan gengsi semata tentu mendukung argumentasi ini. Salah seorang informan membahasakan ini sebagai proses aktualisasi diri. Secara lokal, kita tahu dan yakin, bahkan di saat belum pasti menjadi anggota legislatif, hanya dengan memberikan uang pada warga seorang calon sudah menunjukkan gengsi dan prestisenya secara sosial untuk dianggap sebagai 'bos'.

Hal senada juga diungkapkan oleh Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow. Biasanya beberapa laporan yang terkait dengan Money Politic, laporan tersebut tidak didasari dengan bukti yang memadai sehingga akhirnya tidak dapat di tindak lanjuti.

Money politic yang dilaporkan tersebut, dilakukan dalam bentuk:

1. Memberikan uang, kaos, dan sembako kapada para calon pemilih (baik itu kepada para simpatisan calon tertentu maupun kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan kepada calon tertentu (floating mass) hal ini dilakukan oleh hampir semua pasangan calon, yang umumnya dilakukan pada:

   Kampanye, dalam masa kampanye hampir semua pasangan calon membagi-bagikan uang dan kaos, kepada simpatisannnya.

   Menjelang pencoblosan/ pemungutan suara (serangan fajar). Ketika menjelang dilaksanakan pencoblosan/ pemungutan suara, hampir semua pasangan calon/tim suksesnya melakukan "serangan fajar" yang dilakukan dengan cara membagi-bagikan uang atau sembako kepada masyarakat tingkat ekonominya rendah.
2. Mengadakan Kegiatan social-kemasyarakatan yang dilakukan di dalam ataupun di luar masa kampanye, baik itu kegiatan yang diadakan oleh tim

sukses pasangan calon, oleh organisasi atau kelompok masyarakat yang bukan merupakan tim sukses pasangan calon namun bergerak dengan didalangi dan didanai oleh pasangan calon namun tidak menampakkan adanya keterkaitan dengan pasangan calon maupun kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sendiri namun dimanfaatkan oleh tim sukses calon peserta Pilkada untuk menyampaikan pesan politik tertentu. Kegiatan semacam ini seringkali dijadikan media untuk menggalang dukungan yang dalam pelaksanaannya juga tidak lepas dengan praktik bagi-bagi uang dan sembako. Melakukan kegiatan sosial (seperti, pelayanan kesehatan gratis, bagi-bagi sembako, dsb) yang sasarannya adalah para calon pemilih (baik itu kepada para simpatisan calon tertentu maupun kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan kepada calon tertentu (floating mass), yang umumnya dilakukan masa kampanye dan sebelum masa kampanye.

Berbagai kejadian politik uang dalam Pilkada langsung sebagaimana diuraikan di atas seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum karena sulitnya pembuktian, disamping sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Tak pelak bahwa terjadinya pertarungan kepentingan yang tajam antar elit berbagai kelompok primordial dibanyak daerah khususnya dalam proses perebutan posisi kepala daerah dan jabatan-jabatan publik lainnya membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Mahalnya pembiayaan kontestasi politik di daerah-daerah telah mendorong para elit lokal untuk mengaktifkan dan memperluas jejaring rente yang dapat mereka akses. Setelah terpilih para pemimpin lokal ini mempunyai kewajiban untuk membayar berbagai sumbangan politik yang telah dia terima. Bentuk-bentuk pembayaran ini adalah berupa produk hukum dan kebijakan publik yang bersifat

diskriminatif, tidak berpihak kepada kepentingan kelompok-kelompok rentan, mendistorsi pasar, memingirkan pelaku pasar dan masyarakat pada umumnya.

Implikasi langsung dari terpilihnya kepala daerah melalui politik uang adalah semakin maraknya praktek-praktek korupsi, baik yang berkarakter korupsi birokratis seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa dan pemberian izin, maupun korupsi politik seperti yang banyak dilakukan oleh para anggota DPRD terhadap APBD mereka masing-masing. Sesuai UU 32/2004, KPUD memang harus bertanggungjawab kepada dewan, persoalannya adalah bakal calon bupati yang tidak lolos verifikasi di KPUD bisa menggunakan kekuasaan dewan untuk menolak pemilihan bupati.

Politik uang sudah dianggap biasa oleh masyarakat, Berikut pernyataan Jhon (29 th) saat diwawancara: "Saya paham kalau money politics itu dilarang tetapi kenyataannya hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita setiap menjelang Pemilihan Kepala Desa. Saya pun sangat terbuka dengan hal itu, karena walaupun jumlahnya tidak seberapa tetapi sedikit banyak dapat menjadi tambahan saya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari."

Berikut pernyataan Marlon (43 th) saat diwawancara : "… Ya karena saya menganggapnya sebagai tradisi pada Pemilu. Dinamakan tradisi karena terus menerus berkelanjutan dari waktu ke waktu saat menjelang pemilihan. Sekarang mana ada Pemilihan Umum yang jauh dari money politics mbak… di setiap tempat pasti ada. Saya tahu kalau money politics itu dilarang tapi itu nyatanya tidak menjadi ancaman kan di masyarakat. Semua orang yang menerima money politics pasti akan lebih merasa terbantu, kalau masalah politik saya tidak begitu paham. Saya hanya bertindak sebagai generasi penerus yang merasakan manfaat dan ikut terbiasa dengan adanya money politics."

Amirudin (41 tahun) mengaku menerima dan memilih calon legislatif melakukan money politics. Bagi Amirudin praktik money politics menjelang Pemilihan Legislatif merupakan suatu perjanjian kerjasama atau kontrak antara Agus dengan calon Legislatif yang memberinya uang. Menurutnya tindakan tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Dapat dilihat bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat kelas bawah bersedia menerima dan terlibat dalam praktik money politis, antara lain yaitu : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor tradisi, dan faktor kesempatan. Kalau secara ekonomi, politik uang dilihat oleh warga sebagai upaya mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan apalagi ada program-program pemberdayaan ekonomi rakyat dari kandidat seperti bantuan usaha pertanian, peternakan, perikanan dsb. Dimana hal ini terlihat warga kebanyakan masih rendah tingkat perekonomiannya, sehingga pilihan mereka akan ditenukan oleh uang.

Faktor pendidikan, rupanya pemilih yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih melihat figur dan latar belakangnya, sementara yang berpendidikan rendah mudah dipengaruhi oleh uang dan sejenisnya. Faktor tradisi, akan terlihat pada kebiasaan masyarakat yang telah menganggap bahwa pemberian uang dari kandidat adalah hal yang lumrah, sebagai pertanda komitmen kandidat terhadap perjuangannya untuk masyarakat, dan hal ini telah berlangsung lama dan telah menjadi tradisi. Tradisi jual beli suara, menganggap bahwa suara pemilih harus dibeli. Faktor kesempatan, adalah dimana pemilih mendapat suatu kesempatan untuk mendapatkan materi, Pemilu yang berlangsung tidak setiap saat ternyata menjadi sebuah peluang baik, “mumpung” ada yang memberikan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, seperti dalam kasus pemilu legislatif 2014, terlihat angka terendah terdapat pada kecamatan Dumoga Tenggara, sedangkan yang tertinggi adalah kecamatan Poigar, artinya tingkat partisipasi tertinggi ada pada kecamatan Dumoga Tenggara sementara partisipasi terendah ada pada kecamatan Poigar. Secara keseluruhan tingginya partisipasi masyarakat Bolaang Mongondow dalam pemilihan umum legislatif, terjadi juga pada pemilihan umum untuk pemilihan DPD RI, DPRD Kabupaten, kemudian pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Atas dasar ini terlihat para calon legislatif yang beramai-ramai untuk menggalang suara di wilayah Bolaang Mongondow.
2. Pertimbangan terbesar dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum berdasarkan pengamatan berturut-turut adalah popularitas atau figur kandidat, pengalaman kandidat, kemampuan atau kompetensi kandidat, pasangan, track record, latar belakang profesi, dukungan dari tokoh agama, dukungan dari tokoh masyarakat, asal partai yang mencalonkan, dan asal daerah calon.
3. Di Kabupaten Bolaang Mongondow, latar belakang agama kandidat tampak sangat mempengaruhi preferensi pemilih. Pengalaman pemilihan legislatif 2014 di beberapa desa di dataran Dumoga, sebagian pemilih tidak mendasarkan pilihannya berdasarkan agama yang dianutnya. Beberapa kandidat dari PDIP memenangi desa-desa yang mayoritasnya etnik Mongondow dan beragama Islam. Hal tersebut dapat berarti bahwa faktor

agama memiliki kecenderungan yang berbeda dalam mempengaruhi preferensi pemilih. Lain halnya pada beberapa tempat seperti di Lolak menceritakan bahwa agama menjadi sangat menentukan pilihannya, apalagi kandidat yang berasal dari etnik Mongondow, namun kandidat tersebut harus banyak menunjukan batang hidungnya di acara-acara tradisi masyarakat

4. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku memilih di kebanyakan wilayah Bolaang Mongondow adalah identifikasi partai berdasarkan ikatan ideologi dan agama. Saat pemilu 2014, situasi demografi berubah dengan kabupaten Bolaang Mongondow hanya terbatas pada wilayah bekas swarapraja/ kerajaan Mongondow. Tetapi dengan terlepasnya Kotamobagu, Bolmut, Boltim, Bolsel, kemudian imigran dari Minahasa, Sangihe, Jawa, Bali, dsb yang telah lama masuk di wilayah Mongondow. Hal ini membuat Kabupaten Bolaang Mongondow sangat beragam agama dan etniknya. Akhirnya pemilih yang kembali ditentukan dengan preferensi agama dan etnik makin menguat. Sementara itu pilihan ideologis juga cenderung tinggi. Kemenangan PDIP berbasis fisiologis dan koalisi partai berbasis agama lainnya saat Pilkada telah mengantarkan Salihi Mokodongan dan Yani Tuuk sebagai bupati dan wakil bupati Bolaang Mongondow. Pemilihan legislatif 2014 telah menampilkan dominasi PDIP dan PAN, keduanya dianggap mewakili kaum ideologi nasionalis dan agama. Jadi faktor ideologis dan agama menguat dalam situasi multikultural dibandingkan pada situasi dominasi satu agama atau etnisitas.
5. Pilihan pemilih kepada partai politik yang berbasis agama atau ideologi turut dipengaruhi tingkat pendidikan dan pendapatan pemilih. Pemilih yang berpendapatan dan berpendidikan rendah cenderung untuk memilih partai

politik berdasarkan kedekatan agama atau ideologi partai politik tersebut, mereka ini yang disebut pemilih tradisional. Namun hal ini tidak menentukan kepada pemilih berpendapatan dan berpendidikan tinggi yang menjadi aktivis atau anggota partai tersebut. Pemilih dengan tingkat pendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi cenderung untuk mendukung partai politik yang dianggap memiliki program-program atau visi-misi yang paling baik, dan partai tersebut memiliki tokoh-tokoh atau kandidat politik yang tidak bermasalah dan berkemampuan lebih.

6. Berdasarkan tipologi perwilayahan, Bolaang Mongondow dapat diklasifikasikan berdasarkan etnisitas, wilayah pesisir dominan Mongondow dan Sangihe, Wilayah Tengah untuk Mongondow, Minahasa, Jawa, Bali. Partai-partai berbasiskan agama mendapatkan suara yang cukup besar. Wilayah Tengah seperti dataran Dumoga, di pesisir suara didominasi oleh partai-partai nasionalis. Terjadi pergeseran di mana pemilih tidak lagi setia terhadap partai, namun lebih condong untuk memperhatikan figur kandidat. Kemudian perilaku pemilu yang pragmatis telah menggejala atau menguat di semua wilayah, perilaku ini lebih dimainkan oleh politik uang dan strategi partai/ kandidat.
7. Dari hasil pemaparan dan analisis tentang Perilaku Pemilih Masyarakat di Bolaang Mongondow, dapat penulis simpulkan bahwa masih banyak wilayah yang termasuk dalam kategori Perilaku Pemilih Tradisional, yaitu pemilih yang lebih mengutamakan nilai sosial budaya, asal-usul, etnis, agama, dan lain-lain. Loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan dari pemilih tradisional. Ini pula salah satunya yang membuat partisipasi pemilih sangat tinggi di Bolaang Mongondow, karena karakter

tradisional ini yang kental feodalistiknya, dimana kepatuhan warganya sangat tinggi.

8. PDIP merupakan partai yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 dan pemilihan Bupati / Wakil Bupati. Kandidat yang diusung PDIP menang telak. Sebelumnya kabupaten Bolaang Mongondow didominasi oleh Golongan Karya. Partai politik tidak memberi jaminan seorang kandidat akan lebih banyak dipilih masyarakat pemilih. Mereka yang masih kuat dengan pengaruh partai, dapat dilihat pada mesin partai terutama partai lama yang telah memiliki massa loyalis, masih saja sangat berperan dan berpengaruh kuat. Akan tetapi kemenangan partai di lain pihak karena figure, strategi kampanya dan uang menjadi hal yang dianggap pilihan paling berpengaruh dan rasional.
9. Pola kepemimpinan dan politik etnik orang Mongondow sangat mempengaruhi perilaku pemilih etnik Mongondow. Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya bahwa karakteristik orang Mongondow yang memiliki sejarah panjang sistem kerajaan maka tradisi feodalistik sangat kental bagi masyarakat Mongondow, sehingga ikatan etnik, patron klien dalam bentuk pembagian kelas masih mewarnai kepemimpinan dan ikatan struktur sosial masyarakatnya. Dalam lingkup perkampungan masyarakat Mongondow, masih sangat berpengaruh para lembaga adat atau yang disebut Guhanga, yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya seperti dalam pemeliharaan keamanan, hubungan kekerabatan, perkawinan, kematian, dansiklus kehdupan masyarakat lainnya. Sehingga terkadang warga lebih mendengarkan tokoh adatnya daripada pemerintah formal. Faktor ini dimanfaatkan sebagian politisi untuk menjaring suara dari tokoh-tokoh adat, pemuka-pemuka atau tokoh

dalam ikatan keluarga besar. Kemudian mereka yang berasal dari kaum "bangsawan" dalam arti memiliki hubungan darah dari keturunan raja Bolaang Mongondow seperti pada marga Manoppo, Mokoagouw, Mokodompit, Paputungan, Sugeha, dll sehingga pengaruh nama-nama keluarga besar tersebut turut berpengaruh besar.

10. Membicarakan etnik Minahasa karena Bolaang Mongondow secara demografi telah sangat majemuk atau beragam etniknya, yang terbesar adalah Mongondow, Minahasa, Sangihe, Jawa, dan Bali. Soal Minahasa, Mengenai politik etnik Minahasa dalam kaitannya dengan pemilihan umum di Bolaang Mongondow, mereka banyak tersebar di wilayah dataran Dumoga, Poigar. Saat ini wakil bupati Yani Tuuk dan Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling berlatar etnik Minahasa. Dimana jumlah pemilihnya cukup besar. Pemilihnya sebagian besar berkarakter individual dan memilih dengan dimensi rasional, dikarenakan latar budayanya yang tidak pernah mengenal tradisi kerajaan dan feodalistik dimana faktor strata sosial berdasarkan tradisi feodalistik tidak berpengaruh, sehingga pilihan perilaku yang berwatak seperti ini dan tergantung pada faktor individu yang ia pilih, dengan mencermati faktor lain di luar unsur-unsur feodalistik dan etnisitas. Karena itu figur yang memiliki kapasitas lebih, sangat menentukan, kemudian figur yang membuat pendekatan langsung apakah dengan strategi kampanyanya atau dengan materi yang diberikan.
11. Etnik Sangihe termasuk Talaud, cukup besar jumlahnya di kabupaten Bolaang Mongondow, mereka mendiami kawasan pesisir utara di wilayah Poigar, Inobonto, Lolak. Keran itu pemilih mereka sangat berperan, beberapa anggota legislatif berasal dari etnik ini. Dan para kandidat beramai-ramai mendekati

etnik ini untuk menggalang suara. Politik etnik Sangihe dalam kaitannya dengan perilaku pemilih di Bolaang Mongondow, bahwasanya karakter feodalistik yang dibawa dari pola kerajaan dalam sejarah sosial mereka, sehingga memiliki kemiripan dengan karakter etnik Mongondow. Atasnya pemilih sangat ditentukan oleh faktor-faktor unsur-unsur tradisi dan etnisitas. Faktor kekeluargaan akan sangat berpengaruh ketika memilih seorang kandidat, dalam pemukiman etnik Sangihe, tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat yang dituakan dan dinilai masih murni, akan sangat disegani oleh semua unsur masyarakat. Karena ini, mereka akan sangat loyal kepada tokoh atau kepada partai. Jelas model ini bersifat pemilih tradisional. Khusus partai, pengaruh PDIP terhadap mereka cukup kuat, sehingga menjelaskan akan kemenangan PDIP pada masyarakat Bolmong berlatar etnik Sangihe.

12. Perilaku memilih Tokoh masyarakat masih sangat dipengaruh system kerabatan/kekeluargaan dalam hal ini kesukuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, masih terkesan terikat dengan ikatan-ikatan primordialisme kedaerahan. Pada prinsipnya pemimpin itu mesti dekat dengan masyarakat, dan memiliki kecerdasan serta aklhak yang baik untuk dijadikan panutan bagi masyarakat. Pada satu sisi ada Tokoh Agama tersebut cenderung memberikan legitimasi kepada salah satu kandidat, walaupun tidak secara langsung mendukung tetapi ini menunjukkan dan menganggap bahwa apa yang dibahasakannya, tersirat dukungan yang terselubung. Tokoh masyarakat cenderung mengarahkan pandangan politik masyarakat pada wacana kesukuan. Tokoh masyarakat sebagai *patron* yang memiliki kekuasaan dan mengarahkan opini publik.

13. Mengenai fenomena politik uang, didapati bahwa perkunjungan langsung ke masyarakat adalah sangat diandalkan para caleg dan tim pemenangannya. Kemudian lebih dari itu masyarakat juga meminta uang atau dalam bentuk barang. Bagi sebagian masyarakat uang atau barang sebagai tanda jadi atau uang panjar untuk memilih caleg tersebut. Politik uang sudah semakin menguat dan masif. Penyaluran uang dan barang terjadi dalam beberbagai bentuk seperti serangan fajar sebelum pemilih ke TPS. Kalau barang-barang disalurkan sebelum pemilihan, yakni berupa sembako, kartu asuransi, dll.
14. Pendekatan yang selalu dilakukan para caleg adalah pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang memiliki massa besar. Akan tetapi pendekatan terlebut lagi-lagi harus disertai dengan pemberian sejumlah uang atau barang.untuk menggerakan tokoh-tokohnya. Meski telah melakukan negosiasi ataupun sang caleg adalah beradal dari komunitas tersebut. Tetap saja ia harus melakukan penyerahan uang yang akan membuat istitusi itu melakukan konsolidasinya. Ketidakberdayaan sang kandidat memberikan sejumlah uang, membuatnya tersingkir, sebab caleg lain yang diluar komunitas bisa melakukan transaksi. Kecuali memang ketokohannya sangat kuat dalam komunitas tersebut.
15. Pemberian uang kepada konsituan telah dianggap biasa, sang kandidat harus rajin melakukan kunjungan dan meninggalkan uang pada pendungnya. Banyak yang tidak melakukan hal tersebut, pada akhirnya tidak mendapatkan dukungan kecuali faktor keluarga dan ketokohan seperti yang disebutkan tadi. Meski warga Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan kelas menengah, dan banyak juga kelas atas. Akan tetapi uang dianggap sebagai tanda bahwa Caleg serius akan berkontribusi selanjutnya ketika menjadi anggota Dewan.

16. Aksi permainan uang di medan politik pemilu telah membiasa pada masyarakat. Namun ada bagian lain yang tidak hilang dalam strategi pemenangan sang kandidat, yakni mengandalkan pola kerja partai politik serta daya pemikatnya masih saja ada, pemilih juga masih mengacuhkan pilihan pada pandangan politiknya. Masih banyak anggota atau simpatisan Partai Politik tertentu yang tetap menjatuhkan pilihan kepada kandidat dari partai yang sesuai dengan pandangan politiknya. Baru kemudian latar belakang agama kepercayaan, keluarga atau kekerabatan, komunitas, organisasi, birokrasi pemerintahan. Mana yang lebih kuat mempengaruhi, sangat tergantung kepada kinerja faktor-faktor tersebut.

B. Saran/ Rekomendasi

1. Perilaku pemilih pada masyarakat Bolaang Mongondow dengan masih kuatnya faktor etnisitas dan ikatan-ikatan primordial lainnya, perlu dilihat secara positif bahwasanya ketika faktor agama, etnik, tradisi, ideologis diarahkan kepada penentuan kandidat politik yang baik seperti melihat figur, program dan Trac recordnya akan menjadikan pilihan politik rakyat tersebut menjadi baik, dan menghasilkan pemimpin rakyat yang baik pula. Bukannya diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya pragmatis saja seperti uang dan mteria lainnya.
2. Pemberdayaan atau penguatan kapasitas lembaga adat, lembaga agama dalam hal pendidikan politiknya perlu dilakukan oleh pemerintah , dan bisa dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga lainnya baik pemerintah maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pendidikan politik kepada rakyat secara keseluruhan perlu dilakukan.

3. Kembalikan tradisi orang Mongondow yakni nilai-nilai luhur yang untuk menentukan pemimpin yang jujur, memiliki kapasitas (bogani), mampu mengayomi rakyat.
4. Rekrutmen calon pemimpin seperti untuk kepala daerah dan anggota legislatif, harus betul-betul diatur dan lebih terperinci lagi. Selain pada partai politik ada seleksinya, maka di KPU harus juga ada seleksi publik atau uji publik. Ini untuk menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas dan memiliki kapasitas yang baik.
5. Rusaknya tatanan demokrasi rakyat karena perilaku pragmatisme yang muncul saat ini, terlihat dalam maraknya atau masifnya perilaku politik uang. Atasnya peraturan soal mekanisme pemilihan dan tindakan bagi para pelanggar harus betul-betul diatur dan dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Daniel S. Salossa, Mekanisme, Persyaratan dan tata cara Pemilukada langsung, (Yogyakarta, Media Presindo, 2005)

Denis Kavanagh, Political Science and Political Behaviour (London: Allen and Unwin, 1983)

Dieter, Roth.2008.Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode. Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung Die Freiheit. Efriza.Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. 2012. Bandung:Alfabeta

Gaffar, Afan. 1992. Javanese Voters: A Case Study Of Election Under AHegemonis Party System. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jhonson Doyle Paul. Teori Sosiologi Klasik dan Modern.1988. Jakarta: PT. Gramedia

Kristiadi,1993, Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih (Disertasi).

Moleong, J Lexi. 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung

Rahma, Miftahul. 2011. Perilaku Politik Pemilih Pada Pemilu Legislatif. Makassar: Universitas Hasanuddin

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik.2010. Jakarta: PT Grasindo

Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Jakarta. 1983).

Notosoesanto. Beschrijving van het adatrecht in Bolaang Mongondow (R.P.Notosoesanto).

Efriza. 2012. Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung:Alfabeta

Kavanagh, Denis, 1983. Political Science and Political Behaviour (London: Allen and Unwin, 1983)

Surbakti, Ramlan 2010. Memahami Ilmu Politik. Grasindo, Jakarta.

Makalah-tentang-partisipasi-politik.html (http://udin-note.blogspot.com/2013/09/)

Machmud, Rahmat. 2014. Partisipasi Islam Tradisional dalam Mengawal Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Skripsi FISPOL Universitas Sam Ratulangi

Peter Paul dan Olson Jerry, 1996. Counsumer Behavior, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, Penerbit Erlangga

Kotler Philip dan Amstrong Gary, 2001. Dasar-dasar Pemasaran, PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Kushartono, Toto, 2006, Perilaku Pemilih di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi secara Langsung Tahun

Riyanto, Bedjo, 2004, Iklan Politik, Era Image, dan Kekuasaan Media, Nirmana Vol.6, No.2, Juli 2004, hal. 143 - 157 (Universitas Kristen Petra)

Amirudin dan Bisri, A. Zaini, 2006, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek (Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005), Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Firmanzah, 2007, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas, Yayasan Obor Indonesia (YOI), Jakarta

Kotler, Philip, 2006, According to Kotler, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Mongilala Andika, 2010. Tesis : PENGARUH BRAND PERSONALITY DAN SALES PROMOTION TERHADAP BRAND EQUITY KANDIDAT GUBERNUR SULUT 2010" (Studi Kasus dari Persepsi Mahasiswa). Universitas Sam Ratulangi, Manado